

PENGARUH TINGKAT INFLASI DAN UPAH MINIMUM REGIONAL TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA DI INDONESIA TAHUN 2008-2013

DEWI MENTARI

8105108036



**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Jakarta**

**KONSENTRASI PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2014**

**THE INFLUENCES OF RATE INFLATION AND THE
REGIONAL MINIMUM WAGE TOWARD OPEN
UNEMPLOYMENT IN INDONESIA IN THE YEAR OF 2008-
2013**

DEWI MENTARI

8105108036



**Skripsi in Written as Part of Bachelor Degree in Education Accomplishment
at The Faculty Of Economics, State University Of Jakarta**

**STUDY PROGRAM OF EDUCATION ECONOMIC
CONSCENTRATION IN EDUCATION ECONOMIC
COOPERATIVE
DEPARTEMENT OF ECONOMICS AND ADMINISTRATION
FACULTY OF ECONOMICS
STATE UNIVERSITY OF JAKARTA
2014**

ABSTRAK

DEWI MENTARI, “Pengaruh Tingkat Inflasi dan Upah Minimum Regional (UMR) Terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2008-2013”.

Skripsi. Pendidikan Ekonomi Koperasi. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2014. Dosen Pembimbing: Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si dan Dicky Iranto, SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat inflasi dan upah minimum regional terhadap pengangguran terbuka di Indonesia. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan jenis data *time series* periode 2008-2013 dan *cross section* sebanyak 33 provinsi di Indonesia yang menghasilkan 198 observasi, diperoleh dari BPS. Metode penelitian menggunakan metode *ekspose facto*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel dengan menggunakan software *Eviews 6,0*, output menunjukkan bahwa tingkat inflasi (X1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka (Y) di Indonesia. Dan upah minimum regional (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka (Y) di Indonesia. Dari hasil Uji F dengan memperhatikan nilai signifikansinya = $0,000000 < 0,05$ maka dapat dikatakan secara simultan tingkat inflasi dan upah minimum regional berpengaruh signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0.907474 memiliki pengertian bahwa perubahan tingkat pengangguran dapat dijelaskan oleh perubahan tingkat inflasi dan upah minimum regional sebesar 90,74% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak ada dalam model penelitian ini.

Kata Kunci : Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Inflasi, Upah Minimum Regional

ABSTRACT

DEWI MENTARI. “The Influences of Rate Inflation and The Minimum Wage Toward Open Unemployment in Indonesia in the year of 2008-2013.” Thesis. The Education of Cooperation Economic. Economic and Administration Major. Faculty of Economic. State University of Jakarta. 2013. Lecturer Advisor Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si dan Dicky Iranto, SE, M.Si

This research is aimed to analyze the influence of rate inflation and the minimum wage toward open unemployment in Indonesia. The data used in this research are the secondary data which is time series type of data in the year of 2008-2013 and cross section as many as 33 provinces in Indonesia, which produces 198 observations, source from BPS. The method of this research is expose facto. The technique of data analysis in this research is the multiple regression analysis. Based on multiple regressions using Eviews 6,0 software, the output has indicated the rate inflation (X1) is positively and not significantly affected to the open unemployment (Y) in Indonesia. While, the minimum wage (X2) is negatively and significantly affected to the open unemployment (Y) in Indonesia. Based on the test with respect to F significant value = 0,000000 < 0,05, it is can be concluded that the rate inflation and the minimum wage as togetherness is significantly affected on $\alpha = 5\%$ against to the open unemployment in Indonesia. Determination coefficient value that obtained is 0.907474, it means that the changes of the open unemployment be explained by the rate inflation and the minimum wage as amount 90,74 %. While, the rest could be explained by others factor that can not be mentioned in this research model.


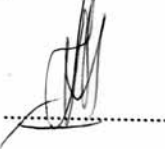

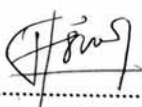

Keywords : open unemployment, rate inflation and minimum wage

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Dedi Purwana, E.S, M.Bus
NIP. 19671207 199203 1 001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Karuniana Dianta AS, S.IP, ME</u> NIP. 19800924 200812 1 002	Ketua		21/7 ¹⁴
2. <u>Sri Indah Nikensari, SE, M.Si</u> NIP. 19620809 199003 2 001	Sekretaris		23/7 ¹⁴
3. <u>Dr. Harya Kuncara W, SE, M.Si</u> NIP. 19700207 200812 1 001	Penguji Ahli		24/7 ¹⁴
4. <u>Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si</u> NIP. 19720114 199802 2 001	Pembimbing I		23/7 ¹⁴
5. <u>Dicky Iranto, SE, M.Si</u> NIP. 19710612 200112 1 001	Pembimbing II		21/7 ¹⁴

Tanggal lulus: Juli 2014

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana di Universitas Negeri Jakarta
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta

Jakarta, Juli 2014

Yang membuat pernyataan



Dewi Mentari

8105108036

Motto

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Inna ma'a l'usri yusraa”

sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan

Surat Al Insyirah ayat 6

“Pekerjaan Hebat Tidak Dilakukan
Dengan Kekuatan, Tapi Dengan
Ketekunan dan Kegigihan”

-Samuel Jhonson-

“Kehormatan Adalah Penghargaan Bagi Orang Yang Telah
Memberikan Sesuatu Yang Berarti”

-Albert Einstein-

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah Subhanahu
Wata'ala atas rahmat dan hidayahnya, karya yang
sederhana ini dapat terselesaikan

Kupersembahkan hasil karya ini kepada yang Teristimewa :

Ayahanda dan Ibunda yang selalu dengan sabar dalam mendidik
adinda. Ucapan terima kasih sepertinya tidak dapat
menggambarkan perasaan dinda karena sudah begitu banyak
kebaikan dan keihklasan selama ini yang diberikan. Alhamdulillah,
dinda telah menyelesaikan amanah ini, Insya Allah dinda akan
selalu membahagiakan Ayah dan Bunda dan dinda ingin meminta
maaf atas segala khilaf yang dinda lakukan.
“Adinda sangat mencintai dan menyayangi
Ayah dan Bunda”

Terima kasih Saya Ucapkan Untuk Orang-Orang yang
Menyayangi dan Mencintai Saya, atas Kehadirannyalah
Saya dapat Kuat Menerima Segala Ujian dari Allah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, kekuatan, dan ridho-Nya telah memudahkan Penulis dalam penyusunan penelitian Skripsi ini yang berjudul *“Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Upah Minimum Regional (UMR) Terhadap Jumlah Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2008-2013”*.

Penelitian ini disusun dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dicky Iranto, SE, M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah sangat sabar memberikan saran dan arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Dedi Purwana, E.S, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bapak Drs. Nurdin Hidayat, M.M, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi
3. Ibu Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Bapak Karuniana Dianta A.S, S.IP, ME, selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi
4. Teristimewa, Kedua orang Penulis yaitu Bapak Anjen dan Ibu Suhaemah tercinta yang selalu menjadi motivasi dan inspirasi dalam hidup, yang

senantiasa tidak henti-hentinya melantunkan iringan doa dalam setiap perjalanan Penulis. Terimakasih atas segala doa, pengorbanan, perhatian, cinta yang tulus, dan kasih sayang

5. Kakakku, Lilis terimakasih untuk setiap doa dan dukungan baik secara materi maupun non materi yang diberikan kepada penulis.
6. Partner terbaik dalam suka dan duka penulisan skripsi Arum Triandari dan Iftah Nurfiqriah Putri. Serta sahabat-sahabat seperjuangan yang senantiasa memberi motivasi Riva Elisa, Dina Madarina, Melisa Dwi Puspa, Annisa Virdania, Veranika Virgiana, Resti Sandy Tias, Annisa Khusnul dan Citra.
7. Sahabat terbaik Ayu Fitriani, Riana, Haryanti, dan Venny Rohfiani, terimakasih telah memberi semangat, arti persahabatan, kekeluargaan yang kita bina selama tujuh tahun. Dan terisitimewa Alm. Desi Ayu Septianingsih yang sudah tenang di alam sana, terima kasih sudah banyak mengajarkan kepada kami atas pembelajaran kesabaran dan keikhlasan atas takdir Allah yang Dia diberikan.
8. Tubagus Maimun Yanuari, terima kasih atas dukungan dan motivasi yang tak henti-hentinya diberikan kepada Penulis, serta doa yang selalu dipanjatkan kepada Penulis, terima kasih telah memberikan kasih sayang kepada Penulis selama tiga tahun ini.
9. Teman-teman seperjuangan kelas Pendidikan Ekonomi Koperasi Non Reguler 2010, terimakasih untuk keceriaan yang telah mewarnai hari-hari penulis selama empat tahun, serta suka dan duka yang kita lalui bersama-sama. Semoga kelak talisilaturahmi kita tetap terjaga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, Juni 2014

Dewi Mentari

DAFTAR ISI

JUDUL	i
Tittle	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Pembatasan Masalah	15
D. Perumusan Masalah	16
E. Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II KAJIAN TEORETIK	
A. Dekripsi Konseptual	17
1. Permintaan Tenaga Kerja	17
2. Penawaran Tenaga Kerja	20
3. Keseimbangan Tenaga Kerja	23
4. Pengangguran	24
5. Inflasi	37
6. Upah Minimum Regional	45
B. Hasil Penelitian yang Relevan	50
C. Kerangka Teoretik	53
D. Perumusan Hipotesis	56
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	57
B. Tempat dan Waktu Penelitian	57
C. Metode Penelitian	57
D. Jenis dan Sumber Data	58
E. Operasionalisasi Variabel Penelitian	59
1. Pengangguran	
a. Definisi Konseptual	59
b. Definisi Operasional	59
2. Inflasi	
a. Definisi Konseptual	60
b. Definisi Operasional	60
3. Upah Minimum Regional	
a. Definisi Konseptual	60

b. Definisi Operasional	61
F. Konstelasi Hubungan Antar Variabel	61
G. Teknik Analisis Data	62
1. Metode Analisis	62
a. Analisis Data Panel	62
b. Estimasi Model	65
c. Penyeleksian Model Estimasi Data Panel	66
2. Pengujian Kriteria Statistik	69
a. Uji F (Overall Test)	69
b. Uji T (Partial Test)	70
3. Analisis Koefisien Determinasi	71
4. Pengujian Asumsi Klasik.....	72
a. Uji Normalitas	72
b. Uji Heterokedastisitas	73

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data	75	
1. Pengangguran	75	
2. Inflasi	83	
3. Upah Minimum Regional	88	
B. Analisis Data	95	
1. Persamaan Regresi	98	
2. Uji Hipotesis Penelitian.....	99	
3. Uji Persyaratan Analisis.....	104	
C.		Pemba
hasan	106	
D.		Keterb
atasan Penelitian	111	

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan	113
B. Implikasi	114
C. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	120

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
I.1	Persentase Tingkat Pengangguran, Tingkat Inflasi, Dan Persentase Pertumbuhan Tingkat Upah Pada Periode 10 Tahun	3
I.2	Matrik Ijin Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013	11
II.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	50
IV.1.1	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Provinsi Tahun 2008-2013	76
IV.2.1	Inflasi Indonesia Menurut Kelompok Pengeularan	86
IV.3.1	Upah Minimum Regional Indonesia Tahun 2008-2013	89
IV.3.2	Kebutuhan Hidup Layak Indonesia Tahun 2008-2013	93
IV.4	Hasil Uji Chow	96
IV.5	Hasil Uji Hausman	97
IV.6	Persamaan Regresi	98
IV.7	Hasil Uji t	99
IV.8	Uji F	101
IV.9	Uji R	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
I.1	Keadaan Pengangguran Menurut Usia di Indonesia Tahun 2013	6
I.2	Tingkat Pertumbuhan Upah Nominal dan Upah Riil Tahun 2008-2013	13
II.1	Original Philips Curve	30
IV.1.1	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2008-2012	78
IV.1.2	Tingkat Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2008-2013	80
IV.2.1	Tingkat Inflasi di Indonesia Berdasarkan WIB Tahun 2008-2013.....	83
IV.2.2	Tingkat Inflasi di Indonesia Berdasarkan WITA Tahun 2008-2013	84
IV.2.3	Tingkat Inflasi di Indonesia Berdasarkan WIT Tahun 2008-2013	85
IV.3	Uji Normalitas	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1	Data jumlah pengangguran, tingkat inflasi, dan UMR tahun 2008-2013.....	120
2	Data jumlah pengangguran, tingkat inflasi, dan UMR tahun 2008-2013 (Ln)	125
3	Uji Chow	130
4	Uji Hausman	131
5	Persamaan Regresi	132
6	Uji Normalitas	134
7	Uji Heterokedastisitas	135
8	Tabel Distribusi T	136
9	Tabel Distribusi F	137

!

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Suatu proses pembangunan dinyatakan berhasil apabila terjadi kenaikan pendapatan masyarakat yang dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja dan kestabilan harga.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya serta kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja yang dibarengi dengan penambahan sumber pendapatan. Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut, yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan.

Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satu di antaranya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau bahkan mengalami kemunduran. Selain itu dengan tingkat pengangguran, dapat dilihat pula ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima suatu masyarakat negara tersebut. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja.

Sebagai negara berpenduduk terbesar ke-4 di dunia, Indonesia memiliki angkatan kerja yang sangat besar. Berdasarkan data BPS menunjukkan jumlah penduduk Indonesia yang mengalami kenaikan dari tahun-ketahun. Secara umum pasar kerja Indonesia dicirikan oleh kelebihan penawaran tenaga kerja yang sangat tinggi dan kualitas tenaga kerja yang masih rendah sehingga menyebabkan kenaikan jumlah tenaga kerja yang tidak terserap ke lapangan pekerjaan, dengan kata lain pengangguran naik.

Indonesia saat ini berada dalam tahap pembangunan dengan memiliki penduduk usia kerja yang lebih tinggi dibandingkan penduduk yang dependen dan lansia. Untuk mengoptimalkan keadaan ini, sangatlah penting bagi Pemerintah untuk memperluas investasi dibidang pendidikan dan

pelatihan keterampilan, khususnya karena pekerja berpendidikan tinggi dapat memiliki upah lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih baik.

Berikut ini disajikan data tentang angka pengangguran di Indonesia periode tahun 2003 – 2013 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1.1
Persentase Tingkat Pengangguran, Tingkat Inflasi,
Dan Persentase Pertumbuhan Tingkat Upah
Pada Periode 10 Tahun
Tahun 2003 – 2013

Tahun	Tingkat Pengangguran (dalam persen)	Tingkat Inflasi (dalam persen)	Tingkat Upah (dalam ribuan rupiah)
2003	9,67	5,06	414,7
2004	9,86	6,40	458,5
2005	11,24	17,11	507,7
2006	10,28	6,60	602,2
2007	9,11	6,59	667,9
2008	8,39	11,06	743,2
2009	7,87	2,78	830,7
2010	7,14	6,96	908,8
2011	6,56	3,79	1119,1
2012	6,14	4,30	1332,4
2013	6,25	8,38	1595,9

Sumber : BPS, data diolah

Berdasarkan tabel 1.1 tingkat pengangguran menurun selama beberapa tahun terakhir di Indonesia, hingga mencapai titik rendah yaitu 6,14 persen pada tahun 2012 dan ini merupakan tingkat pengangguran terendah yang dicapai di Indonesia selama satu dekade terakhir. Namun, krisis yang terjadi baru-baru ini dan dengan kenaikan upah minimum membuat tingkat pengangguran meningkat hingga 6,25 persen di bulan Agustus 2013. Ini adalah pertama kalinya tingkat pengangguran meningkat di Indonesia sejak tahun 2005. Penyebab tingginya tingkat pengangguran di Indonesia yang terjadi pada tahun 2005 yaitu sebagai dampak kenaikan harga BBM pada awal Maret 2005 maupun awal Oktober 2005, terutama di sektor industri padat karya dan usaha-usaha kecil yang menggunakan BBM sebagai penunjang kegiatan utamanya.

Berdasarkan data BPS dalam tabel 1.1 menyatakan, angka pengangguran di Indonesia per tahun 2013 melonjak 6,25 persen atau sebanyak 7,39 juta jiwa dari tahun 2012 sebanyak 7,24 juta jiwa.¹ Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan bahwa tahun 2013 adalah tahun dengan gejolak ekonomi global yang memberikan tekanan cukup serius untuk domestik. Sehingga pemerintah terpaksa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada ketersediaan tenaga kerja.²

Penambahan jumlah lapangan kerja baru yang lebih kecil dibanding pertambahan angkatan kerja baru, diduga juga menyebabkan terjadi penambahan jumlah penganggur baru. Dengan penambahan ini seharusnya juga didukung oleh

¹ Tahun 2013, Pengangguran di Indonesia Melonjak
(<http://ekonomi.kompasiana.com/wirusaha/2013/11/07/tahun-2013-pengangguran-di-indonesia-melonjak-605967.html>)

² Ekonomi RI Tumbuh 5,7% di 2013, Tapi Pengangguran Belum Bisa Diatasi
(<http://finance.detik.com/read/2014/02/05/191226/2488489/4/ekonomi-ri-tumbuh-57-di-2013-tapi-pengangguran-belum-bisa-diatasi>)

penambahan investasi baru dan peningkatan kapasitas produksi pada sektor-sektor yang kurang menampung banyak tenaga kerja. Untuk menekan angka pengangguran ke depan, diperlukan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkesinambungan dengan orientasi pada penciptaan lapangan kerja yang luas.

Tingkat pengangguran menurun selama beberapa tahun terakhir di Indonesia, yang sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang positif dimana perekonomian Indonesia telah mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yaitu tingkat pertumbuhan PDB berada antara 5 dan 6 persen selama periode terakhir. Pada tahun 2012 pengangguran diperkirakan mencapai 4,30 persen, ini merupakan tingkat pengangguran terendah dicapai di Indonesia selama dekade terakhir. Namun, penurunan terbaru dalam indikator ekonomi telah melihat adanya peningkatan tingkat pengangguran hingga 6,25 persen di bulan Agustus 2013. Ini adalah pertama kalinya tingkat pengangguran meningkat di Indonesia sejak tahun 2005.

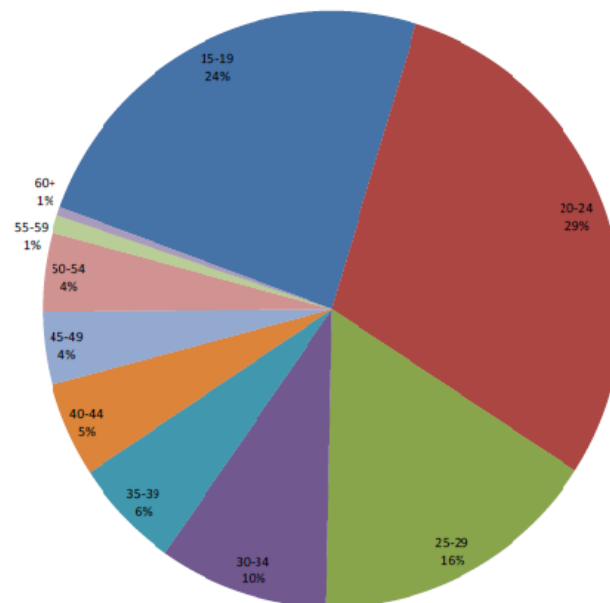
Pengangguran tertinggi terlihat di kalangan lulusan SMA dan SMK. Mereka umumnya berusia antara 15 sampai 25 tahun dan belum punya pengalaman kerja. Secara umum, sebagian besar pekerja yang menganggur di Indonesia sedang mencari pekerjaan. Hanya sebagian kecil yang sudah merasa putus asa dan enggan mencari pekerjaan atau sedang mempertimbangkan upaya untuk membuka usaha sendiri atau menunggu dibukanya lowongan kerja baru.

Tingkat pendidikan memainkan peran penting dalam keterlibatan pasar kerja bagi pengangguran. Lebih lanjut dijelaskan, sebagian besar pencari kerja yang menganggur telah lulus SMA sebagai tingkat pendidikan tertinggi mereka,

sementara sebagian besar pekerja menganggur yang kehilangan semangat memiliki tingkat pendidikan SMP atau lebih rendah. Pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesempatan lebih tinggi untuk memenuhi kriteria perekrutan perusahaan, sementara pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah mungkin tidak memenuhi tuntutan dengan mudah, dan oleh karena itu pekerja ini memiliki risiko kehilangan semangat lebih tinggi.

Gambar 1.1

Keadaan Pengangguran Menurut Usia di Indonesia Tahun 2013



Sumber : BPS (2013) Keadaan Pekerja di Indonesia: Februari 2013, Badan Pusat Statistik, Jakarta

Ditinjau dari sudut perekonomian, pengangguran menimbulkan masyarakat yang tidak dapat memaksimumkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Ketidaktercapaian masyarakat dalam memaksimumkan

tingkat kesejahteraannya menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Disamping itu dampak dari adanya masalah pengangguran dapat pula mengganggu serta menurunkan taraf kesehatan dan pendidikan keluarganya. Sehingga pengangguran yang berkepanjangan menimbulkan efek psikologis yang buruk ke atas diri penganggur beserta keluarganya.

Permasalahan pengangguran memang sangat kompleks untuk dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator-indikator. Indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran sebagai akibat dari kekurangan permintaan agregat disebabkan oleh aliran investasi yang rendah, suku bunga yang tinggi, ketimpangan neraca pembayaran, dan tingginya tingkat inflasi.³ Namun yang menjadi sumber utama dalam permasalahan kurangnya permintaan agregat adalah tingginya tingkat inflasi. Dengan kenaikan tingkat inflasi tersebut, akan membawa kecenderungan terhadap penurunan taraf kemakmuran bagi sebagian besar masyarakat.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat persentase tingkat inflasi Indonesia dari tahun 2003 sampai tahun 2013 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 17,11% yang diikuti dengan penambahan tingkat pengangguran yaitu sebesar 11,24% kemudian tinggi kembali pada tahun 2008 yaitu sebesar 11,06 dan inflasi terendah pada tahun 2009 yaitu sebesar 2,78. Dan kembali tinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,38%.

³ Sadono Sukirno, Op.cit., p. 13-16

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, bahwa harapan pemerintah untuk menekan inflasi sepanjang 2013 tidak berhasil, pada awalnya pemerintah menargetkan inflasi 2013 sebesar 5,8 persen, namun karena gejolak ekonomi global yang berpengaruh negatif terhadap perekonomian Indonesia, angka tersebut direvisi menjadi 7,2 persen. Angka itu pun tidak dapat dicapai pemerintah. Kepala BPS, Suryamin mengatakan, sejak Maret 2013 inflasi terus terjadi karena harga berbagai komoditas naik menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Juni. Kenaikan harga tidak terkendali terutama terjadi hingga September 2013.⁴

Semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi ini. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara. Tingkat inflasi (persentasi pertambahan kenaikan harga) berbeda dari satu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain. Adakalanya tingkat inflasi rendah yaitu mencapai di bawah 2 sampai 3 persen. Tingkat inflasi yang moderat mencapai diantara 4 sampai 10 persen.⁵

Dalam jangka pendek tingginya tingkat inflasi merupakan permasalahan yang akan menurunkan daya beli masyarakat. Untuk bisa bertahan pada tingkat daya beli seperti sebelumnya, para pekerja harus mendapatkan gaji paling tidak sebesar tingkat inflasi. Jika tidak rakyat tidak mampu lagi membeli barang-barang yang di produksi. Tetapi inflasi biasanya berlaku lebih cepat dari kenaikan upah para pekerja. Oleh sebab itu upah riil para pekerja akan merosot disebabkan oleh

⁴BPS: Inflasi, Kemiskinan Meningkat pada 2013 (<http://www.voaindonesia.com/content/bps-inflasi-kemiskinan-meningkat-pada-2013/1822602.html>)

⁵Sadono Sukirno, Ibid., p. 14

inflasi. Jika seperti itu maka banyak barang-barang yang diproduksi tidak ada yang membeli sehingga banyak pula perusahaan yang akan berkurang keuntungannya. Jika keuntungan perusahaan berkurang maka perusahaan akan berusaha menekan biaya sebagai konsekuensi atas berkurangnya keuntungan. Hal inilah yang akan mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah pekerja atau buruhnya dengan mem-PHK para pekerjanya.

Dalam jangka panjang apabila inflasi tidak dapat dikendalikan akan menjadi semakin memburuk. Untuk inflasi yang bertambah serius tersebut cenderung mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor.⁶ Kemungkinan hal terburuknya adalah tingkat pengangguran yang semakin tinggi dan tidak dapat teratasi karena tidak ada lagi investor yang menanamkan investasinya di Indonesia. Pada masa inflasi tinggi terdapat kecenderungan diantara pemilik modal untuk menggunakan uangnya dalam investasi yang bersifat spekulatif. Membeli rumah dan tanah, serta menanamkan modalnya ke dalam portofolio dianggap akan lebih menguntungkan daripada melakukan investasi yang produktif.

Keputusan pemilik modal tersebut dilatar belakangi oleh tingkat bunga yang meningkat saat terjadinya inflasi. Tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi kegairahan penanam modal untuk mengembangkan sektor-sektor produktif (sektor riil) dalam melakukan penyerapan tenaga kerja. Selain itu inflasi juga menyebabkan harga barang-barang impor lebih murah daripada barang yang dihasilkan di dalam negeri. Maka pada umumnya inflasi akan menyebabkan

⁶Sadono Sukirno, *Ibid.*, p. 15

impor berkembang lebih cepat. Tetapi sebaliknya perkembangan ekspor akan bertambah lambat. Disamping itu aliran modal keluar akan lebih banyak daripada yang masuk ke dalam negeri, maka lebih banyak pengangguran dan defisit neraca pembayaran akan berlaku.

Alasan lain adanya pengangguran adalah upah. Setiap tahun, penentuan upah minimum selalu menjadi bahasan utama di antara pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah. Tahun 2013 ini, dikejutkan dengan penetapan kenaikan upah yang sangat signifikan di sejumlah wilayah. Untuk menetapkan upah minimum provinsi, masing-masing Dewan Pengupahan Provinsi, yang terdiri dari pekerja, pengusaha, dan pemerintah, serta penasihat dari akademisi, melakukan survei untuk menentukan upah yang diperlukan untuk mendapatkan “standar minimum hidup layak” atau “kebutuhan hidup layak “(KHL). Gubernur masing-masing provinsi menetapkan upah minimum provinsi, setelah menerima rekomendasi dari Dewan Pengupahan tingkat Provinsi. Idealnya, upah minimum harus setara dengan KHL.

Terlepas dari hal ini, kesenjangan antara KHL dan upah minimum dari waktu ke waktu telah muncul. Upah minimum provinsi 2013 secara nasional naik rata-rata 18,9% (19,1%) dari tahun sebelumnya dan merupakan kenaikan yang cukup tinggi sejak krisis ekonomi 1997. Kenaikan UMP ini terutama didominasi oleh kenaikan di beberapa provinsi basis industri seperti Jakarta, Riau Kepulauan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Maluku dan Bengkulu yang kenaikannya di atas 20%.

Kenaikan upah minimum yang fanstatis ini di sebabkan oleh penetapan upah minimum selama ini (2009 – 2012) dilandasi keputusan nilai tengah antara usulan upah minimum buruh dan pengusaha, sehingga nilai upah minimum yang ditetapkan tidak pernah mencapai 100% KHL. Selain itu juga disebabkan oleh aksi unjuk rasa yang dilakukan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).⁷

Data yang diperoleh dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan bahwa dari 941 perusahaan yang meminta penangguhan upah minimum 2013, hanya 498 yang disetujui oleh dinas tenaga kerja di daerah. Adapun jumlah buruh yang terkena dampak akibat putusan ini diperkirakan antara 300.000-400.000 orang.⁸

Tabel 1.2

Matrik Ijin Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013

NO	PROPINSI	Perusahaan Yang Mengajukan Penangguhan	Jumlah TK Yang Diajukan Penangguhan	KEPUTUSAN		KETERANGAN
				DISETUJUI	DITOLAK	
1	PAPUA BARAT	1	1.225	1	-	SK Gub
2	JAWA TIMUR	96	22.120	24	11	- 56 tidak dapat Di proses karena tidak menyertai kelengkapan -5 mencabut permohonan
3	JAWA TENGAH	25	17.898	2	21	- Ditolak karena tidak melengkapi persyaratan - 2 : mencabut permohonan krn menyatakan sanggup membayar UM
4	DKI JAKARTA	345	182.858	- 13 (SK Gubernur) - 7 (Dalam proses utk diijinkan) - 44 (SK Dinas)	- 1 (Dalam proses ditolak) - 20 (SK Dinas)	260: Tidak dapat diproses karena tidak disertai berkas
5	YOGYAKARTA	7	2.871	6	1	Persyaratan tidak lengkap
6	BANTEN	177	144.394	144	33	Ditolak karena tidak melengkapi persyaratan - 6 mencabut permohonan - 8 tidak dapat diproses karena pengajuan berkas melewati batas waktu
7	JAWA BARAT	298	234.298	257	26	
	TOTAL	949	641.270	498	113	338*)

Sumber : Dirjen PHI dan Jamsostek

⁷Kebijakan Upah Minimum Indonesia (www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed.../wcms_210427.pdf)

⁸Ibid.,

Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu wilayah akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada. Sebanyak 3,2 juta orang kehilangan pekerjaan sepanjang Februari-Agustus 2013. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menyatakan, penyebab utama dari pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut disebabkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh pelosok Indonesia.⁹ Sependapat dengan Suryamin, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alishjabana mengatakan, bertambahnya pengangguran adalah karena kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang tinggi tahun ini.¹⁰ Kondisi tersebut menjadi tekanan pada industri, sehingga memaksa terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurut Armida Alishjabana

Tekanan industri padat pekerja ditambah kenaikan UMP yang relatif tinggi antara tahun 2012-2013 menyebabkan sebagian besar perusahaan memilih mengurangi karyawan dan mengganti sistem produksi dengan otomasisasi.” Kenaikan UMP menurut Armida jauh di atas inflasi dan kebutuhan hidup layak (KHL) tahun 2012. Rata-rata UMP per daerah naik 43% tahun ini. "Jadi sangat tinggi dibandingkan dengan inflasi dan KHL yang merupakan indikator."

Upah nominal rata-rata tertinggi bagi pekerja terdapat di sektor pertambangan dan penggalian, diikuti oleh sektor keuangan dan perbankan, serta upah terendah terdapat di sektor pertanian.¹¹ Upah minimum nominal rata-rata sederhana untuk Indonesia diperkirakan sebesar Rp 1.288.242 pada tahun 2013, meningkat 14,87 persen dari tahun 2012. Namun, tingkat inflasi yang tinggi pada tahun 2013 telah dikaitkan dengan kerugian nyata untuk pertumbuhan upah

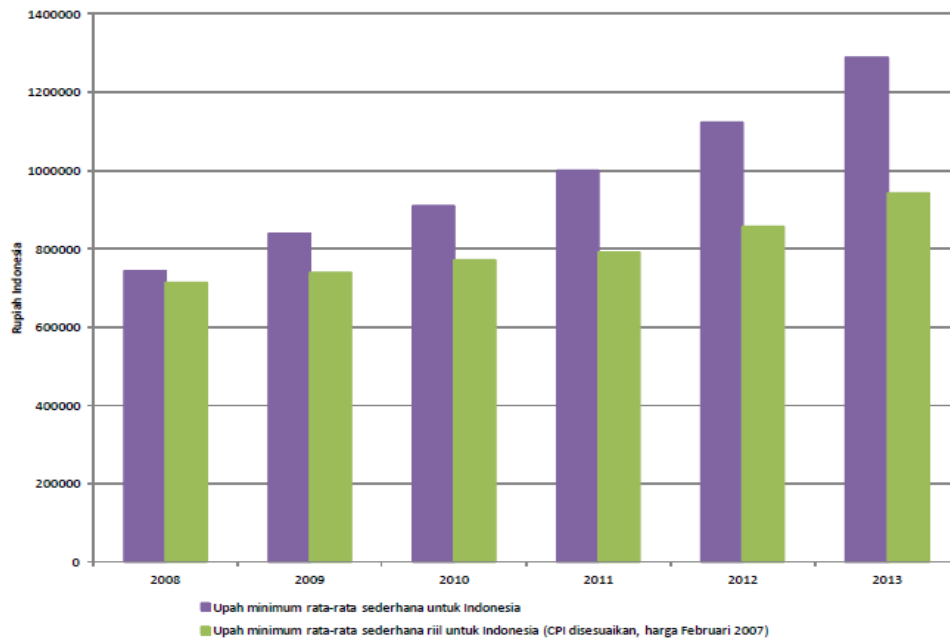
⁹<http://bisnis.liputan6.com/read/739003/32-juta-orang-jadi-pengangguran-gara-gara-upah-naik#sthash.Z5jV1Djf.dpuf>

¹⁰<http://finance.detik.com/read/2013/11/07/162508/2406507/4/jumlah-pengangguran-naik-pemerintah-sebut-karena-ump-tinggi>

¹¹ILO

minimum. Analisis tingkat pertumbuhan upah minimum menunjukkan bahwa meskipun upah minimum telah meningkat secara substansial secara nominal, inflasi telah mengikis sebagian keuntungan tersebut.

Gambar 1.2
Tingkat Pertumbuhan Upah Nominal dan Upah Riil Tahun 2008-2013



Sumber : BPS, data diolah

Terjadi peningkatan yang signifikan dalam upah minimum di akhir tahun 2012 di beberapa provinsi terpilih di seluruh Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor terhadap stabilitas harga tetap untuk melakukan bisnis di Indonesia dan menyebabkan beberapa investor mempertimbangkan relokasi perusahaan dan pilihan melepaskan pekerjaan. Pengusaha telah menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum lebih besar dari peningkatan produktivitas, dan ini dapat berakibat pada penurunan daya saing dan berdampak pada kelangsungan bisnis.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi besarnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja dengan kata lain akan membawa pengaruh pada tingginya tingkat pengangguran yang terjadi.¹² Hal ini bisa terjadi karena dengan semakin tinggi upah yang ditetapkan akan berpengaruh pada peningkatan biaya *output* yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Akibatnya suatu perusahaan akan melakukan efisiensi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerjanya.

Faktor lain yang menimbulkan pengangguran, antara lain : adanya rakyat yang menganggur karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, ketidaksesuaian diantara keterampilan yang diperlukan dalam industri, serta adanya hambatan bertemunya pencari kerja dan lowongan kerja yang tersedia.¹³ Selain itu faktor alamiah juga ikut berperan atas timbulnya pengangguran yaitu : laju pertumbuhan penduduk dan pengaruh musim.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan masalah dalam bentuk pernyataan sebagai berikut :

1. Permintaan agregat yang rendah menimbulkan masalah pengangguran
2. Tingkat inflasi yang tinggi merupakan permasalahan yang akan menghambat pembangunan sehingga menimbulkan pengangguran

¹² Kaufman, Bruce E and Julie L Hotchkiss, The Economic Labor Markets. USA: Georgia State University, 1999, p.323

¹³ Sadono Sukirno., Ooc.cit., p. 13

3. Kecenderungan berinvestasi ke dalam barang dan portofolio akan mengurangi penyerapan tenaga kerja
4. Tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi kegairahan penanaman modal untuk mengembangkan sektor-sektor produktif
5. Peningkatan dalam mengkonsumsi barang-barang impor akan menimbulkan lebih banyak pengangguran
6. Peningkatan upah minimum dapat menimbulkan masalah pengangguran
7. Faktor alamiah pertumbuhan penduduk dan musim akan menimbulkan masalah pengangguran
8. Penggunaan peralatan produksi modern akan mengurangi penggunaan tenaga kerja
9. Ketidak sesuaian antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri akan menimbulkan pengangguran
10. Adanya hambatan informasi antara pencari kerja dengan lowongan kerja yang ditawarkan akan menimbulkan pengangguran.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dilakukan, ternyata masalah pengangguran menyangkut aspek, dimensi, dan faktor-faktor permasalahan yang luas, serta sifatnya yang kompleks. Karena adanya keterbatasan yang dimiliki peneliti, maka peneliti membatasi masalah yang

diteliti hanya pada masalah “Pengaruh tingkat inflasi dan upah minimum terhadap pengangguran di Indonesia.”

D. Perumusan Masalah

Dalam kaitannya dengan pembatasan masalah tersebut, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat inflasi terhadap pengangguran di Indonesia
2. Apakah terdapat pengaruh antara upah minimum terhadap pengangguran di Indonesia
3. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat inflasi, dan upah minimum terhadap pengangguran di Indonesia

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru, menambah wawasan berpikir serta peningkatan intelektualitas baik bagi peneliti pribadi maupun bagi pembaca sekalian terutama tentang pengaruh tingkat inflasi dan upah minimum terhadap pengangguran di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengaruh tingkat inflasi dan upah minimum terhadap pengangguran di Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Permintaan Tenaga Kerja

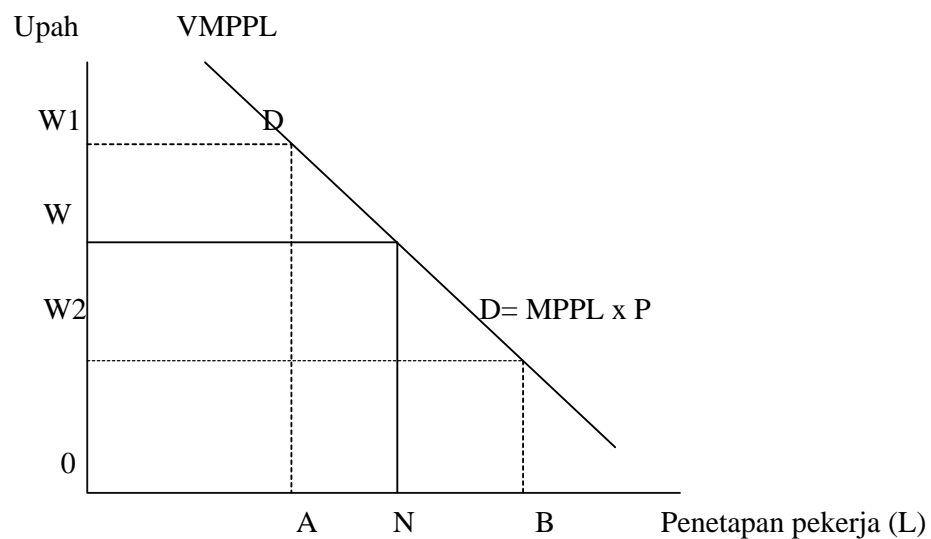
Permintaan adalah jumlah suatu komoditi yang bersedia dibeli individu selama periode waktu tertentu yang besarnya dipengaruhi oleh harga komoditi itu, pendapatan nasional, harga komoditi lain dan citarasa. Sebuah kurva permintaan tenaga kerja menggambarkan kuantitas maksimal pekerja yang akan dipekerjakan pada suatu waktu tertentu pada berbagai tingkat upah. Dengan kata lain, permintaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai berbagai kemungkinan jumlah tenaga kerja yang diminta pengusaha dalam berbagai tingkat upah. Permintaan pengusaha akan tenaga kerja disebabkan karena pengusaha mempekerjakan atau menggunakan tenaga kerja tersebut untuk membantu memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada masyarakat. Sebuah kurva permintaan tenaga kerja menggambarkan kuantitas maksimal pekerja yang akan dipekerjakan pada suatu waktu tertentu pada berbagai tingkat upah.

Dengan kata lain, permintaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai berbagai kemungkinan jumlah tenaga kerja yang diminta pengusaha dalam berbagai tingkat upah. Permintaan pengusaha akan tenaga kerja disebabkan karena pengusaha mempekerjakan atau menggunakan tenaga

kerja tersebut untuk membantu memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada masyarakat.

Gambar 2.1

Kurva Permintaan Terhadap Tenaga Kerja



Sumber : Payaman J. Simanjuntak

Keterangan:

MR : *Marginal revenue*, penerimaan marjinal

VMPPPL : *Value marginal physical product of labor*, nilai pertambahan hasil marjinal dari karyawan

MPPL : *Marginal physical product of labor*

P : Harga jual barang yang diproduksi per unit

Gambar 2.1 mengilustrasikan mengenai kurva permintaan tenaga kerja. Pengusaha memiliki karyawan sebanyak 99 orang. Pengusaha akan mempertimbangkan apakah perlu menambah jumlah karyawan menjadi 100 atau menguranginya menjadi 98. Dasar yang digunakan pengusaha untuk

menambah jumlah karyawan atau mengurangnya adalah pengusaha akan menghitung jumlah uang yang akan diperoleh pengusaha dengan tambahan hasil marjinal tersebut.

Jumlah uang ini dinamakan penerimaan marjinal atau *marginal revenue*, yaitu nilai dari MPPL dikalikan dengan harga per unit (P). Akhirnya sang pengusaha membandingkan MR tersebut dengan biaya mempekerjakan tambahan seorang karyawan tadi. Jumlah biaya yang dikeluarkan pengusaha sehubungan dengan mempekerjakan tambahan seorang karyawan adalah upahnya sendiri (W) dan dinamakan *biaya marjinal* atau *marginal cost*. Bila tambahan penerimaan marjinal (MR) lebih besar dari biaya mempekerjakan orang yang menghasilkannya (W), maka mempekerjakan tambahan orang tersebut akan menambah keuntungan pengusaha.

Dengan kata lain dalam rangka menambah keuntungan, pengusaha akan terus menambah jumlah karyawan selama MR lebih besar dari W. Pada titik N pengusaha mendapat keuntungan. Contoh bila tenaga kerja terus ditambah sedangkan alat-alat dan faktor produksi lain jumlahnya tetap, maka perbandingan alat-alat produksi untuk setiap pekerja menjadi lebih kecil dan tambahan hasil marjinal menjadi lebih kecil pula. Dengan kata lain, semakin bertambah karyawan yang dipekerjakan, semakin kecil MPPL-nya dan nilai MPPL itu sendiri. Ini yang dinamakan *hukum diminishing returns* dan dilukiskan dengan garis DD.

Permintaan dalam tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh dua faktor penting. Pertama, permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh pertumbuhan dalam jumlah total pekerjaan yang tersedia. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang tersedia maka permintaan tenaga kerja akan semakin meningkat. Kedua, permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang tersedia dalam suatu perekonomian. Permintaan tenaga kerja di sektor industri, misalnya akan mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan yang terjadi dalam produksi barang dan jasa pada sektor perindustrian suatu negara.

2. Penawaran Tenaga Kerja

Menurut Dominic Salvatore, penawaran adalah jumlah komoditi yang bersedia ditawarkan oleh produsen selama periode waktu tertentu dan dipengaruhi oleh harga komoditi itu dan biaya produksi yang dikeluarkan.¹³ Sedangkan menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus penawaran tenaga kerja menunjukkan jumlah jam yang digunakan pada kegiatan untuk menghasilkan sesuatu di pabrik-pabrik, pertanian, bisnis lain, pemerintah, atau usaha nirlaba.¹⁴

Determinan utama penawaran tenaga kerja adalah jumlah penduduk dan cara penduduk menggunakan waktunya. Sebuah kurva penawaran tenaga kerja menggambarkan kombinasi terhadap kuantitas tenaga kerja yang ditawarkan dengan kombinasi tingkat upah tertentu.

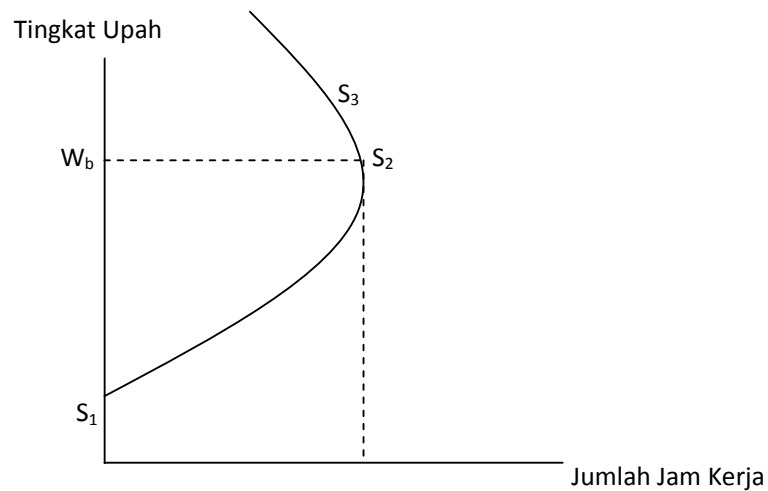
¹³ Dominic, Salvatore, Mikroekonomi, Edisi Kelima, Jakarta: Erlangga, 1997, p. 143

¹⁴ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, Makro Ekonomi, Edisi Tujuh Belas, Jakarta : PT. Media Global Edukasi, 2004, p.254

Dengan kata lain, kurva penawaran tenaga kerja merupakan kombinasi dari berbagai kemungkinan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan pada berbagai tingkat upah tertentu yang berlaku.

Gambar 2.2

Kurva Penawaran Tenaga Kerja



Sumber : Payaman J. Simanjuntak, 2001

Keterangan :

W_b : Tingkat upah pada harga tertentu

S_1 : Tingkat upah awal

S_2 : Titik potong

S_3 : Titik balik

D : Jumlah jam kerja seseorang pada waktu tertentu

Gambar 2.2 mengilustrasikan mengenai kurva penawaran tenaga kerja. Kurva tersebut menggambarkan mengenai hubungan antara besarnya tingkat upah dengan jumlah jam kerja. Kurva penawaran tenaga kerja memiliki kemiringan (*slope*) yang positif. Artinya bahwa semakin tinggi upah yang ditawarkan maka akan terjadi peningkatan terhadap

jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Pada tingkat upah tertentu penyediaan waktu untuk bekerja seseorang bertambah bila tingkat upah bertambah (titik S_1S_2). Setelah mencapai upah tertentu (titik W_b), pertambahan upah yang semakin tinggi, jumlah jam kerja cenderung mengalami penurunan, disebut juga *backward bending supply curve*. Hal ini disebabkan karena adanya efek pendapatan yang mengalahkan efek substitusi. Dengan pendapatan yang lebih besar, seseorang akan cenderung lebih santai walaupun setiap jam kerja yang digunakan untuk bersenang-senang sebenarnya merupakan kerugian karena kehilangan pendapatan yang tinggi. Kondisi ini mulai terjadi pada titik $S_2 S_3$ pada gambar. Titik S_2 disebut titik belok dan titik W_b disebut tingkat upah dimana kurva penawaran membelok. Tenaga kerja merupakan faktor input bagi produksi barang dan jasa, oleh karena itu, kualitas dan kuantitas dari tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam tingkat produksi dan tingkat pertumbuhan perekonomian Negara. Kuantitas dari penawaran tenaga kerja sangat tergantung pada, misalnya besarnya populasi penduduk suatu wilayah, proporsi dari jumlah penduduk yang ingin bekerja dan jumlah jam kerja per tahun. Sedangkan kualitas dari penawaran tenaga kerja sangat tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, keterampilan, dan kondisi kesehatan dari angkatan kerja.

Terdapat tren perubahan yang terjadi dalam penawaran tenaga kerja dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dilihat dari tiga dimensi yang berbeda. Pertama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu

menggambarkan sebagian dari populasi penduduk yang ada dan berusia lebih dari 16 tahun yang sedang bekerja atau sedang mencari kerja. Kedua, adanya proporsi yang sangat kecil (cenderung berkurang) pada pria dalam angkatan kerja saat ini, yang digantikan dengan jumlah proporsi yang cukup besar bagi angkatan kerja wanita. Ketiga, adanya peningkatan yang sangat cepat dalam tingkat pendidikan yang dimiliki tenaga kerja.

3. Keseimbangan Tenaga Kerja

Keseimbangan (*equilibrium*) merupakan suatu kondisi pasar yang ingin sekali dicapai, cenderung untuk bertahan. Hal ini dapat terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pada pasar tenaga kerja, keseimbangan pasar akan tercapai apabila terjadi suatu keadaan dimana jumlah tenaga kerja yang diminta sama dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dan jumlah upah yang diminta sama dengan jumlah upah yang ditawarkan.

Menurut Kaufman dan Hotchkiss keseimbangan pada pasar tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh proses yang terjadi di dalam pasar tenaga kerja. Proses tersebut dipengaruhi oleh tiga kekuatan, antara lain:

a. Kekuatan Pasar

Proses yang digunakan untuk mempengaruhi harga dan alokasi tenaga kerja adalah kekuatan pasar pada penawaran dan permintaan dalam proses tenaga kerja. Pada sisi permintaan, pasar tenaga kerja adalah perusahaan-perusahaan dan berbagai perusahaan non-profit seperti pemerintah. Permintaan tenaga kerja merupakan *derived demand* yaitu turunan dari permintaan pada barang/jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Dari sisi penawaran, pasar tenaga kerja menunjukkan sejumlah orang yang bekerja atau sedang mencari kerja. Penawaran tenaga kerja merupakan fungsi turunan dari permintaan individu atau

rumah tangga pada pendapatan untuk menghasilkan barang / jasa yang diproduksi oleh perusahaan.

b. Kekuatan Internasional

Faktor kedua yang mempengaruhi pasar tenaga kerja adalah kekuatan institusional atau kelembagaan. Kekuatan institusional (ini menggambarkan pengaruh pada berbagai organisasi seperti serikat, pemerintahan dan sebuah korporasi pada penetapan harga tenaga kerja serta distribusi tenaga kerja.

c. Kekuatan Sosiologis

Faktor ketiga yang mempengaruhi hasil pasar tenaga kerja adalah kekuatan sosiologis, yang menggambarkan adanya pengaruh pada kelompok sosial dan nilai-nilainya pada penetapan tingkat upah dan alokasi tenaga kerja. Faktor penting lainnya seperti latar belakang keluarga, budaya, diskriminasi dan kebiasaan juga sangat mempengaruhi.¹⁵

4. Pengangguran

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk mengakibatkan jumlah angkatan kerja semakin meningkat pula. Dilihat dari pertumbuhan kesempatan kerja dari pertumbuhan angkatan kerja, hal ini mengakibatkan ada sebagian angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Semakin tinggi penduduk yang tidak memperoleh pekerjaan, semakin tinggi pula tingkat pengangguran yang tinggi.

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran pada prinsipnya menimbulkan kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja dan merupakan suatu pemborosan sumber daya

¹⁵Kaufman, Bruce E, dan Julie L. Hotchkiss, The Economics of Labour Market, Fifth Edition, USA : Georgia State University, 1999, p. 231

ekonomi, karena dengan adanya pengangguran akan mengacu pengeluaran pemerintah lebih tinggi untuk keperluan kompensasi pengangguran dan kesejahteraan. Hal ini terutama terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dimana negara atau pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menyediakan tunjangan bagi para penganggur. Sedangkan definisi dari pengangguran yang dikemukakan oleh Sadono Sukirno adalah “Suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya”.¹⁶

Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. “Pengangguran adalah suatu kondisi dimana orang tidak dapat bekerja, karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan”.¹⁷ Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang akan mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja.

Menurut Samuelson dan Nordhaus, “dalam kelompok ini (pengangguran), termasuk orang-orang yang tidak bekerja akan tetapi

¹⁶Sadono Sukirno, Op.cit., p. 13

¹⁷Limongan, Op.cit.,

secara aktif atau sedang dalam usaha mencari pekerjaan atau menunggu kesempatan bekerja kembali.”¹⁸ Senada dengan Samuelson dan Nordhaus, menurut Imamul Arifin, dan Giana Hadi W dalam bukunya Membuka Cakrawala Ekonomi, pengangguran dapat diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Pengangguran yang termasuk ke dalam kriteria mencari pekerjaan adalah penduduk usia kerja yang belum pernah bekerja serta sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, atau sudah pernah bekerja namun karena sesuatu hal berhenti/diberhentikan kemudian berusaha kembali untuk memperoleh pekerjaan.¹⁹

Sedangkan menurut Muana Nanga, pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan.²⁰ Seseorang yang siap dalam mencari pekerjaan adalah seseorang yang telah memasuki usia produktif dan jika masih sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya dikategorikan sebagai pengangguran. Badan Pusat Statistik mengeluarkan pengertian bahwa “orang yang telah masuk dalam dunia kerja 15 tahun ke atas, namun tidak mempunyai pekerjaan tetap dikatakan sebagai pengangguran”.²¹ Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari

¹⁸Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, Op.cit, p.362

¹⁹Imamul Arifin, dan Giana Hadi W, Membuka Cakrawala Ekonomi, Jakarta : PT. Grafindo Media Pratama, p. 4

²⁰Muana Nanga, Makro Ekonomi : Teori, Masalah, dan Kebijakan, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005, p. 249

²¹Reviandi, Pengangguran di Sumbar Turun 1,56 Persen, 2008 (<http://www.google.com>)

selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.²²

Berdasarkan beberapa pengertian dari pengangguran yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang dalam usia angkatan kerja yaitu dari usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun yang belum mendapatkan pekerjaan ataupun sedang aktif mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang berupaya mencari pekerjaan.

Dilihat dari sebab-sebab timbulnya, pengangguran dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut :

1. Pengangguran Friksional atau Transisi
Jenis pengangguran yang timbul sebagai akibat dari adanya perubahan di dalam syarat-syarat kerja, yang terjadi seiring dengan perkembangan atau dinamika ekonomi yang terjadi. Jenis pengangguran ini dapat pula terjadi kaena berpindahannya orang-orang dari satu daerah ke daerah lain , atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, atau melalui berbagai tingkat siklus kehidupan yang berbeda.
2. Pengangguran Struktural
Jenis pengangguran yang terjadi sebagai akibat adanya perubahan di dalam struktur pasar tenaga kerja yang menyebabkan terjadinta ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ketidakseimbangan di dalam pasar tenaga kerja yang terrjadi antara lain karena adanya peningkatan permintaan atas satu jenis pekerjaan, sementara jenis pekerjaan lainnya permintaan mengalami penurunan dan penawaran itu sendiri tidak dapat melakukan penyesuaian dengan cepat terhadap situasi tersebut
3. Pengangguran Siklis
Jenis pengangguran yang terjadi sebagai akibat dari merosotnya kegiatan ekonomi atau karena terlampau kecilnya

²²<http://id.wikipedia.org/wiki/Pengangguran>

permintaan agregat (AD) di dalam perekonomian dibandingkan dengan penawaran agregat (AS).

4. Pengangguran Alamiah

Tingkat pengangguran yang terjadi pada kesempatan kerja penuh, atau tingkat pengangguran dimana inflasi yang diharapkan sama dengan tingkat inflasi aktual. Milton Friedman mendefinisikan tingkat pengangguran alamiah sebagai tingkat pengangguran dimana tekanan ke atas (*upward pressure*) dan tekanan kebawah (*downward pressure*) terhadap inflasi harga dan upah berada dalam keseimbangan. Pada tingkat alamiah, inflasi adalah stabil, artinya tanpa kecenderungan untuk menampilkan percepatan ataupun penurunan inflasi.²³

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terlepas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan.

BPS mencirikan klasifikasi kelompok yang masuk ke dalam pengangguran terbuka, terdiri dari :

1. Mereka yang mencari pekerjaan
2. Mereka yang mempersiapkan usaha
3. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja²⁴

Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai pengangguran terbuka”.²⁵

Sedangkan Edward menyatakan bahwa “pengangguran terbuka yakni

²³Muana Nanga, Op. Cit., p.249-253

²⁴Ibid., p.16

²⁵Badan Pusat Statistik, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Jakarta : Badan Pusat statistik, 2008, p.15

orang-orang yang benar tidak bekerja baik secara sukarela maupun dipaksa”.²⁶

Tingginya tingkat pengangguran dapat diketahui melalui tingkat penganggurannya. Menurut Badan Pusat Statistik bahwa tingkat pengangguran terbuka adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan, dapat dihitung sebagai berikut:²⁷

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Yang Menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

“Dalam prakteknya suatu negara dianggap sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) apabila dalam perekonomian tingkat penganggurannya adalah kurang dari 4 persen.”²⁸

Pengangguran yang terjadi di dalam suatu perekonomian dapat membawa dampak atau akibat buruk baik terhadap perekonomian maupun individu dan masyarakat.

Sejak dibahas oleh Profesor A.W Philips pada tahun 1958, hubungan antara inflasi dan pengangguran menjadi salah satu tema sentral ekonomi makro. Hasil penelitian Profesor Philips tentang perekonomian Inggris periode 1861-1957 menyimpulkan bahwa :

²⁶Subchan, “Dampak Krisis Moneter Terhadap Masalah Pengangguran Di Indonesia dan Kebijakan Alternatif Mengatasinya”, Jurnal Ekonomi Manajem dan Akuntansi, Vol. 5 No. 7 mei 1998, p. 67

²⁷Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

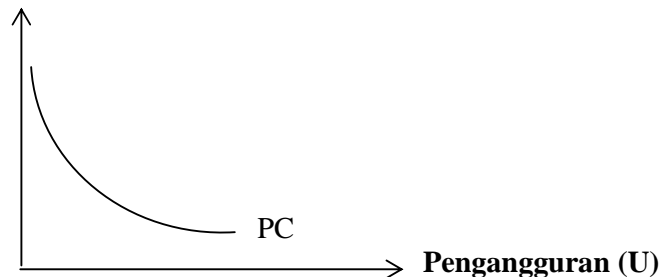
²⁸Sadono Sukirno, op.cit., p. 19

- a. Terdapat hubungan yang negatif antara tingkat pertumbuhan upah nominal (money wages) (ΔW) dan tingkat pengangguran (U) untuk kurun waktu 1861-1913, dan
- b. Hubungan diantara kedua peubah tersebut terlihat stabil ketika diterapkan pada data untuk kurun waktu 1913-1957 sebagai suatu keseluruhan, dan data untuk kurun waktu 1948-1957.²⁹

Secara grafik kurva philips yang asli (original Philips curve), dapat dijelaskan dengan menggunakan gambar

Gambar 2.1
Original Philips Curve

Tingkat Upah Nominal (ΔW)



Dari kurva Philips di atas menunjukkan adanya hubungan negatif dan non linear antara kenaikan tingkat upah/inflasi upah (*wage inflation*) dengan pengangguran (*unemployment*).³⁰ Atau lebih jelasnya Kurva Philips menjelaskan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah nominal. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin rendah tingkat kenaikan upah. Dengan kata lain, terdapat *trade off* antara kenaikan upah dan pengangguran.³¹

²⁹Ibid, p.256

³⁰Prathama Raharja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, p. 175

³¹Rudiger D, Stanle F, dan Richard S, makro Ekonomi Edisi 8, Jakarta : PT. Media Global Edukasi, 2004, p. 105

Meski kurva Philips sendiri menghubungkan tingkat kenaikan upah atau inflasi upah terhadap pengangguran, istilah “kurva philips” secara gradual akhirnya digunakan untuk menjelaskan baik kurva philips asli maupun kurva yang menghubungkan tingkat kenaikan harga, tingkat inflasi, dengan tingkat pengangguran.³² Kurva Philips menunjukkan bahwa kenaikan tingkat upah menurun seiring dengan kenaikan tingkat pengangguran. Jadikan W_t adalah upah periode sekarang dan W_{t+1} adalah upah periode berikutnya, maka tingkat kenaikan upah adalah g_w didefinisikan sebagai persamaan kesatu :

$$g_w = \frac{W_{t+1} - W_t}{W_t} \quad \text{----- (2.1)}$$

Dengan u^* merepresentasikan tingkat pengangguran alamiah, kita dapat menyusun kurva Philips sederhana sebagai persamaan kedua :

$$g_w = -\epsilon (u - u^*) \quad \text{----- (2.2)}$$

Keterangan : ϵ merupakan tingkat responsifitas dari upah terhadap pengangguran. Persamaan ini menyatakan bahwa upah akan menurun bila angka pengangguran melebihi angka alamiahnya, yaitu ketika $u > u^*$, dan upah akan naik ketika tingkat pengangguran lebih kecil dibanding tingkat alamiahnya.

³²Ibid, p. 106

Kurva Philips dengan cepat menjadi fondasi dari analisa kebijakan makroekonomi. Kurva Philips menyarankan bahwa pembuat kebijakan dapat memilih kombinasi yang berbeda-beda antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Misalnya mereka dapat saja memilih tingkat pengangguran yang rendah dengan resiko tingkat pengangguran yang tinggi. Hubungan kurva Philips yang sederhana berubah setelah tahun 1960-an, baik di Inggris maupun di Amerika Serikat. Data untuk tahun 1970-an dan 1980-an tidak lagi cocok dengan cerita kurva Philips yang sederhana. Ada yang hilang dari kurva Philips sederhana, sesuatu itu adalah ekspektasi atau antisipasi inflasi.

Ketika pekerja dan perusahaan berunding mengenai upah, mereka mempertimbangkan nilai riil dari upah, sehingga kedua pihak ingin menyesuaikan tingkat upah nominal dengan ekspektasi inflasi selama kontrak berlaku. Pengangguran tidak tergantung pada tingkat inflasi, tetapi lebih kepada selisih inflasi yang melebihi dari apa yang diperkirakan. Sedikit pemikiran mengilustrasikan masalah ini. Anggap pada tahun pertama majikan buruh mengumumkan kenaikan 3 persen untuk para buruh. Memang tidak besar, namun kenaikan 3 persen kelihatan baik, dan para buruh menerima dengan senang hati.

Sekarang anggap inflasi telah berjalan sebesar 10 persen per tahun dan diramalkan akan terus berlanjut pada tingkat ini. Dari ilustrasi ini dapat di pahami bahwa jika biaya hidup naik 10 persen sementara upah nominal hanya naik 3 persen, berarti standar hidup sebenarnya turun

sebesar 7 persen. Dengan kata lain, berarti kita peduli tentang kenaikan upah setelah memperhitungkan ekspektasi inflasi. Kita dapat menulis kembali persamaan, kurva philips upah inflasi yang asli untuk menunjukkan bahwa kelebihan kenaikan upah terhadap ekspektasi inflasi lah yang menjadi persoalan :

$$(g_w - \pi^e) = -\epsilon (u - u^*) \text{ -----}(2.3)$$

Keterangan : π^e merupakan tingkat ekspektasi inflasi harga.

Dalam teori penawaran neoklasik, upah menyesuaikan diri secara seketika untuk menjamin output untuk selalu berada pada kondisi full employment. Tetapi output tidak selalu pada tingkat full employment, dan kurva Philips menyatakan bahwa upah menyesuaikan diri dengan lamban sebagai respon terhadap perubahan dalam pengangguran. Upah tidak fleksibel atau penyesuaian upah terjadi perlahan-lahan, ketika upah bergerak secara lamban sepanjang waktu, upah akan fleksibel dengan cepat dan penuh, sedemikian rupa untuk menjamin full employment selalu terjadi setiap saat.”³³

Untuk menjernihkan asumsi yang kita buat tentang kekakuan upah, kita ubah kurva Philips dalam persamaan keempat ke dalam hubungan antara tingkat perubahan upah, g_w , dengan tingkat pengangguran. Dilambangkan tingkat full employment tenaga kerja dengan N^* dan

³³Ibid.,

tingkat tenaga kerja aktual dengan N . Kemudian mendefinisikan tingkat pengangguran sebagai bagian dari full employment angkatan kerja, N^* yang tidak terserap pasar kerja :

$$u - u^* = \frac{N^* - N}{N^*} \quad \text{-----}(2.4)\text{---}$$

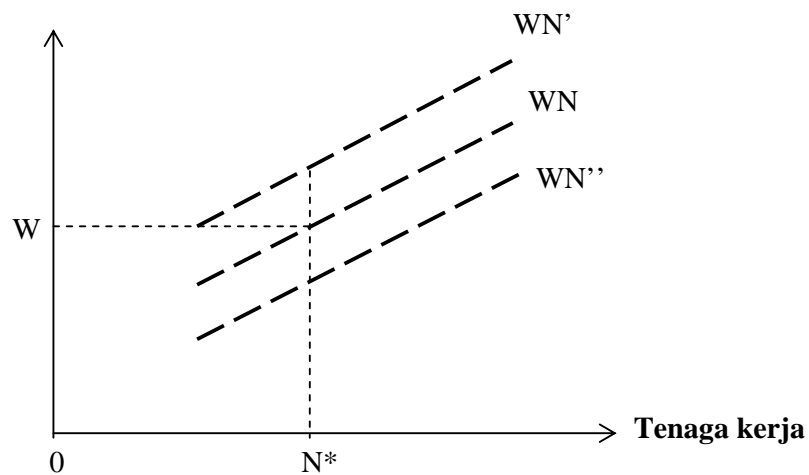
Dengan mensubsitusikan persamaan diatas ke dalam persamaa 4, kita dapat hubungkan kurva Philips antara tingkat tenaga kerja, ekspektasi inflasi, dan tingkat perubahan upah :

$$g_w - \pi^e = \frac{w_{t+1} - w_t}{w_t} - \pi^e = -\epsilon \left[\frac{N^* - N}{N^*} \right] \quad \text{-----}(2.5)\text{---}$$

Gambar 2.2

Hubungan Upah dan Tenaga Kerja

Tingkat Upah



Persamaan diatas merupakan hubungan upah-tenaga kerja, WN, yang diilustrasikan dalam Gambar 2.2. Upah periode selanjutnya sama dengan upah yang berlaku pada periode sekarang, namun dengan penyesuaian tingkat tenaga kerja dan ekspektasi inflasi. Pada saat full employment ($N = N^*$), upah periode berikutnya sama dengan periode sekarang ditambah penyesuaian ekspektasi inflasi. Jika tenaga kerja berada di atas tingkat full employment upah periode berikutnya akan naik melebihi upah periode sekarang ditambah penyesuaian ekspektasi inflasi. Jika tenaga kerja berada di atas tingkat full employment, upah periode berikutnya akan naik melebihi upah periode sekarang, tingkat perubahan upah sebagai respon terhadap perubahan tenaga kerja tergantung pada parameter. Jika besar, maka pengangguran akan mempunyai pengaruh besar terhadap upah dan garis WN akan curam.

Hubungan kurva philips juga memiliki implikasi bahwa hubungan WN akan bergeser sepanjang waktu, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.2. Jika terdapat kelebihan tenaga kerja pada periode ini, kurva WN periode berikutnya akan bergeser ke bawah ke WN''. Oleh karenanya, perubahan dalam permintaan agregat yang merubah tingkat pengangguran periode ini akan memiliki pengaruh terhadap upah dalam periode berikutnya. Penyesuaian terhadap perubahan tenaga kerja bersifat dinamis, karenanya berlansung sepanjang waktu.

Profesor Pigou juga mengungkapkan berdasarkan asumsinya, “bahwa setiap kenaikan biaya hidup, berapa pun kecilnya berkaitan

dengan upah uang akan mengakibatkan mundurnya dari pasar tenaga kerja sejumlah pekerja sebanyak lebih besar daripada semua orang pengangguran yang ada.”³⁴

Maksud dari asumsi Profesor Pigou adalah kenaikan akan biaya hidup ditimbulkan karena kenaikan inflasi. Dengan kenaikan inflasi tersebut mendorong para pekerja menuntut kenaikan upah atau gaji. Akibatnya keuntungan perusahaan merosot dan ada yang menderita rugi. Maka sebagai akibat tuntutan kenaikan upah dan gaji serta kerugian yang ditimbulkannya, para pengusaha mengurangi pemakaian jumlah tenaga kerja dan pengangguran meningkat kembali.

Upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran yang lebih rendah maka dijalankanlah kebijakan fiskal dan moneter.³⁵ Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik (pertumbuhan ekonomi meningkat) atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran negara. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau

³⁴Prof. Dr. Willem H. Makaliwe, Teori Umum Mengenai Kesempatan Kerja, Bunga, dan Uang, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1992, hal. 261

³⁵Imamul Arifin, Membuka Cakrawala Ekonomi Untuk Kelas X SMA dan MA, Bandung : PT. Setia Purna Inves, 2007, p. 85

dinginkan dengan mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga melalui pasar uang.

2. Tingkat Inflasi

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai di hampir semua negara di dunia adalah Inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan bilamana suatu perekonomian berusaha mencapai tingkat perkembangan yang lebih cepat atau tinggi dari tingkat pertumbuhan yang dibutuhkan. Inflasi dapat juga terjadi apabila ada permintaan yang sangat besar terhadap barang-barang dan jasa yang naik lebih cepat dari pertambahan output yang mungkin dicapai perekonomian tersebut sehingga harga-harga secara umum mengalami kenaikan.

Boediono menyatakan bahwa definisi singkat dari inflasi adalah “kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus.”³⁶ Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Kenaikan harga-harga karena musiman, menjelang hari-hari besar, atau yang terjadi sekali saja (dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan) tidak disebut inflasi. Kenaikan harga semacam ini tidak dianggap sebagai masalah atau “penyakit” ekonomi dan tidak memerlukan kebijaksanaan khusus untuk menanggulangnya.

³⁶Boediono, *Ekonomi Moneter Edisi Tiga*, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2005, p. 161

Menurut Nasution, “inflasi adalah suatu proses ketidakseimbangan (disequilibrium) yang dinamis, yaitu tingkat harga yang terus menerus mengalami kenaikan selama periode tertentu”.³⁷ Menurut Sadono Sukirno menyatakan bahwa inflasi dapat didefinisikan “sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian”. Sedangkan tingkat inflasi adalah persentasi kenaikan harga-harga barang dalam periode waktu tertentu.³⁸ Menurut Samuelson dan Nordhaus “inflasi terjadi ketika tingkat harga umum naik.”³⁹ Nopirin menjelaskan bahwa, “Inflasi adalah proses kenaikan harga –harga umum barang- barang secara terus-menerus.”⁴⁰

Dari beberapa pernyataan diatas, didapat bahwa kenaikan harga yang terjadi tidak hanya pada satu jenis barang tertentu saja dan tidak berlangsung pada jangka waktu yang pendek. Terdapatnya tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi yaitu :

1. Kenaikan Harga
Harga suatu komoditi dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi dari pada harga periode sebelumnya.
2. Bersifat Umum
Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik. Misalnya : harga bahan bakar naik, maka harga komoditas lain akan naik.
3. Berlangsung Terus Menerus
Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum memunculkan inflasi jika terjadinya hanya sesaat. Perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal sebulan, sebab dalam

³⁷Muliana, Nasution, op.cit., p. 232

³⁸Sadono Sukirno, op.cit., p. 14

³⁹Samuelson dan Nordhaus, op.cit., p. 381

⁴⁰Nopirin, Ekonomi Moneter Edisi Pertama, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2009, p. 25

sebulan akan terlihat apakah keadaan harga bersifat umum dan terus menerus.⁴¹

Berdasarkan beberapa pengertian dari inflasi yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga barang umum secara terus menerus dalam suatu perekonomian selama periode tertentu.

Terjadinya inflasi dalam sebuah perekonomian pada garis besarnya dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu :

1. Demand Pull Inflation (inflasi tarikan permintaan), yaitu inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku saat perekonomian tumbuh dengan pesat dan saat mencapai keadaan full employment disebut juga dengan pure inflation (inflasi murni)
2. Cost Push Inflation (inflasi dengan biaya), yaitu inflasi yang diakibatkan oleh peningkatan biaya selama periode pengangguran tinggi dan penggunaan sumber daya yang kurang aktif.⁴²

Setidaknya ada tiga indikator dalam menghitung inflasi, yaitu :

1. Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index), yaitu angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu.
2. Indeks Harga Perdagangan Besar Produsen (Wholesale Price Index), jika IHK melihat dari sisi konsumen, maka Indeks harga Perdagangan Besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu, IHPB sering juga disebut sebagai indeks harga produsen (producer price index). IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi.
3. Indeks Harga Implisit (GDP Deflator), walaupun sangat bermanfaat, IHK dan IHPB memberikan gambaran laju inflasi yang sangat terbatas. Sebab, dilihat dari metode penghitungannya, kedua indikator tersebut hanya melingkupi beberapa puluh atau mungkin ratusan jenis barang dan jasa, di beberapa puluh kota saja. Padahal kegiatan ekonomi juga terjadi tidak hanya di beberapa kota saja,

⁴¹Prathama Raharja dan Mandala Manurung, op.cit., p.319-320

⁴²Ibid., p. 365

melainkan seluruh pelosok wilayah. Untuk mendapatkan gambaran inflasi yang paling mewakili keadaan sebenarnya, ekonom menggunakan indeks harga implisit (GDP deflator), disingkat IHI.⁴³

Berdasarkan pengertian yang diperoleh dari Badan Pusat statistik (BPS) menunjukkan bahwa :

Penghitungan IHI ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHI dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dalam menyusun IHI, data harga konsumen diperoleh dari 82 kota, mencakup antara 225 – 462 barang dan jasa yang dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; serta transpor, komunikasi dan jasa keuangan.⁴⁴

Seperti halnya penyakit, inflasi menunjukkan berbagai tingkat kepelikan. Menurut Samuelson dan Nordhaus penting untuk mengklasifikasikan inflasi ke dalam tiga kategori, yaitu :

1. Low Inflation (Inflasi rendah), yaitu dicirikan oleh harga yang naik perlahan-lahan dan dapat diramalkan. Kita dapat mendefinisikannya sebagai tingkat inflasi tahunan dengan digit tunggal
2. Galloping Inflation (Inflasi yang melambung), yaitu inflasi dalam cakupan digit ganda atau triple, misalnya 20, 100, atau 200 persen per tahun. Pada kondisi ini, uang kehilangan nilainya dengan sangat cepat, sehingga orang-orang hanya memegang jumlah uang yang sangat minim yang dibutuhkan untuk transaksi sehari-hari.
3. Hyperinflation (Hiperinflasi), yaitu ketika ekonomi nampak selamat dari inflasi yang melambung, ketegangan ketiga dan yang mematikan mengambil alih ketika kanker hiperinflasi menyerang. Tidak ada hal bagus yang dapat dikatakan tentang sebuah perekonomian pasar dimana harga-harga meningkat jutaan atau bahkan miliaran persen pertahun.

⁴³Ibid., p. 367-369

⁴⁴Badan Pusat Statistik (<http://www.bps.go.id/>)

Dalam analisis makro ada dua faktor *ceteris paribus* yang sangat berpengaruh permintaan agregat dan penawaran agregat kedua faktor tersebut adalah kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

1. Kebijakan Moneter

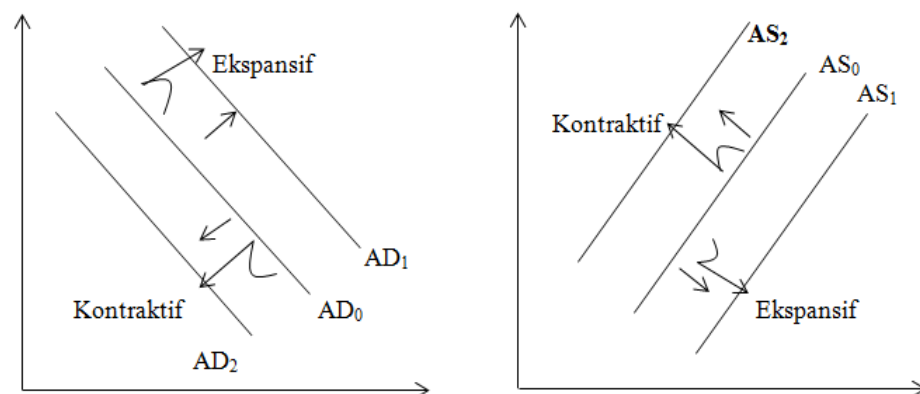
Alat yang digunakan yaitu dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Dalam analisis permintaan agregat, kebijakan yang ketat (kontraktif) akan mengurangi jumlah uang beredar sehingga akan dapat mengurangi daya beli secara agregat dan menggeser kurva AD ke kiri. Sedangkan kebijakan uang longgar (ekspansif) akan menambah jumlah uang yang beredar sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menggeser kurva AD ke kanan.

Pada penawaran agregat, kebijakan uang ketat (kontraktif) akan mengurangi jumlah uang beredar melalui peningkatan suku bunga akan menurunkan penawaran agregat dan menggeser kurva AS ke kiri. Sedangkan kebijakan uang longgar (ekspansif) melalui penurunan suku bunga akan meningkatkan penawaran agregat sehingga menggeser kurva AS ke kanan.⁴⁵

Diagram 2.3

Pengaruh Kebijakan Moneter Pemerintah

Terhadap Permintaan Agregat dan Penawara Agregat



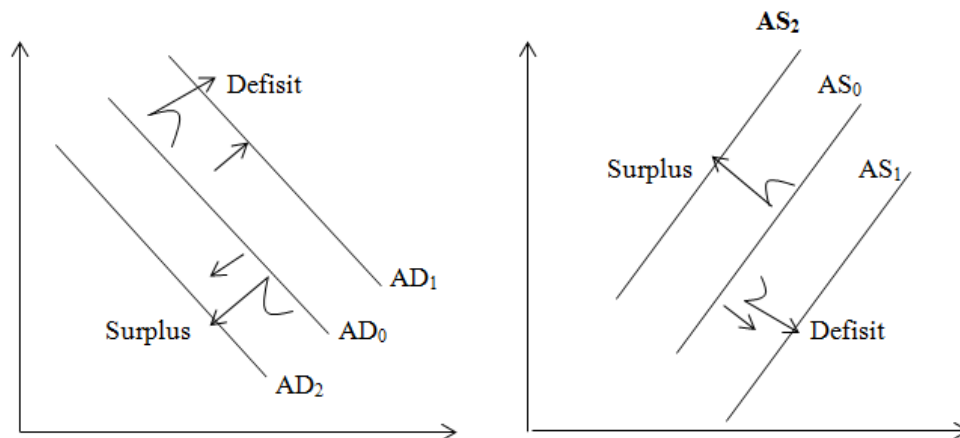
⁴⁵ Rahardja dan Manurung, Op.cit., p. 322

- (a) Permintaan Agregat
- (b) Penawaran Agregat
2. Kebijakan Fiskal
- Alat utama kebijakan fiskal pemerintah adalah pajak dan subsidi. Dalam menganalisis permintaan agregat, jika pemerintah menempuh kebijakan anggaran defisit, yaitu dimana pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, maka permintaan agregat meningkat, sebab pemerintah harus mengurangi pendapatannya melalui pajak dan atau menambah pengeluarannya melalui subsidi, sehingga akan membuat daya beli masyarakat meningkat dan menggeser kurva AD ke kanan. Sedangkan jika pemerintah menempuh kebijakan anggaran surplus, yaitu dimana pengeluaran lebih daripada penerimaan, maka permintaan agregat akan menurun, sebab pemerintah harus meningkatkan pendapatannya melalui pajak dan atau menurunkan pengeluarannya, sehingga akan membuat daya beli masyarakat menurun dan menggeser kurva AD ke kiri.⁴⁶

Diagram 2.4

Pengaruh Kebijakan Fiskal Pemerintah

Terhadap Permintaan Agregat dan Penawara Agregat



⁴⁶ Ibid.,

(a)
Permintaan Agregat

(b)
Penawaran Agregat

Dalam menerangkan bagaimana kebijakan pemerintah digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi, analisis yang dibuat selalu dilakukan secara terpisah, yaitu secara berasingan diterangkan bagaimana kebijakan fiskal dan kebijakan moneter digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dijalankan oleh dua pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Kedua institusi ini haruslah menyesuaikan kebijakan ekonominya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Menurut Sadono Sukirno, untuk meningkatkan keefektifan kebijakan pemerintah masing-masing institusi di atas perlu menjalankan hal berikut :

a. Untuk mengatasi pengangguran

Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga dan Kementerian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti pula dengan pengurangan pajak. Langkah tersebut akan menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran agregat sebagai akibat kenaikan investasi, kenaikan pengeluaran pemerintah, dan kenaikan pengeluaran rumah tangga

b. Untuk mengatasi inflasi

Tindakan yang perlu dijalankan Bank Sentral adalah mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga (konsumsi). Seterusnya Kementerian Keuangan perlu pula mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak individu dan perusahaan. Langkah tersebut dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi investasi dan mengurangi pengeluaran rumah tangga.⁴⁷

⁴⁷ Sadono, Sukirno., op.cit. p. 349

Sampai sekitar tahun 1960 para ahli ekonomi memperkirakan bahwa masalah pengangguran dengan inflasi adalah masalah yang berjalan sendiri-sendiri tanpa ada keterkaitan di antara kedua masalah tersebut. Masalah keterkaitan antara inflasi dengan pengangguran ini dapat diterangkan dengan kurva Philips. Kurva Philips ini adalah teori pilihan inflasi (*trade off*). Menurut dasar pandangan pendapat ini, suatu negara atau bangsa dapat mencapai angka pengangguran yang lebih rendah, apabila mau berkorban berupa laju inflasi yang lebih tinggi.

Hasil temuan Profesor Philips diadopsi oleh ekonomi Keynesian untuk menjelaskan adanya *trade off* antara tingkat inflasi dan pengangguran. Analisis kaum keynesian seperti diuraikan di atas mengundang keberatan kaum Klasik. Menurut mereka, kelemahan analisis diatas adalah dimensi waktu yang berjangka pendek. Hasil analisis jangka pendek akan berbeda dengan menggunakan analisis jangka panjang. Menurut kaum Klasik, dalam jangka panjang perekonomian berada di dalam keadaan kesempatan kerja penuh (*full-employment*). Oleh karena itu peningkatan permintaan agregat hanya akan menyebabkan inflasi.

Paul Samuelson dan Robert Solow mempopulerkan hubungan negatif ini di Amerika Serikat dengan sedikit modifikasi. Mereka memperoleh hubungan negatif antara laju inflasi dengan tingkat pengangguran.⁴⁸

⁴⁸Nopirin, op.cit, p. 36

Sedikit berbeda dengan pendapat para ahli di atas, Profesor Milton Friedman dari University of Chicago dan Edmund Phelps dari University of Columbia juga mengemukakan hubungan antara inflasi dan pengangguran. Temuan Friedman dan Phelps adalah “Dalam jangka panjang, perekonomian akan bergerak menuju angka pengangguran alamiah, berapa pun kadar perubahan tingkat upah dan laju inflasi.”⁴⁹ Maksud dari pendapat kedua ahli tersebut adalah bahwa kurva Philips yang sederhana itu akan bergeser sepanjang waktu karena para pekerja dan perusahaan menjadi terbiasa dengan berlanjutnya laju inflasi.

3. Upah Minimum

Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan kepada dua pengertian, yaitu gaji dan upah. Dari pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai pembayaran yang dilakukan biasanya satu bulan sekali kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional, seperti : pemerintah, dosen, guru, manajer, dan akuntan. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar.⁵⁰

Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah/gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan tunjangan yang diterima secara rutin/reguler

⁴⁹Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, J. Mulyadi, Makro Ekonomi, Jakarta : Erlangga, p.435

⁵⁰Sadono, Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga, jakarta : rajawali Pers, 2009, p.350

(tunjangan transport, uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin dan tunjangan dalam bentuk natural.⁵¹

Menurut Gilarso, balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia disebut upah (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dsb). Masih menurut Gilarso upah biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu: upah nominal (sejumlah uang yang diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu).⁵²

Menurut Gregory Mankiw, upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya.⁵³ Sedangkan upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun sub sektoral yang berupa upah pokok dan tunjangan. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.⁵⁴ Adapun dasar penghitungan upah minimum adalah berdasarkan kebutuhan hidup buruh lajang sebagaimana diatur dalam keputusan/peraturan menteri tenaga kerja.⁵⁵

⁵¹Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

⁵²Gilarso, op.cit., p. 267

⁵³Gregory Mankiw, op.cit,

⁵⁴Pasal 14 ayat 2 Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans Nomor KEP. 226/MEN/2000

⁵⁵Lihat Kepmenaker No 81 Tahun 1995 Tentang Kebutuhan Hidup Minimum, Permenakertrans no 17 tahun 2005 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan Permenakertrans No 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam Bab I Pasal 1 angka 30 dijelaskan Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Sejak pelaksanaan era desentralisasi dan otonomi daerah pada tahun 2001, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menentukan tingkat upah minimum provinsi (UMP). UMP/UMK cenderung menunjukkan trend peningkatan nilai UMP yang cukup signifikan. Kebijakan ini pada satu sisi telah meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi pada sisi lain juga adapat menurunkan tingkat kesempatan kerja, terutama di sektor formal dari industri. Hal ini dapat menghambat prospek pertumbuhan penyerapan tenaga kerja.

Dengan melihat kondisi masyarakat industrial saat ini dimana sistem pengupahan berdasarkan upah minimum masih diperlukan demi melindungi pekerja berupa *safety net* (jaring pengaman) yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah dengan melakukan perhitungan berdasarkan perlindungan minimum garis kemiskinan (*poverty line*) menggunakan data statistik BPS.

Upah minimum tidak dapat diterapkan secara massal di semua sektor, terutama sektor informal. Selain itu penetapan upah minimum juga harus memperhatikan kemampuan semua sektor dan level usaha. Selama ini diakui telah terjadi salah penafsiran dalam penetapan UMP/UMK. Upah minimum adalah upah terendah untuk membuat seseorang dapat hidup. Tapi bukan maksud pembuat undang-undang mewajibkan pengusaha memberikan upah hanya sebesar UMP/UMK.

Peraturan pelaksana terkait upah minimum diatur dalam Permenakertrans No. 01 Tahun 1999 tentang Upah minimum Juncto Kepmenakertrans No. 226/MEN/2000 tentang perubahan beberapa pasal dalam Permenakertrans No 01 tahun 1999. Upah Minimum terdiri dari Upah Minimum Propinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMS Propinsi), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota(UMS Kabupaten/kota).

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan.⁵⁶ Tata cara penangguhan upah minimum diatur dalam Kepmenakertrans Nomor: Kep-231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Mekanisme lainnya dalam penetapan upah adalah melalui peninjauan upah secara berkala. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU 13/2003 Psl 92 (2):

Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

⁵⁶Pasal 90 Ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peninjauan secara berkala dapat dilakukan baik karena alasan kenaikan upah minimum, kenaikan inflasi, kenaikan produktivitas maupun meningkatnya kekayaan perusahaan.

Secara umum kriteria yang digunakan dalam penetapan upah minimum sebagian besar di adopsi dari konvensi ILO 131 tentang upah minimum. Hal ini sebagaimana terlihat pada faktor pertimbangan upah minimum di Indonesia yang di atur dalam Permenaker No.17 Tahun 2005 dan perubahan revisi KHL dalam permenaker No 13 Tahun 2012. Adapun factor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum meliputi:

- a) Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
- b) Produktivitas makro;
- c) Pertumbuhan ekonomi
- d) Kondisi pasar kerja
- e) Kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal).⁵⁷

Menurut Profesor Pigou dalam buku *Theory of Unemployment*, bahwasannya pengangguran itu terutama disebabkan oleh kebijaksanaan upah yang gagal menyesuaikan diri secukupnya pada perubahan-perubahan dalam fungsi permintaan riil akan tenaga kerja.⁵⁸

Mankiw juga menambahkan bahwa penyebab adanya pengangguran adalah kekakuan upah (*wage rigidity*), dimana gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Dalam model keseimbangan pasar tenaga kerja, upah riil

⁵⁷Pasal 6 ayat 2 Kepmenakertrans No 13 Tahun 2012 Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak !

⁵⁸Prof. Dr. Willem H. Makaliwe, op.cit., hal. 262

melakukan penyesuaian untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Tetapi upah tidak selalu fleksibel.⁵⁹

Menurut Kaufman dan Hotchkiss upah minimum yang diterima adalah upah terendah yang akan diterima oleh pencari kerja. Hal ini akan mempengaruhi seseorang untuk menganggur dalam waktu tertentu untuk mencari pekerjaan terbaik dengan asumsi akan mendapatkan upah tertinggi. Jika tenaga kerja menetapkan upah tertentu sebagai upah minimum yang diterima, maka jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut maka seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan pengangguran.⁶⁰

Menurut Samuelson, peningkatan upah menimbulkan dua efek yang bertentangan atas penawaran tenaga kerja. Pertama, efek substitusi yang mendorong tiap pekerja untuk bekerja lebih lama, karena upah yang diterimanya dari tiap jam kerja lebih tinggi. Kedua, Efek pendapatan mempengaruhi segi sebaliknya, yaitu tingginya upah menyebabkan pekerja ingin menikmati lebih banyak rekreasi bersamaan dengan lebih banyaknya komoditi yang dibeli.⁶¹

⁵⁹Gregory Mankiw, op.cit

⁶⁰Kaufman, Bruce E, dan Julie L. Hotchkiss, *The Economics of Labour Market*, Fifth Edition, USA : Georgia State University

⁶¹Samuelson dan Nordhaus, op.cit., p. 428

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran telah dilakukan oleh beberapa pihak, antara lain:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Masalah dan Variabel	Alat Analisis	Kesimpulan
1.	Ni Komang Sopianti dan A.A Ketut Ayuningsih	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Pengangguran di Bali	Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan upah minimum terhadap jumlah pengangguran di Bali.	<p>Penelitian ini menggunakan data time series yaitu tahun 2004 sampai tahun 2010 dan data cross section sebanyak sembilan kabupaten/kota di Bali.</p> <p>Teknik analisis yang digunakan adalah dengan model analisis regresi linear berganda yaitu dengan menggunakan uji F dan uji t.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di Bali.</p> <p>Variabel dominan dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi, dimana 26 persen secara positif mempengaruhi jumlah pengangguran di Bali.</p>

2.	Muhammad Shun Hajji dan Nugroho SBM	Analisis PDRB, Inflasi, Upah Minimum Provinsi, dan Angka Melek Huruf terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990-2011	Menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh PDRB, Inflasi, UMP dan AMH terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Tengah tahun 1990-2011	Penelitian ini menggunakan teknik analisis Ordinary Least Square (OLS) dengan persamaan regresi linear berganda serta dengan melakukan uji F dan uji t.	Hasil penelitian ini juga menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi TPT. UMP dan AMH berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPT.
3.	Ni Putu Sucitrawati dan Sudarsana Arka	Pengaruh Inflasi, Investasi, dan Tingkat Upah terhadap Tingkat Pengangguran di Bali”.	Pada Penelitian ini membahas tentang pengaruh inflasi, investasi, dan tingkat upah terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Bali tahun 1998-2011 baik secara simultan dan parsial.	Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan inflasi, investasi, dan tingkat upah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Secara parsial, inflasi dan investasi tidak berpengaruh sedangkan tingkat upah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.
4.	Novlin Sirait dan A A I N Marhaeni.	Analisis Beberapa faktor yang Berpengaruh terhadap Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota Provinsi Bali	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, dan tingkat pendidikan terhadap jumlah pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Bali Mengetahui variabel yang paling	Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali dimana terbagi delapan kabupaten dan satu kota dengan menggunakan data selama periode 7 tahun. Pengambilan data sebagai sampel penelitian ini menggunakan	Pengujian secara parsial dilakukan dengan membandingkan t hitung dan t tabel dengan tingkat keyakinan 95 persen diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif nyata, upah minimum regional berpengaruh negatif nyata terhadap jumlah

			berpengaruh dominan.	metode purposive sampling dan menggunakan 63 titik data sebagai sampelnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda.	pengangguran. Sedangkan tingkat pendidikan negatif tidak nyata, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap jumlah pengangguran.
--	--	--	----------------------	--	---

C. Kerangka Teoretik

Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu negara dalam melakukan pembangunan. Dengan adanya tingkat pengangguran yang rendah, menandakan bahwa angkatan kerja berada pada level produktivitas yang baik. Hasilnya adalah pendapatan perkapita meningkat, daya beli meningkat dan kemudian akan meningkatkan perekonomian nasional. Dengan demikian tentunya negara mempunyai kas yang cukup untuk melakukan pembangunan.

Secara mikro masalah pengangguran dapat dilihat dari segi permintaan tenaga kerja. Permintaan pengusaha akan tenaga kerja disebabkan karena pengusaha mempekerjakan atau menggunakan tenaga kerja tersebut untuk membantu memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada masyarakat sehingga akan menambah keuntungan pengusaha tersebut. Dengan kata lain, permintaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai berbagai

kemungkinan jumlah tenaga kerja yang diminta pengusaha dalam berbagai tingkat upah.

Pada dasarnya faktor utama adanya pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan dapat diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Semakin besar permintaan, semakin banyak barang dan jasa yang akan mereka wujudkan.

Kenaikan jumlah penduduk yang terjadi di Indonesia mengakibatkan lonjakan angkatan kerja. Akan tetapi dengan sempitnya lahan pekerjaan di Indonesia ini, para angkatan kerja tersebut tidak akan terserap sepenuhnya, bahkan tidak terserap dalam jumlah banyak. Akibatnya pengangguran pun meningkat.

Untuk mencapai tingkat pengangguran yang rendah tidak lepas kaitannya dengan pendayagunaan sumber daya yang tepat sasaran, stabilitas moneter dan kebijakan pemerintah yang menunjang. Usaha pemerintah untuk meningkatkan rangsangan agar terjadi peningkatan permintaan agregat, hal tersebut dilakukan dengan melalui dua alat kebijakan yaitu kebijakan moneter melalui kebijakan uang longgar (ekspansif) dan atau kebijakan fiskal melalui kebijakan peningkatan anggaran pengeluaran dan belanja negara (defisit). Kedua kebijakan tersebut dapat meningkatkan produktivitas perekonomian dan menyerap tenaga kerja.

Namun disatu sisi hal tersebut juga akan menyebabkan banyaknya uang yang beredar dalam masyarakat dan menimbulkan tingginya tingkat inflasi. Hubungan seperti itu menjelaskan keterkaitan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran dalam periode pendek. Namun fenomena-fenomena yang terjadi setiap periodenya tidaklah sama, peristiwa demi peristiwa terjadi silih berganti. Sehingga membuat hubungan yang terjadi diantara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran tidak lagi seperti yang digambarkan oleh kurva Philips jangka pendek. Dalam jangka panjang, penghargaan mengenai inflasi menyesuaikan sepenuhnya dengan inflasi yang sedang berlaku. Setiap kebijakan pemerintah yang ditempuh, baik fiskal maupun moneter setiap periode tahunnya dalam menyelesaikan masalah antara inflasi dengan pengangguran yang terjadi tidak lagi membuat hubungan yang terbalik diantara keduanya.

Besaran upah akan mempengaruhi jumlah pengangguran melalui permintaan dan penawaran tenaga kerja. Besaran upah dapat memiliki hubungan positif atau negatif terhadap jumlah pengangguran. Hal ini terjadi karena upah minimum yang diterima adalah upah terendah yang akan diterima oleh pencari kerja. Hal tersebut akan mempengaruhi seseorang untuk menganggur dalam waktu tertentu untuk mencari pekerjaan terbaik dan tentunya upah yang tinggi. Jika tenaga kerja menetapkan upah tertentu sebagai upah minimum yang diterima dan seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah besaran upah tersebut maka seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut.

Pada pihak pengusaha, penetapan upah minimum yang tinggi akan menyebabkan jumlah pengangguran yang bertambah. Hal ini dikarenakan perusahaan mengambil kebijakan efisiensi biaya produksi dengan mengurangi tenaga kerja. Besaran yang digunakan untuk mengukur jumlah pengangguran yang dilakukan adalah dengan besaran upah rata-rata per propinsi dalam satu tahun.

Kenaikan inflasi mendorong para pekerja menuntut kenaikan upah dan gaji. Agar buruh atau karyawan bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan meningkatnya upah atau gaji karyawan, keuntungan perusahaan akan merosot dan ada yang menderita rugi, maka sebagai akibat tuntutan kenaikan upah dan gaji serta kerugian yang ditimbulkannya, karena dengan naiknya upah berarti sama saja meningkatnya biaya produktivitas. Kalau sudah seperti ini pengusaha bisa melakukan menjual dengan harga yang lebih tinggi. Akan tetapi dengan meningkatnya harga suatu output menyebabkan konsumen akan mengurangi konsumsinya, apabila hal ini berjalan secara terus menerus akan menyebabkan kerugian bagi pengusaha. Lalu langkah selanjutnya yang bisa dilakukan demi menyelamatkan perusahaannya adalah dengan mengurangi jumlah tenaga kerja dan pengangguran meningkat kembali.

D. Perumusan Hipotesis

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Terdapat pengaruh negatif antara tingkat inflasi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia, semakin tingginya inflasi, akan mengurangi tinggi pengangguran di Indonesia.
- H2 : Terdapat pengaruh positif antara upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Indonesia, semakin tingginya upah minimum, semakin tinggi pengangguran di Indonesia.
- H3 : Terdapat pengaruh antara tingkat inflasi dan upah minimum terhadap pengangguran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang sah, benar, dan dapat dipercaya (dapat diandalkan atau reliabel), tentang :

- a. Pengaruh antara tingkat inflasi (variabel bebas) terhadap pengangguran terbuka (variabel terikat) di Indonesia tahun 2008-2013
- b. Pengaruh antara upah minimum (variabel bebas) terhadap pengangguran terbuka (variabel terikat) di Indonesia tahun 2008-2013
- c. Pengaruh antara tingkat inflasi dan upah minimum terhadap pengangguran di Indonesia tahun 2008-2013

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil data tingkat pengangguran, tingkat inflasi, dan upah minimum di Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil data berupa data panel mulai tahun 2008 sampai dengan 2013.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Ekspos Facto* yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan keterangan-

keterangan yang jelas dengan menggunakan data yang sudah terjadi. Metode ini digunakan dengan alasan karena menggunakan data yang tersedia dengan menggunakan pendekatan korelasi sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui pengaruh antara tingkat inflasi dan upah minimum terhadap pengangguran di Indonesia.

Analisis data panel adalah suatu metode mengenai gabungan dari data antar waktu (time series) dengan data antar individu/daerah (cross section). Dengan menggunakan analisis data panel bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel yang akan diteliti, yaitu tingkat pengangguran di Indonesia sebagai variabel terikat, Inflasi sebagai variabel bebas pertama dan Upah Minimum Regional/Provinsi sebagai variabel bebas kedua.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yaitu data yang telah tersedia dalam bentuk angka. Data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, tetapi mengambil dari Badan Pusat Statistik, dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah, ataupun publikasi lainnya. Data sekunder yang digunakan adalah penggabungan dari deret berkala (time series) dari tahun 2008-2013 dan

deret lintang (cross section) sebanyak 33 provinsi di Indonesia yang menghasilkan 198 observasi.

Pengambilan data dilakukan di BPS (Badan Pusat Statistik) Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta pusat sebagai sumber data. Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. Sebagai pendukung, digunakan buku referensi, jurnal, surat kabar, serta browsing website internet yang terkait dengan pengangguran.

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Tingkat Pengangguran (Variabel Y)

a. Definisi Konseptual

Pengangguran adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya, meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha, penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

b. Definisi Operasional

Pengangguran ialah angkatan kerja produktif dengan batasan usia 15 tahun samapi 65 tahun yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang belum mendapatkan pekerjaan. Variabel

tingkat pengangguran diukur dengan menggunakan data keadaan angkatan kerja Indonesia yang dilakukan oleh BPS melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

2. Tingkat Inflasi (X1)

a. Definisi Konseptual :

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga barang secara umum secara terus menerus dalam suatu perekonomian selama periode tertentu.

b. Definisi Operasional :

Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Variabel inflasi diukur dengan menggunakan data inflasi tahunan yang dihitung berdasarkan acuan Indeks harga Konsumen (IHK) sebagai indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga.

3. Upah Minimum (Varabel X2)

a. Definisi Konseptual

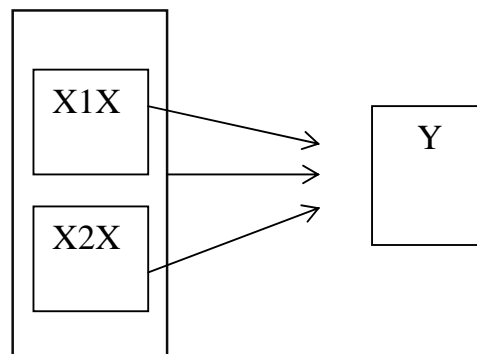
Upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun sub sektoral yang berupa upah pokok dan tunjangan.

b. Definisi Operasional

Upah minimum adalah upah yang dimaksudkan untuk menjaga agar pekerja yang paling marginal di pasar tenaga kerja dapat tetap menerima upah yang wajar dan layak. Dengan konsep ini, upah minimum merupakan jaring pengaman (*safety net*) di pasar tenaga kerja dan pengupahan.

F. Konstelasi Hubungan Antar Variabel

Konstelasi hubungan antar variabel dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan arah atau gambaran dari penelitian ini, yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

Variabel Bebas (X1) : Tingkat Inflasi

Variabel Bebas (X2) : Upah Minimum Regional

Variabel Terikat (Y) : Tingkat Pengangguran

—————> : Menunjukkan Arah Pengaruh

G. Teknik Analisis Data

1. Metode Analisis

a. Analisis Data Panel

Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antar deret waktu (time series) dan kerat lintang (cross section). Gujarati menyatakan bahwa untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalnya pada data cross section, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. Dalam data panel, unit cross section yang sama disurvei dalam beberapa waktu. Dalam model panel data, persamaan model dengan menggunakan data cross section dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 X_i ; i = 1, 2, \dots, N \dots\dots\dots (3.1)$$

Keterangan : N adalah banyaknya data cross section

Sedangkan persamaan model dengan time series adalah

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \beta_2 X_t ; t = 1, 2, \dots, T \dots\dots\dots (3.2)$$

Keterangan : T adalah banyaknya data time-series

Mengingat data panel merupakan gabungan dari time series dan cross section, maka model dapat ditulis dengan :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \mu_{it} \dots\dots\dots (3.3)$$

$$i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

Keterangan :

Y : tingkat pengangguran

X1 : tingkat inflasi

X2 : upah minimum regional

I : cross section

t : time series

β_0 : konstanta

β_1, β_2 : koefisien yang dicari untuk mengukur pengaruh variabel X1 dan X2

μ : kesalahan pengganggu

Model tersebut dapat ditransformasikan kedalam persamaan

logaritma natural :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \mu$$

Keterangan:

Y : tingkat pengangguran

β_0 : konstanta

X1 : tingkat inflasi

X2 : upah minimum regional

β_1, β_2 : koefisien yang dicari untuk mengukur pengaruh variabel X1 dan X2

μ : kesalahan pengganggu

Ln : logaritma natural

Pemilihan model ini didasarkan pada penggunaan model logaritma natural (Ln) karena terdapatnya perbedaan dalam satuan besaran variabel bebas dalam persamaan regresi. Selain itu Damodar Gujarati menyebutkan bahwa salah satu keuntungan dari penggunaan logaritma natural (Ln) adalah memperkecil bagi variabel-variabel yang diukur karena penggunaan logaritma dapat memperkecil salah satu penyimpangan dalam asumsi OLS (Ordinary Least Square) yaitu heterokedastisitas.⁶³

Penggunaan data panel pada dasarnya merupakan solusi akan ketidaktersediaan data time series yang cukup panjang untuk kepentingan analisis ekonometrika. Menurut Hsiao dalam Greene keunggulan penggunaan data panel dibandingkan deret waktu dan kerta lintang adalah:

- a. Dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degrees of freedom (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas, dimana dapat menghasilkan ekonometri yang efisien
- b. Data panel data, data lebih informatif, lebih bervariasi, yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross section dan time series saja.
- c. Panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data cross section.

⁶³ Damodar, Gujarati, *Ekonometrika Dasar* (Jakarta : Erlangga, 1997)

b.

Estimasi Model

Dalam mengestimasi model regresi data panel terdapat tiga spesifikasi model yang mungkin digunakan, yakni model *common effects*, *fixed effect*, dan *random effect*.

1) Model Common Effect

Model *common effect* atau *pooled regression* merupakan model regresi data panel yang paling sederhana. Model ini pada dasarnya mengabaikan struktur panel dari data, sehingga diasumsikan bahwa perilaku antar individu sama dalam berbagai kurun waktu atau dengan kata lain pengaruh spesifik dari masing-masing individu diabaikan atau dianggap tidak ada. Dengan demikian, akan dihasilkan sebuah persamaan regresi yang sama untuk setiap unit cross section. Sesuatu yang secara realistis tentunya kurang dapat diterima. Karena itu, model ini sangat jarang digunakan dalam analisis data panel.

2) Model Fixed Effect

Jika model *common effect* cenderung mengabaikan struktur panel dari data dan pengaruh spesifik masing-masing individu, maka model *fixed effect* adalah sebaliknya. Pada model ini, terdapat efek spesifik individu α_i dan diasumsikan berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati X_{it} .

3) Model *Random Effect*

Pendekatan ini mengasumsikan *unobservable individual effect* (u_{it}) tidak berkorelasi dengan *regressor* (X) atau dengan kata lain u_{it} diasumsikan bersifat random. Sebelum model diestimasi dengan model yang tepat, terlebih dahulu dilakukan uji spesifikasi apakah *fixed effect* atau *random effect* atau keduanya memberikan hasil yang sama.

c. Penyeleksian Model Estimasi Data Panel

Sebelum menentukan metode estimasi data panel yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka harus dilakukan beberapa pengujian. Untuk menentukan apakah model panel data dapat diregresi dengan metode Common Effect (CE), metode Fixed Effect (FE) atau metode Random Effect (RE), maka dilakukan uji-uji sebagai berikut:

1. Uji Chow

Uji Chow dapat digunakan untuk memilih teknik dengan metode pendekatan Pooled Least Square (PLS) atau metode Fixed Effect (FE). Prosedur Uji Chow adalah sebagai berikut:

a. Buat hipotesis dari Uji Chow

1 = model Common Effect lebih baik daripada Fixed Effect

2 = model Fixed Effect lebih baik daripada Common Effect

b. Menentukan kriteria uji

1. Apabila nilai F statistik $> F$ tabel, maka hipotesis ditolak yang artinya kita harus memilih teknik FE.
2. Apabila nilai F statistik $< F$ tabel, maka hipotesis diterima yang artinya kita harus memilih teknik PLS.

Setelah menguji signifikansi antara common effect atau fixed effect, maka selanjutnya jika terbukti fixed effect dan random effect sama-sama lebih baik dari common effect adalah melakukan pengujian signifikansi fixed effect atau random effect.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara metode pendekatan *Fixed Effect* (FE) atau *Random Effect* (RE). Prosedur Uji Hausman adalah sebagai berikut:

a. Buat hipotesis dari Uji Hausman:

1 = model *Random Effect* lebih baik daripada *Fixed Effect*

2 = model *Fixed Effect* lebih baik daripada *Random Effect*

b. Menentukan kriteria uji:

1. Apabila *Chi-square* statistik $> Chi-square$ tabel dan *p-value* signifikan, maka hipotesis ditolak, sehingga metode FE lebih tepat untuk digunakan.
2. Apabila *Chi-square* statistik $< Chi-square$ tabel dan *p-value* signifikan, maka hipotesis diterima, sehingga metode RE lebih

tepat untuk digunakan.

Gujarati memberikan sejumlah pertimbangan terkait pilihan apakah menggunakan metode fixed effect (FE) ataupun model random effect (RE). Pertimbangan-pertimbangan itu adalah sebagai berikut :

1. Jika jumlah data time series (T) besar dan jumlah data cross section (N) kecil, ada kemungkinan perbedaan parameter yang diestimasi dengan FE dan RE cukup kecil. Karena itu, pilihan ditentukan berdasarkan kemudahan perhitungan. Dalam hal ini, adalah model FE.
2. Ketika N besar dan T kecil estimasi kedua metode dapat berbeda secara signifikan. Pada kondisi seperti ini, pilihan ditentukan berdasarkan keyakinan apakah individu yang diobservasi merupakan sampel acak yang diambil dari populasi tertentu atau tidak. Jika observasi bukan merupakan sampel acak, maka digunakan model FE. Jika sebaliknya maka digunakan model RE.
3. Jika efek individu tidak teramati α_i berkorelasi dengan satu atau lebih variabel bebas, maka estimasi dengan RE bias, sedangkan estimasi dengan FE tidak bias.
4. Jika N besar dan T kecil, serta semua asumsi yang disyaratkan oleh model RE terpenuhi, maka estimasi dengan menggunakan RE lebih efisien dibanding estimasi dengan FE.

1. **Pengujian Kriteria Statistik**

a. **Pengujian Signifikansi Simultan (Uji-F)**

Uji F atau uji koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen (inflasi dan upah minimum regional) secara serentak terhadap variabel dependen (tingkat pengangguran), apakah pengaruhnya signifikan atau tidak.

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)} \dots\dots\dots (3.11)$$

Keterangan :

R^2 = koefisien determinasi (residual)

K = jumlah variabel independen ditambah intercept dari suatu model persamaan

n = jumlah sampel

Hasil yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan tabel F sebagai F kritis, dengan ketentuan taraf signifikan (α) adalah 0,05. Dalam hal ini perlu ditentukan hipotesis nol dan hipotesis tandingnya.

$H_o : \beta_1 = \beta_2 = 0$

Artinya variabel X1 (Inflasi) dan X2 (upah minimum regional) secara serentak tidak berpengaruh terhadap Y (tingkat pengangguran)

$H_o : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$

Artinya variabel X1 (inflasi) dan X2 (upah minimum regional) secara serentak berpengaruh terhadap Y (tingkat pengangguran)

Kriteria pengujian :

- 1) Terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, artinya seluruh variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat
- 2) Tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, artinya seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

b. Uji t (Partial Test)

Uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen (inflasi dan upah minimum regional) secara parsial terhadap variabel dependen (tingkat pengangguran), apakah pengaruhnya signifikan atau tidak.⁶⁴ Selain itu, uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan uji statistik t maka dapat diketahui apakah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sesuai hipotesis atau tidak.

1) Hipotesis pengujian :

$$H_0 : \beta_1 \leq 0$$

$$H_i : \beta_1 > 0$$

Kriteria pengujian:

- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_0 ditolak, maka salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan

⁶⁴ Duwi Priyanto, *op.cit* , p.50

- b) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, H_0 diterima, maka salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan

2. Uji

Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya presentasi variabel terikat (tingkat pengangguran) yang disebabkan oleh variabel bebas (inflasi dan upah minimum regional). Dengan kata lain, koefisien determinasi menunjukkan ragam naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X. Dalam hal ini ragam naik turunnya Y seluruhnya disebabkan oleh X. Perhitungan koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus:⁶⁵

$$R^2 = \frac{EES}{TSS} \dots\dots\dots (3.12)$$

Keterangan : EES (*Explained of Sum Squared*) : jumlah kuadrat yang dijelaskan

TSS (*Total Sum of Squares*) : total jumlah kuadrat

Nilai R^2 terletak diantara 0 sampai dengan 1, nilai $0 \leq R^2 \leq 1$. Jika $R^2 = 0$, berarti variabel bebas tidak bisa menjelaskan variabel perubahan variabel terikat, maka model dapat dikatakan buruk. Jika $R^2 = 1$, berarti variabel bebas mampu menjelaskan variabel perubahan variabel terikat dengan sempurna. Kondisi seperti dua hal tersebut hampir sulit diperoleh. Kecocokan model dapat dikatakan lebih baik kalau R^2 semakin dekat dengan 1.

⁶⁵ Nachrowi Djalal Nachrowi, *Op.Cit.*, p.22

3. Pengujian Asumsi Klasik

Menurut Greene “uji asumsi klasik dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena pada hakekatnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien.”⁶⁶ Konsekuensi yang muncul ketika membangun model regresi dengan data panel adalah bertambahnya komponen residual, karena adanya dimensi cross section dan time series pada data. Kondisi ini menyebabkan matriks varian kovarian residual menjadi sedikit lebih kompleks bila dibandingkan dengan model regresi klasik yang hanya menggunakan data cross section atau data time series.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel bebas (inflasi dan upah minimum regional) dan variabel terikat (tingkat pengangguran) mempunyai distribusi normal atau tidak. Menurut Imam Ghazali, Jika data tidak berdistribusi normal maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan.⁶⁷

Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidak gangguan (μ) antara lain J-B test dan metode grafik. Penelitian ini akan menggunakan metode J_B test yang dilakukan dengan menghitung

⁶⁶William H. Greene, *Econometric Analysis* (New York : New York University, 2002), p. 307

⁶⁷ Imam Ghazali, *Ekonomika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), hal. 110

skweness dan kurtosis, apabila J-B hitung < nilai X^2 (chi-square) tabel, maka nilai residual berdistribusi normal. Model untuk mengetahui uji normalitas adalah :

$$JB = n \left[\frac{\mu_3^2}{6\mu_2^3} + \frac{(\frac{\mu_4}{\mu_2} - 3)}{24} \right] \dots\dots\dots (3. 8)$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

2 = varians

3 = slewness

4 = kurtosis

Jarque-Bera test mempunyai distribusi chi square dengan derajat bebas dua. Jika hasil Jarque-Berra test lebih besar dari nilai chi-square pada $\alpha=5$ persen, maka H_0 ditolak yang berarti tidak berdistribusi normal. Jika hasil Jarque-Beta test lebih kecil dari nilai chi square pada $\alpha=5$ persen, maka H_0 diterima yang berarti error term berdistribusi normal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Deskriptif data penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai penyebaran atau distribusi data. Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini, yaitu tingkat pengangguran adalah variabel Y, tingkat inflasi adalah variabel X1 dan upah minimum regional adalah variabel X2. Diperoleh seperangkat data yang dapat dideskripsikan dengan menggunakan statistik deskriptif.

1. Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena pertambahan lapangan kerja lebih rendah daripada pertambahan pencari kerja. Tidak sedikit masyarakat beranggapan bahwa salah satu penyebab pengangguran adalah akibat dari sistem pendidikan yang hanya mementingkan perubahan pada sikap afektif dan kognitifnya saja. Perubahan pada sikap psikomotorik masih dirasa kurang. Berikut akan ditampilkan data mengenai tingkat pengangguran berdasarkan provinsi tahun 2008 sampai dengan 2013.

Tabel IV.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Provinsi
Tahun 2008-2013

No.	Provinsi	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Aceh	9,56	8,71	8,37	7,43	9,10	10,30
2	Sumatra Utara	9,10	8,45	7,43	6,37	6,20	6,53
3	Sumatra Barat	8,04	7,97	6,95	6,45	6,52	6,99
4.	Riau	8,20	8,56	8,72	5,32	4,30	5,50
5.	Jambi	5,14	5,54	5,39	4,02	3,22	4,84
6.	Sumatra Selatan	8,08	7,61	6,65	5,77	5,70	5,00
7.	Bengkulu	4,90	5,08	4,59	2,37	3,61	4,74
8.	Lampung	7,15	6,62	5,57	5,78	5,18	5,85
9.	Bangka Belitung	5,99	6,14	5,63	3,61	3,49	3,70
10.	Kepulauan Riau	8,01	8,11	6,90	7,80	5,37	6,25
11.	DKI Jakarta	12,16	12,15	11,05	10,80	9,87	9,02
12.	Jawa Barat	12,08	10,96	10,33	9,83	9,08	9,22
13.	Jawa Tengah	7,35	7,33	6,21	5,93	5,63	6,02
14.	D.I. Yogyakarta	5,38	6,00	5,69	3,97	3,97	3,34
15.	Jawa Timur	6,42	5,08	4,25	4,16	4,12	4,33
16.	Banten	15,18	14,97	13,68	13,06	10,13	9,90
17.	Bali	3,31	3,13	3,06	2,32	2,04	1,79
18.	Nusa Tenggara Barat	6,13	6,25	5,29	5,33	5,26	5,38
19.	Nusa Tenggara Timur	3,73	3,97	3,34	2,69	2,89	3,16
20.	Kalimantan Barat	5,41	5,44	4,62	3,88	3,48	4,03
21.	Kalimantan Tengah	4,59	4,62	4,14	2,55	3,17	3,09
22.	Kalimantan Selatan	6,18	6,36	5,25	5,23	5,25	3,79
23.	Kalimantan Timur	11,11	10,83	10,10	9,84	8,90	8,04
24.	Sulawesi Utara	10,65	10,56	9,61	8,62	7,79	6,68
25.	Sulawesi Tengah	5,45	5,43	4,61	4,01	3,93	4,27
26.	Sulawesi Selatan	9,04	8,90	8,37	6,56	5,87	5,10
27.	Sulawesi Tenggara	5,73	4,74	4,61	3,06	4,04	4,46
28.	Gorontalo	5,65	5,89	5,16	4,26	4,36	4,12
29.	Sulawesi Barat	4,57	4,51	3,25	2,82	2,14	2,33
30.	Maluku	10,67	10,57	9,97	7,38	7,51	9,75
31.	Maluku Utara	6,48	6,76	6,03	5,55	4,76	3,86
32.	Papua Barat	7,65	7,56	7,68	8,94	5,49	4,62
33.	Papua	4,39	4,08	3,55	3,94	3,63	3,23
Jumlah / Total		8,39	7,87	7,14	6,56	6,14	6,25

Sumber : BPS, data diolah

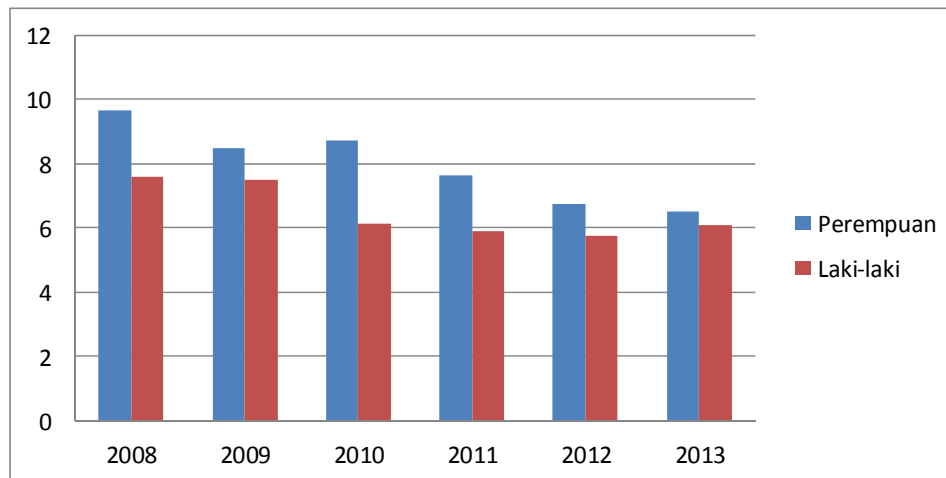
Berdasarkan data diatas menunjukkan tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan, hal ini sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang positif. Pada tahun 2012, pengangguran diperkirakan mencapai 6,14 persen, tingkat pengangguran terendah dicapai di Indonesia selama dekade terakhir. Namun, penurunan terbaru dalam indikator ekonomi telah melihat adanya peningkatan tingkat pengangguran hingga 6,25 persen di tahun 2013. Ini adalah pertama kalinya tingkat pengangguran kembali meningkat di Indonesia sejak tahun 2005.

Dari tabel yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya tingkat pengangguran terbuka disepanjang tahun 2008 hingga tahun 2012 mengalami penurunan yang diakibatkan karena pertumbuhan ekonomi yang positif dan mampu menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah relatif besar.

Selain itu berdasarkan tabel diatas menunjukkan tingkat pengangguran tertinggi adalah provinsi Banten, yaitu dengan tingkat pengangguran terbuka 15,18%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka yang terendah adalah provinsi Bali yaitu 1,79%. Ibu kota Jakarta juga menjadi provinsi yang memiliki angka pengangguran tinggi di Indonesia. Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki daya ikat yang kuat untuk para pencari kerja yang berasal dari provinsi lain, sedangkan hal tersebut tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang yang diberikan serta tidak sesuai dengan keahlian dan karakteristik dari pencari kerja tersebut.

Dalam pembahasan ini peneliti mencoba membandingkan tingkat pengangguran berdasarkan jenis kelamin. Tren gender telah menunjukkan masih terdapatnya kesenjangan dari waktu ke waktu. Berikut adalah data pengangguran berdasarkan jenis kelamin.

Gambar IV.1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2008-2012



Sumber : BPS, data diolah

Manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki yang saling melengkapi guna membangun suatu sinergi untuk kesejahteraan umat manusia. Meskipun kedudukan dan peran perempuan dan laki-laki yang sama di dalam hukum dan pemerintahan sudah dijamin di dalam Undang-Undang, namun dalam prakteknya masih mengalami hambatan. Dalam perkembangannya, telah terjadi dominasi oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya, sehingga menimbulkan diskriminasi ataupun tindak kekerasan.

Secara umum, tingkat pengangguran perempuan selalu lebih tinggi daripada tingkat pengangguran laki-laki, tingkat pengangguran perempuan tahun 2008 berada pada level 9,7 persen sedangkan tingkat pengangguran laki-laki berkisar antara 7,6 persen. Hal tersebut tetap senada sampai pada tahun 2012 yang menempati tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi

dibandingkan laki-laki, yaitu berada pada level 6,77% sedangkan tingkat pengangguran laki-laki berada pada level 5,75%.

Dari segi penawaran, pencari kerja perempuan lebih sedikit dari pada pencari kerja laki-laki. Demikian juga dari segi permintaan, lowongan kerja perempuan lebih sedikit dari pada lowongan kerja laki-laki. Secara keseluruhan atau secara rata-rata di Indonesia bahwa keterlibatan perempuan di pasar kerja adalah di sektor jasa kemasyarakatan, industri, pertanian dan perdagangan relatif lebih banyak dibandingkan di sektor yang lain.

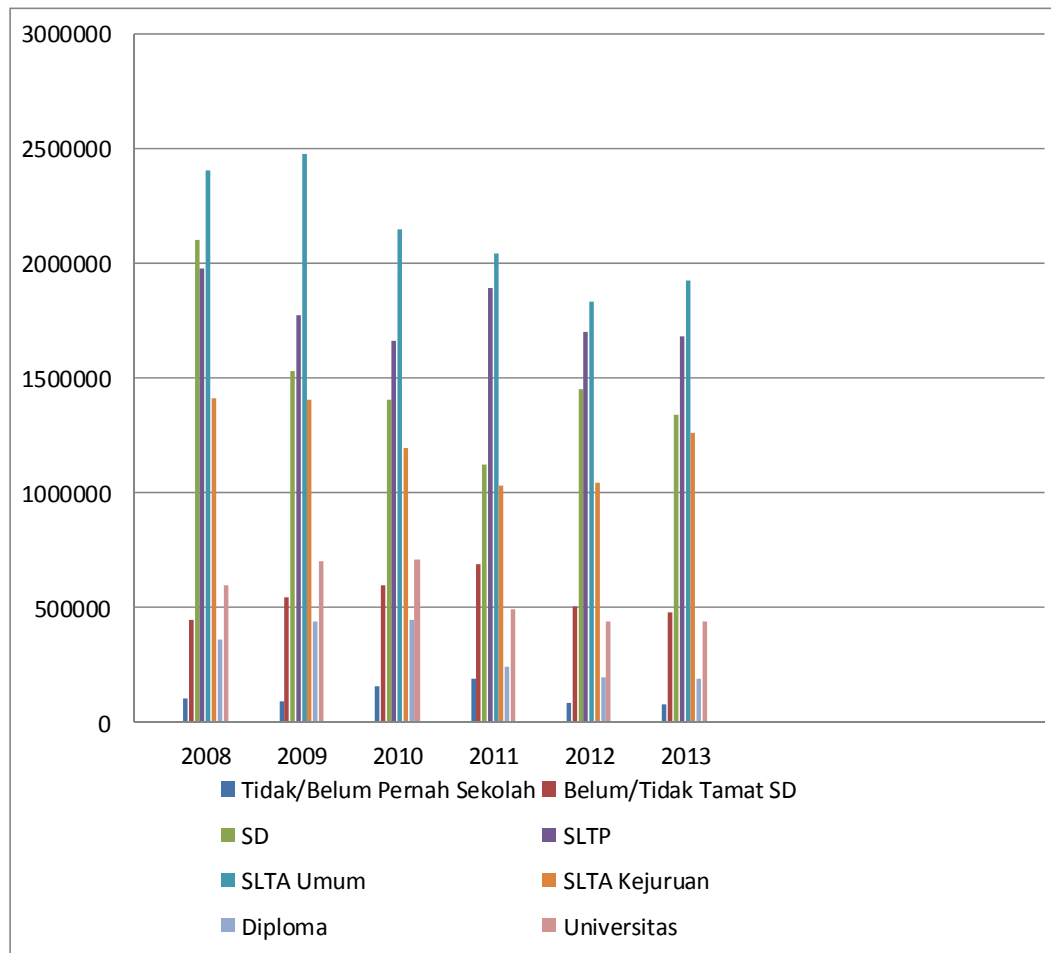
Selain itu penyebab pengangguran perempuan lebih tinggi dikarenakan sesuai dengan karakteristik wilayah, budaya bekerja, adat istiadat serta struktur perekonomian setempat. Misalnya dikalangan masyarakat Jawa, seorang suami adalah kepala keluarga, namun tidak berarti bahwa istri memiliki status lebih rendah karena ia bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga. Akan tetapi seorang anak laki-laki umumnya memiliki peran yang lebih kuat dan jelas sebagaimana yang ditunjukkan dalam pengalihan tanggung jawab dari ayah kepada anak laki-laki. Begitu pula etnis Sunda, yang merupakan masyarakat patrilineal dengan hierarki kuat.

Di daerah Bugis di Sulawesi Selatan, ternyata terdapat norma yang cukup kuat bahwa wanita sama sekali tidak diperbolehkan bekerja di sawah, kecuali mengawasi pada saat panen. Di daerah istimewa Yogyakarta terdapat norma yang mengatakan "*ngono ya ngono, ning ojo ngono*". Hal ini berarti wanita boleh saja bekerja di bidang apapun, tapi jangan sampai melanggar batas-batas norma yang tidak pantas dilakukan. Dengan keadaan yang seperti ini peran gender ternyata menimbulkan masalah yakni ketidakadilan yang ditimbulkan oleh

peran dan perbedaan gender tersebut. Antara lain terjadi marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap perempuan.

Selain berdasarkan jenis kelamin, pengangguran juga dapat dilihat berdasarkan pendidikan. Berikut akan ditampilkan pengangguran berdasarkan tingkat pendidikannya.

Gambar IV.1.2
Tingkat Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2008-2013



Sumber : BPS, data diolah

Berdasarkan data pada gambar diatas menunjukkan bahwa jumlah pengangguran tertinggi di Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan 2013 merupakan berasal dari kalangan tingkat pendidikan SLTA Umum. Mereka umumnya berusia antara 15 sampai 25 tahun dan belum punya pengalaman kerja. Secara umum, sebagian besar pekerja yang menganggur di Indonesia sedang mencari pekerjaan. Hanya sebagian kecil yang sudah merasa putus asa dan enggan mencari pekerjaan atau sedang mempertimbangkan upaya untuk membuka usaha sendiri atau menunggu dibukanya lowongan kerja baru.

Pada tahun 2008 tingkat pengangguran yang berasal dari tingkat pendidikan SLTA Umum berjumlah 2.403.394 jiwa, sedangkan pada tahun 2013 berjumlah 1.925.563 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwasannya pengangguran di tingkat SLTA Umum menurun, namun masih tetap penyumbang tertinggi pengangguran yang berdasarkan tingkat pendidikan. Sedangkan dikalangan yang tidak atau belum sekolah menjadi penyumbang terendah.

Salah satu penyebab angkatan kerja pada kelompok usia muda ini (tingkat pendidikan SLTA Umum) adalah dikarenakan angkatan kerja baru belum siap memasuki dunia kerja. Ada beberapa latar belakang mengapa kelompok usia muda itu ikut terjun ke pasar kerja, antara lain kesulitan ekonomi keluarga sehingga memaksa mereka untuk berhenti sekolah/kuliah dan terpaksa memasuki dunia kerja.

Sebaliknya, sulitnya mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya lapangan pekerjaan serta kurangnya pengalaman dan keahlian menyebabkan mereka ikut

terjebak dalam kelompok pengangguran, sehingga menambah akumulasi jumlah penganggur menjadi lebih banyak lagi. Faktor-faktor lainnya ialah kelompok usia muda umumnya masih bersifat idealis termasuk dalam memilih pekerjaan, misalnya sesuai keinginan, keahlian, hobi, standar gaji, dan gengsi. Akibatnya lapangan pekerjaan mereka menjadi terbatas. Selain itu, kelompok usia ini belum memiliki banyak beban tanggungan ekonomi keluarga dan masih ada jaring pengaman ekonomi baginya yaitu keluarga dan masyarakat sosialnya.

Berdasarkan penjabaran yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendidikan memainkan peran penting dalam keterlibatan pasar kerja bagi pengangguran. Lebih lanjut dijelaskan, sebagian besar pencari kerja yang menganggur telah lulus SMA sebagai tingkat pendidikan tertinggi mereka. Pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesempatan lebih tinggi untuk memenuhi kriteria perekrutan perusahaan, sementara pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah mungkin tidak memenuhi tuntutan dengan mudah, dan oleh karena itu pekerja ini memiliki risiko kehilangan semangat lebih tinggi.

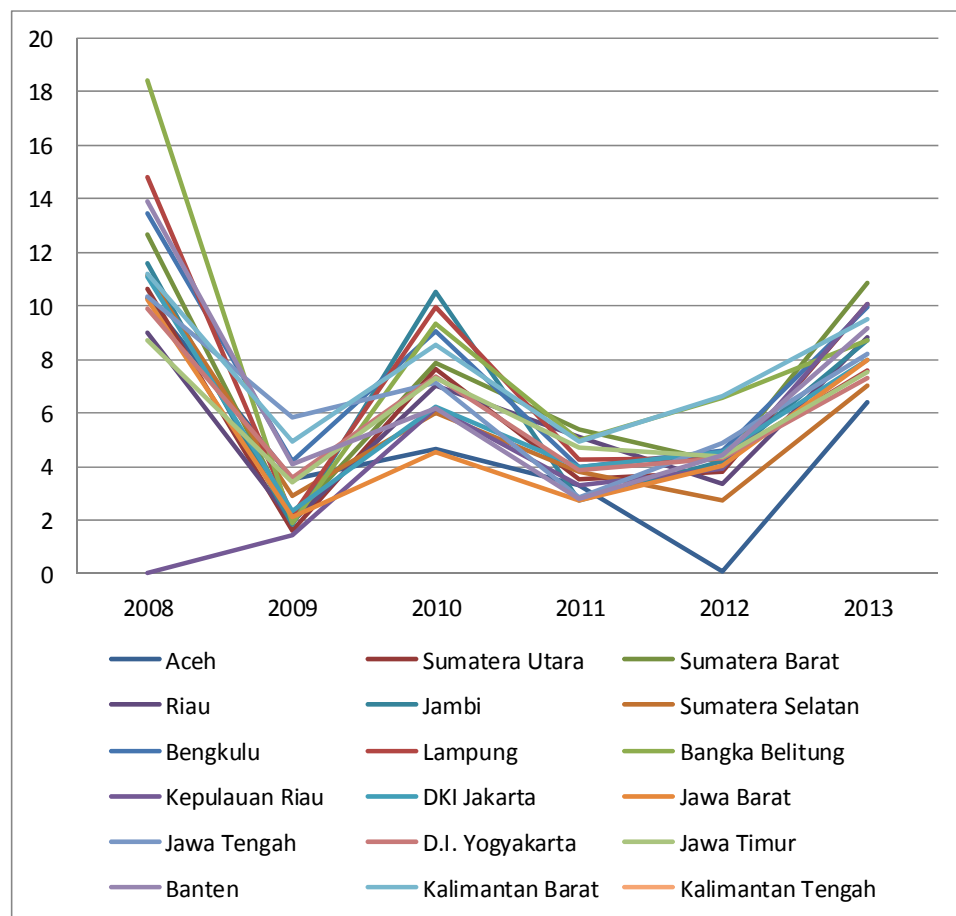
Maka dengan meningkatkan tingkat pendidikan setidaknya dapat mengurangi tingkat pengangguran. Sangatlah penting agar kebijakan terus memberikan dukungan bagi penduduk usia kerja, khususnya kaum muda, untuk melanjutkan pendidikan mereka, dengan demikian akan mengurangi jumlah pekerja berpendidikan rendah yang memasuki pasar kerja di masa yang akan datang.

2. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga barang umum secara terus menerus dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya.

Gambar IV.2.1

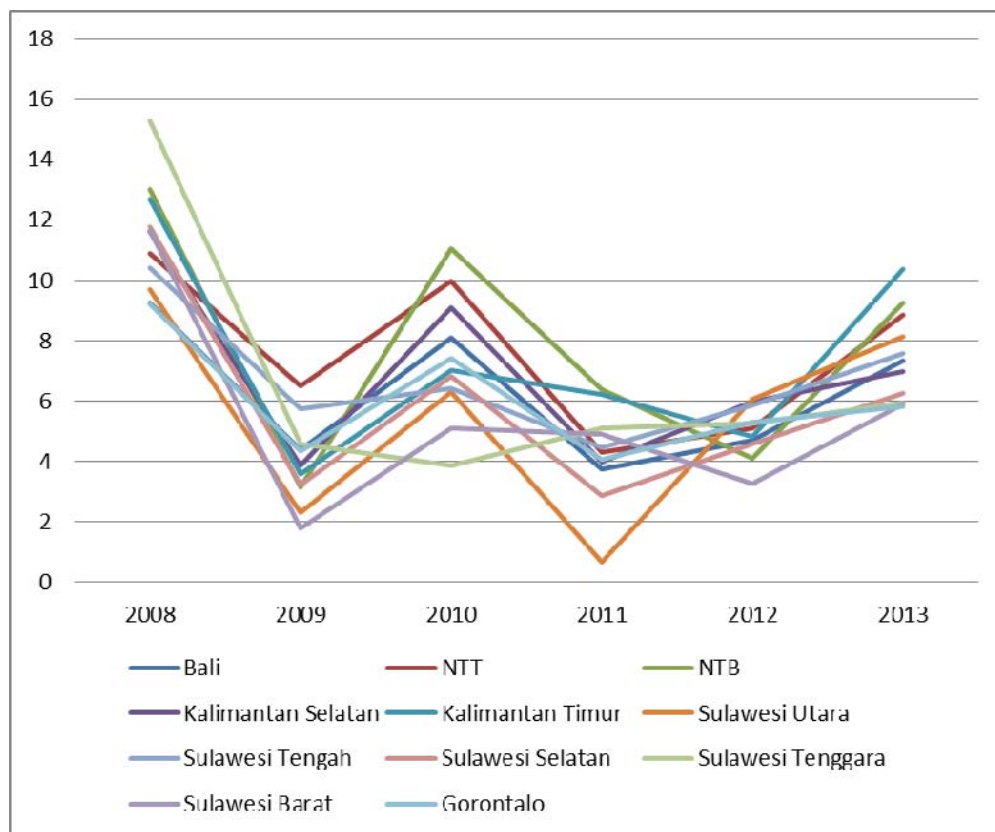
Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2008-2013



Sumber : BPS, data diolah

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan tingkat inflasi berdasarkan wilayah waktu Indonesia bagian barat. Kondisi laju inflasi pada Gambar IV.2.1 menunjukkan masing-masing provinsi mengalami keadaan yang berfluktuasi. Tingkat inflasi tertinggi terjadi di wilayah provinsi Bangka Belitung pada tahun 2008 pada kisaran persentase 18,4%. Sedangkan tingkat inflasi terendah berada dikisaran 0,06 % yang dialami oleh provinsi Aceh pada tahun 2012. Ini merupakan tingkat Inflasi terendah dari 33 provinsi di Indonesia.

Gambar IV.2.2
Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2008-2013

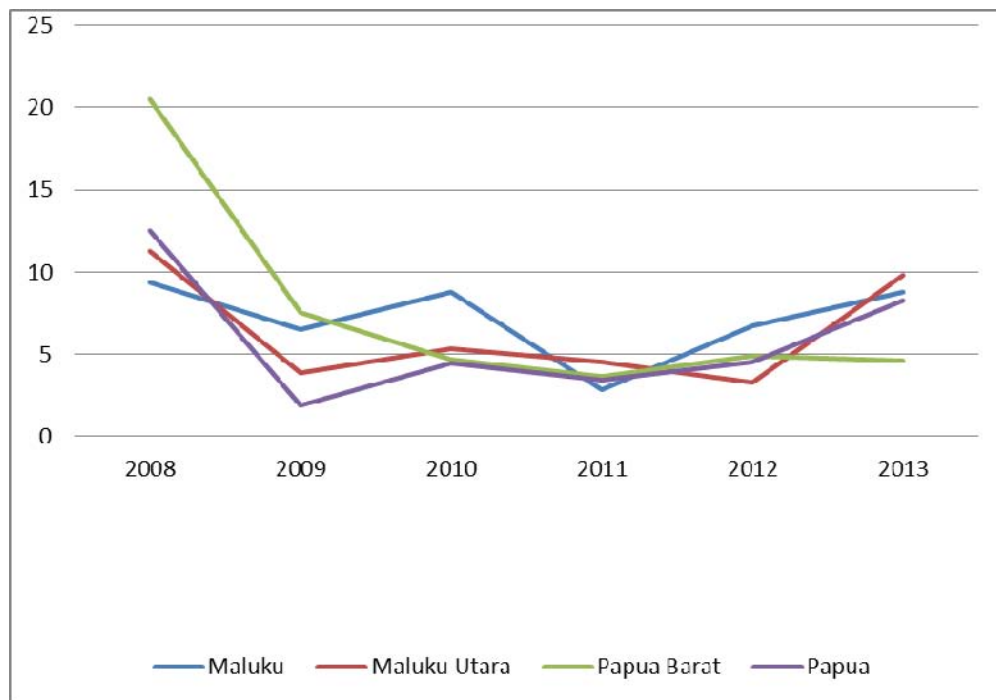


Sumber : BPS, data diolah

Kondisi laju inflasi pada Gambar IV.2.2 menunjukkan tingkat inflasi berdasarkan wilayah waktu Indonesia bagian tengah. Dari gambar tersebut di beberapa provinsi mengalami keadaan inflasi yang berfluktuasi. Hal ini berarti terdapat persamaan dengan gambar sebelumnya. Tingkat inflasi tertinggi terjadi di wilayah provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2008 pada kisaran persentase 15,28%. Sedangkan tingkat inflasi terendah berada dikisaran 0,67% yang dialami oleh provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2011.

Gambar IV.2.3

Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2008-2013



Sumber : BPS, data diolah

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan tingkat inflasi pada gambar IV.2.3 berdasarkan wilayah waktu Indonesia bagian timur. Tingkat inflasi tertinggi berada dikisaran 20,51% yang dialami oleh provinsi Papua Barat pada tahun 2008. Sedangkan tingkat inflasi terendah adalah provinsi Papua dimana berada dikisaran 1,92%.

Berdasarkan data-data yang dilukiskan melalui gambar diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat inflasi tertinggi adalah terjadi pada tahun 2008. Penyebab tingginya inflasi pada tahun 2008 dikarenakan tingginya harga minyak dunia dan harga komoditas pangan. Besarnya tekanan harga komoditas tersebut terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang dengan kisaran masing-masing 3,5% dan 9,2% pada tahun 2008.

Peneliti mencoba menjabarkan lebih lanjut komoditi manakah yang menjadi penyumbang terbesar tingkat inflasi. Berikut akan ditampilkan data mengenai komoditi tersebut dari tahun 2008 hingga 2013.

Komoditi	2008	2009	2010	2011	2012	2013
----------	------	------	------	------	------	------

Tabel IV.2.1
Inflasi Indonesia Menurut Kelompok Pengeularan

Bahan Makanan	16,35	3,88	15,64	3,64	5,68	11,35
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	12,53	7,81	6,96	4,51	6,11	7,45
Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	10,92	1,83	4,08	3,47	3,35	6,22
Sandang	7,33	6,00	6,51	7,57	4,67	0,52
Kesehatan	7,96	3,89	2,19	4,26	2,91	3,70
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	6,66	3,89	3,29	5,16	4,21	3,91
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	7,49	-3,67	2,69	1,92	2,20	15,36
Indeks Umum	11,06	2,78	6,96	3,79	4,30	8,38

Tahun 2008-2013

Sumber : BPS, data diolah

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa inflasi tertinggi menurut kelompok pengeluaran berada di bahan pengeluaran bahan makanan pada tahun 2008 yaitu berada dikisaran 16,35%. Hal ini dikarenakan pada saat itu terjadi kenaikan harga BBM yang langsung berimbas pada bahan makanan. Sedangkan untuk inflasi terendah menurut kelompok pengeluaran berada di komoditi sandang yaitu berada dikisaran 0,52%.

Sementara itu akibat krisis keuangan dan krisis perumahan di Amerika Serikat, berbagai faktor lain juga bermunculan mengiringi ketidakseimbangan global. Selanjutnya anjloknya kurs dollar Amerika Serikat dan memburuknya krisis kredit di negara-negara industri semakin memperburuk keadaan dan menyebabkan perekonomian dunia berada dalam ketidakpastian yang mengkhawatirkan. Meskipun beberapa negara di Eropa dan Jepang, serta sejumlah negara berkembang bisa tetap menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dunia, namun

dampak penurunan perekonomian Amerika Serikat tetap cukup besar dalam mempengaruhi perekonomian global.

Terjadinya krisis global pada tahun 2008 menyebabkan nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS. Hal ini ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga mencapai Rp 11.711 per dolar AS pada bulan November 2008. Pada masa krisis ini terjadi keketatan likuiditas global. Para investor dari Amerika menarik kembali dananya untuk menangani keuangan di negaranya, sehingga terjadi aliran keluar modal asing yang menyebabkan supply dolar relatif sangat menurun.

Kemudian pada tahun 2009, inflasi mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu sebesar 5,41%. Hal ini merupakan penurunan persentase terbesar sepanjang tahun 2006-2012. Pada bulan November tahun 2009 tingkat inflasi Indonesia terlalu rendah mencapai 2,41%. Pada periode suku bunga menurun, dan nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dolar. Harga saham perusahaan sektor properti dan real estate juga rata-rata mengalami penurunan.

Pada tahun 2010, inflasi meningkat kembali. Pada tahun 2011 dan 2012 menurun setiap tahunnya, hingga pada tahun 2012 mencapai angka 4,30%. Rendahnya tingkat inflasi ini didukung oleh faktor musim, harga komoditas pangan yang sedang turun, dan penundaan kenaikan tarif listrik serta harga BBM bersubsidi. Pada tahun 2013 inflasi meningkat kembali, peningkatan inflasi tersebut dikarenakan adanya kenaikan harga diseluruh kelompok pengeluaran. Selain itu didominasi oleh penurunan subsidi BBM dan diperburuk oleh kebijakan perdagangan yang terbatas serta fluktuasi musiman yang terkait dengan perayaan Idul Fitri.

3. Upah Minimum Regional

Upah adalah hak pekerja/buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan kepada pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sesuai Pasal 88 ayat (4). Berikut akan ditampilkan data mengenai peningkatan upah minimum di Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan 2013.

Tabel IV.3.1
Upah Minimum Regional Indonesia Tahun 2008-2013
(dalam Rp)

No.	Provinsi	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Aceh	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.550.000
2	Sumatra Utara	822.205	905.000	965.000	1.035.500	1.200.000	1.375.000
3	Sumatra Barat	800.000	880.000	940.000	1.055.000	1.150.000	1.350.000
4	Riau	800.000	901.600	1.016.000	1.120.000	1.238.000	1.400.000
5	Jambi	724.000	800.000	900.000	1.028.000	1.142.500	1.300.000
6	Sumatra Selatan	743.000	824.730	927.825	1.048.440	1.195.220	1.630.000
7	Bengkulu	690.000	735.000	780.000	815.000	930.000	1.200.000
8	Lampung	617.000	691.000	767.500	855.000	975.000	1.150.000
9	Bangka Belitung	813.000	850.000	910.000	1.024.000	1.110.000	1.265.000
10	Kepulauan Riau	833.000	892.000	925.000	975.000	1.015.000	1.365.087
11	DKI Jakarta	972.605	1.069.865	1.118.009	1.290.000	1.529.150	2.200.000
12	Jawa Barat	568.193	628.191	671.500	732.000	780.000	850.000
13	Jawa Tengah	547.000	575.000	660.000	675.000	765.000	830.000
14	D.I. Yogyakarta	586.000	700.000	745.694	808.000	892.660	947.114
15	Jawa Timur	500.000	570.000	630.000	705.000	745.000	866.250
16	Banten	837.000	917.500	955.300	1.000.000	1.042.000	1.170.000
17	Bali	682.650	760.000	829.316	890.000	967.500	1.181.000
18	NTT	730.000	832.500	890.775	950.000	1.000.000	1.100.000
19	NTB	650.000	725.000	800.000	850.000	925.000	1.010.000
20	Kalimantan Barat	645.000	705.000	741.000	802.500	900.000	1.060.000
21	Kalimantan Tengah	765.868	873.089	986.590	1.134.580	1.327.459	1.553.127
22	Kalimantan Selatan	825.000	930.000	1.024.500	1.126.000	1.225.000	1.337.500
23	Kalimantan Timur	889.654	955.000	1.002.000	1.084.000	1.177.000	1.752.073
24	Sulawesi Utara	845.000	929.500	1.000.000	1.050.000	1.250.000	1.550.000
25	Sulawesi Tengah	670.000	720.000	777.500	827.500	885.000	995.000
26	Sulawesi Selatan	740.520	905.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.440.000
27	Sulawesi Tenggara	700.000	770.000	860.000	930.000	1.032.300	1.125.207
28	Gorontalo	600.000	675.000	710.000	762.500	837.500	1.175.000
29	Sulawesi Barat	760.500	909.400	944.200	1.006.000	1.127.000	1.165.000
30	Maluku	700.000	775.000	840.000	900.000	975.000	1.275.000
31	Maluku Utara	700.000	770.000	847.000	889.350	960.498	1.200.622
32	Papua Barat	1.105.500	1.180.000	1.210.000	1.410.000	1.450.000	1.720.000
33	Papua	1.105.500	1.216.100	1.316.500	1.403.000	1.585.000	1.710.000

Sumber : BPS, data diolah.

Berdasarkan data. diatas menunjukkan tiap tahunnya terjadi peningkatan

UMR diseluruh provinsi di Indonesia, namun besarnya tidak sama. Hal ini

disebabkan karena letak geografis disetiap provinsi berbeda. Upah nominal rata-rata pekerja di Indonesia naik dari Rp. 1.630.193,00 pada bulan Agustus 2012 menjadi Rp. 1.909.478,00 pada bulan Agustus 2013. Upah nominal rata-rata tertinggi bagi pekerja terdapat di sektor pertambangan dan penggalian, diikuti oleh sektor keuangan dan perbankan, upah terendah terdapat di sektor pertanian.

Kenaikan upah minimum provinsi baru-baru ini yang tinggi di Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau, telah mempengaruhi tingkat pertumbuhan upah rata-rata di provinsi-provinsi ini pada tahun 2013. Demikian pula, provinsi dengan tingkat pertumbuhan upah minimum yang lebih rendah juga memiliki tingkat pertumbuhan upah rata-rata yang lebih rendah. Untuk merespon tren pertumbuhan upah, terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa investor lebih suka membuka kantor di daerah-daerah yang memiliki tingkat upah lebih rendah. Sebagai contoh, informasi dari *Better Work* Indonesia menunjukkan bahwa pabrik garmen dengan pengoperasian utama mereka di Jabodetabek kini membuka beberapa pabrik di Semarang, sehingga jumlah pabrik garmen di Semarang meningkat dari 40 pabrik tahun 2012 menjadi 60 pabrik tahun 2013.

Pekerja dengan gelar sarjana diperkirakan memiliki upah rata-rata tertinggi, sebesar Rp 3.443.451,00 pada bulan Agustus 2013, dengan peningkatan sebesar 8,5 persen secara nominal sejak Agustus 2012. Pekerja dengan ijazah juga mengalami pertumbuhan upah nominal dari tahun 2012 hingga 2013, dan terus mendapatkan lebih dari upah rata-rata nasional. Akan

tetapi, pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah menghadapi situasi yang lebih sulit, dengan upah bagi yang tidak sekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah atas tumbuh pada tingkat lebih lambat dibandingkan dengan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi.

Hal ini memprihatinkan karena menunjukkan bahwa sebagian besar pertumbuhan upah adalah di antara pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yang berarti pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah (dan berpendapatan/berpenghasilan rendah) menghadapi masalah secara tak berimbang yang terkait dengan pertumbuhan upah stagnan. Yang dikhawatirkan adalah pekerja dengan pendidikan SMP atau lebih rendah, karena upah nominal rata-rata mereka kurang dari upah minimum nasional rata-rata.

Upah minimum rata-rata provinsi di Indonesia yang memiliki upah minimum tertinggi pada tahun 2013 adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.200.000,00 di posisi kedua ada Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.720.000,00 dan diposisi ke tiga adalah Provinsi Papua sebesar Rp1.710.000,00, sangat tidak mengherankan jika provinsi DKI Jakarta menjadi urutan ke dua yang memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Karena dengan tingkat upah yang paling tinggi menjadi daya ikat yang kuat untuk masyarakat Indonesia yang sedang mencari pekerjaan.

Terjadi peningkatan yang signifikan dalam upah minimum di akhir tahun 2012 di beberapa provinsi terpilih di seluruh Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor terhadap stabilitas harga tetap untuk

melakukan bisnis di Indonesia dan menyebabkan beberapa investor mempertimbangkan relokasi perusahaan dan pilihan melepaskan pekerjaan. Pengusaha telah menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum lebih besar dari peningkatan produktivitas, dan ini dapat berakibat pada penurunan daya saing dan berdampak pada kelangsungan bisnis.

Untuk menetapkan upah minimum provinsi, masing-masing Dewan Pengupahan Provinsi, yang terdiri dari pekerja, pengusaha, dan pemerintah, serta penasihat dari akademisi, melakukan survei untuk menentukan upah yang diperlukan untuk mendapatkan “standar minimum hidup layak” atau “kebutuhan hidup layak “(KHL). Gubernur masing-masing provinsi menetapkan upah minimum provinsi, setelah menerima rekomendasi dari Dewan Pengupahan tingkat Provinsi. Idealnya, upah minimum harus setara dengan KHL. Terlepas dari hal ini, kesenjangan antara KHL dan upah minimum dari waktu ke waktu masih ada.

Namun, tampaknya ada beberapa kemajuan dengan menyempitnya kesenjangan antara KHL rata-rata dan upah minimum rata-rata menjadi 89 persen pada tahun 2013. Perbedaan terbesar antara penilaian KHL dan upah minimum ditemukan di Sumatera Selatan, Bali, dan Kepulauan Maluku pada tahun 2013. Untuk lebih jelasnya berikut adalah data mengenai KHL menurut provinsi tahun 2008 sampai dengan 2013.

Tabel IV.3.2
Kebutuhan Hidup Layak Indonesia Tahun 2008-2013

No.	Provinsi	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Aceh	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.476.145	1.531.459	1.514.383
2	Sumatra Utara	783.000	855.124	916.124	966.000	1.035.028	1.295.000
3	Sumatra Barat	871.000	896.920	979.000	1.099.227	1.153.456	1.384.233
4	Riau	815.665	1.022.669	1.053.000	1.230.491	1.312.888	1.499.378
5	Jambi	734.169	918.121	970.662	1.027.791	1.143.576	1.321.572
6	Sumatra Selatan	1.100.000	929.642	1.031.902	1.060.921	1.311.000	1.757.000
7	Bengkulu	714.750	742.499	788.956	808.031	884.289	1.216.089
8	Lampung	650.000	805.308	861.340	897.600	1.008.109	1.060.082
9	Bangka Belitung	978.720	1.237.000	1.150.500	1.562.000	1.540.330	1.555.206
10	Kepulauan Riau	923.000	1.022.000	1.073.264	1.139.903	1.080.332	1.395.442
11	DKI Jakarta	1.055.276	1.314.059	1.317.710	1.404.829	1.497.838	1.978.789
12	Jawa Barat	614.275	731.680	743.141	874.693	874.693	946.689
13	Jawa Tengah	612.223	793.693	803.985	833.465	833.465	857.728
14	D.I. Yogyakarta	687.132	820.484	750.490	802.335	862.391	924.284
15	Jawa Timur	544.157	706.698	856.888	731.635	731.635	825.000
16	Banten	851.500	917.638	955.708	1.019.875	1.108.000	1.170.000
17	Bali	711.099	956.339	959.232	1.101.766	1.130.779	2.117.000
18	NTT	782.466	909.000	943.404	973.000	1.164.204	1.336.000
19	NTB	727.682	860.000	1.460.099	1.007.000	1.222.088	1.403.700
20	Kalimantan Barat	776.928	803.914	866.250	931.146	1.327.014	1.402.927
21	Kalimantan Tengah	825.000	910.670	947.100	1.095.000	1.720.414	1.919.413
22	Kalimantan Selatan	790.000	947.000	997.000	1.053.379	1.227.000	1.227.547
23	Kalimantan Timur	935.440	1.209.870	1.327.803	1.435.374	1.531.458	1.752.073
24	Sulawesi Utara	802.035	863.731	966.372	935.000	1.077.899	1.291.604
25	Sulawesi Tengah	733.000	915.000	890.000	900.000	900.000	1.036.000
26	Sulawesi Selatan	754.884	1.154.080	1.049.321	1.083.000	1.161.395	1.380.500
27	Sulawesi Tenggara	640.000	823.638	895.188	1.013.769	1.232.820	1.207.648
28	Gorontalo	798.852	889.000	921.647	996.367	1.099.222	1.539.539
29	Sulawesi Barat	850.000	1.126.000	1.258.973	1.381.470	1.381.470	1.403.666
30	Maluku	1.182.556	1.280.599	1.400.990	1.570.980	1.739.000	1.738.676
31	Maluku Utara	1.090.127	1.520.000	1.500.092	1.090.000	1.903.311	1.712.000
32	Papua Barat	1.638.746	1.325.843	1.421.814	1.800.000	1.800.000	2.117.000
33	Papua	1.638.746	1.734.054	1.799.228	1.781.356	1.904.000	2.069.318

Sumber : Ditjen PHI dan Jamsostek, diolah Pusdatinaker

Persoalan upah buruh yang senantiasa tidak mencukupi kebutuhan, mendorong Serikat buruh/serikat pekerja melakukan serangkaian perjuangan untuk memperbaiki kondisi pengupahan yang berlaku saat ini. Perjuangan ini dilakukan baik dalam forum dewan pengupahan maupun melalui aksi unjuk rasa menuntut perbaikan upah dan kesejahteraan buruh. Perjuangan di dewan pengupahan nasional melalui perundingan antara Serikat buruh/serikat pekerja dengan asosiasi pengusaha berjalan penuh dengan perdebatan dan argumentasi yang berkepanjangan sehingga hanya dapat menyepakati 4 buah komponen tambahan pada KHL. Kenaikkan 4 buah komponen ini dirasakan kurang memadai oleh para pimpinan SB/SP dan mereka mengadakan aksi unjuk rasa

⁷⁰Pasal 1 ayat 1 Permenakertrans No 17 Tahun 2005 Tentang ,
1% 14 44 ! 44A A44) 8A - 4B4A !!

[illegible]

besar-besaran menolak hasil kesepakatan tersebut dan menuntut pemerintah menaikkan komponen KHL menjadi 120 buah komponen.

Merespon tuntutan SB/SP tersebut, pemerintah mengeluarkan Kepmenaketrans No 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak pada tanggal 10 Juli 2012. Dalam peraturan ini pemerintah menambah komponen KHL menjadi 60 buah komponen. Dengan demikian terdapat penambahan komponen baru sekitar 14 buah komponen Perubahan KHL dari 46 komponen (Ketentuan lama) menjadi 60 komponen (ketentuan revisi) membawa peningkatan sangat nyata terhadap besaran nilai upah minimum 2013. Rata-rata kenaikan upah minimum untuk tingkat propinsi (kenaikan UMP) sekitar 18,86%.

B. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data panel dan diolah menggunakan program *Eviews 6.0*. *Eviews* digunakan untuk mengolah data statistika dan data ekonometrika, kelebihan dari program ini adalah kemampuannya dalam mengolah data panel menjadi lebih mudah, karena dapat diperlakukan sebagai data *cross section*, *time series*, maupun sebagai data panel.

Model regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga model estimasi, yaitu *common effects*, *fix effects*, dan *random effects*. Untuk menentukan metode panel yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka harus dilakukan beberapa pengujian. Uji Chow dan Uji Hausman merupakan pengujian yang

dapat digunakan dalam menentukan apakah model panel data dapat diregresikan dengan metode *Common Effects (CE)*, metode *Fixed Effects (FE)*, atau metode *Random Effects (RE)*. Untuk menentukan apakah model panel data diregresi dengan metode *Common Effects (CE)* atau dengan metode *Fixed Effect*, maka dilakukan pengujian Chow. Apabila dari hasil uji tersebut ditentukan bahwa metode *Common Effects (CE)* yang digunakan, maka tidak perlu diuji kembali dengan pengujian Hausman. Namun apabila dari hasil uji tersebut ditentukan bahwa metode *Fixed Effects* yang digunakan, maka harus ada uji lanjutan dengan pengujian hausman untuk lebih memilih antara metode *Fixed Effects*, atau metode *Random Effects* yang akan digunakan. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas dari *cross section F* $> 0,05$ maka H_0 diterima, artinya peneliti dapat menggunakan *model common effects* dan pengujian berhenti sampai pada uji Chow. Namun, apabila *cross section F* < 0.05 maka H_0 ditolak yang berarti perlu dilakukan uji selanjutnya yakni uji Hausman.

Tabel IV.4

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: DEWI
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	61.363516	(32,163)	0.0000

Pada tabel terlihat bahwa nilai probabilitas dari *cross section F* adalah $0.0000 < 0.05$ maka H_0 ditolak. Sehingga metode yang digunakan adalah

metode *Fixed Effect* . Oleh karena itu perlu dilakukan uji selanjutnya yakni uji Hausman, yaitu untuk menentukan metode mana yang paling tepat digunakan, apakah metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect*.

Tabel IV.5
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: DEWI

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.122256	2	0.0014

Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai *Chi Square* dengan nilai probabilitas uji Hausman < 0.05 maka dapat disimpulkan H_0 ditolak. Namun apabila nilai probabilitas uji Hausman > 0.05 maka H_0 diterima yang berarti model yang digunakan adalah *model random effects*. Berdasarkan Uji Hausman diatas menunjukkan bahwa besarnya nilai probabilitas Hausman adalah sebesar $0.0014 < 0.05$ maka H_0 ditolak, yang artinya bahwa model yang digunakan ialah model *fixed effects*.

1. Persamaan Regresi

Pengujian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh secara kuantitatif dari Tingkat Inflasi (X1) dan Upah Minimum Regional (X2) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Y).

Berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan, diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut :

Tabel IV.6
Persamaan Regresi

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Date: 07/22/14 Time: 07:13
Sample: 2008 2013
Included observations: 6
Cross-sections included: 33
Total pool (balanced) observations: 198

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	61.80260	4.476384	13.80637	0.0000
X1?	0.027495	0.018080	1.520784	0.1303
X2?	-4.047774	0.323388	-12.51678	0.0000

Analisis yang digunakan memiliki jumlah variabel bebas yang diteliti lebih dari satu untuk menganalisis pengaruh antara variabel terikat dengan variabel bebasnya. Dari tabel di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{TPT} = 61.80260 + 0.027495 X_1 - 4.047774 \text{Ln}X_2 + \mu$$

$a = 61.80260$ yang berarti jika tingkat inflasi dan upah minimum regional adalah 0, maka tingkat pengangguran terbuka akan mengalami perubahan sebesar 61.80 %.

$b_1 = 0.027495$ yang berarti jika tingkat inflasi meningkat sebesar 1% maka pengangguran terbuka akan bertambah sebesar 2.74%

$b_2 = 4.047774$ yang berarti jika upah minimum meningkat sebesar 1% maka tingkat pengangguran terbuka akan menurun sebesar 4.04%.

Selanjutnya, setelah dilakukan pengujian ketepatan model regresi data panel dengan uji F, yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian signifikansi pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji t beserta interpretasi variabel yang signifikan memengaruhi variabel dependen. Setelah itu dilakukan pengujian *goodness of fit* terhadap model data panel melalui besaran nilai Koefisien Determinasi (*R-square adjusted*). Hasil dari ketiga tahapan ini ialah sebagai berikut:

2. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara probabilitas dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah apabila probabilitasnya (signifikansi) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) $\geq 0,05$ maka H_0 diterima. Dapat pula dilihat dari t hitung $> t$ tabel, dengan $\alpha=5\%$ dan derajat kebebasan (df) = $n-k-1$ atau $198-2-1=195$ sehingga diperoleh t tabel sebesar 1,97220.

Tabel IV.7**Hasil Uji t**

Dependent Variable: Y?

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/22/14 Time: 07:13

Sample: 2008 2013

Included observations: 6

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 198

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	61.80260	4.476384	13.80637	0.0000
X1?	0.027495	0.018080	1.520784	0.1303
X2?	-4.047774	0.323388	-12.51678	0.0000

Hipotesis 1:

❖ H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Tingkat Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka.

❖ H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Tingkat Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka.

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel Inflasi memiliki probabilitas sebesar 0.1303 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% ($0.1303 > 0.05$) serta nilai t hitung $<$ t tabel ($1.520784 < 1,97220$) yang artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa Inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengangguran secara parsial. Dalam hal ini, pengaruh dari variabel Inflasi adalah berpengaruh positif terhadap variabel Pengangguran karena nilai

koefisien dari variabel Infasi adalah bertanda positif, yaitu sebesar 0.027495 pada konstanta 61.80260.

Hipotesis 2:

- ❖ H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Upah Minimum terhadap Pengangguran Terbuka.
- ❖ H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Upah Minimum Regional terhadap Pengangguran Terbuka.

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel UMR memiliki probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,0000 < 0,05$) serta nilai t hitung $>$ t tabel ($12.51678 > 1,97220$) yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa UMR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengangguran secara parsial. Dalam hal ini, pengaruh dari variabel UMR adalah berpengaruh positif terhadap variabel Pengangguran karena nilai koefisien dari variabel UMR adalah bertanda negatif yaitu sebesar -4.047774 pada konstanta 61.80260.

b. Uji F

Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi data panel yang digunakan telah tepat untuk menjelaskan

pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Adapun hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Hipotesis:

- ❖ H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Inflasi dan UMR terhadap Pengangguran pada periode 2008-2013.
- ❖ H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Inflasi dan UMR terhadap Pengangguran pada periode 2008-2013.

Kriteria untuk uji F ini adalah apabila probabilitas (signifikansi) $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ maka H_0 diterima, artinya bahwa minimal terdapat satu variabel independen yang memengaruhi variabel dependen secara signifikan.. Serta dengan melihat $F_{hitung} > F_{tabel}$ yakni df_1 (jumlah variabel-1) dan df_2 ($n-k-1$) dimana n ialah jumlah observasi sehingga didapat F_{tabel} sebesar 3.04. Adapun hasil uji F disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel IV.8

Uji F

R-squared	0.923443	Mean dependent var	6.279242
Adjusted R-squared	0.907474	S.D. dependent var	2.628432
S.E. of regression	0.799518	Akaike info criterion	2.549404
Sum squared resid	104.1944	Schwarz criterion	3.130663
Log likelihood	-217.3910	Hannan-Quinn criter.	2.784678
F-statistic	57.82744	Durbin-Watson stat	1.607818
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari hasil uji F (simultan) pada tabel di atas, dapat diketahui nilai dari probabilitas (F-statistik) sebesar 0,000000 dimana nilai probabilitas ini berada dibawah nilai signifikansi sebesar 5% ($0,000000 < 0,05$) serta $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ yakni $57.82744 > 3.04$. Dapat disimpulkan bahwa hasil uji F (simultan) menolak H_0 , artinya bahwa variabel Inflasi dan UMR memiliki pengaruh secara simultan terhadap tingkat pengangguran pada periode 2008-2013.

3. Analisis Koefisien Determinasi (Uji R)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya (*goodness of fit*). Koefisien determinasi ini mengukur presentase total variasi variabel dependen Y yang dijelaskan oleh variabel independen di dalam garis regresi.

Tabel IV.9

Uji R

R-squared	0.923443	Mean dependent var	6.279242
Adjusted R-squared	0.907474	S.D. dependent var	2.628432
S.E. of regression	0.799518	Akaike info criterion	2.549404
Sum squared resid	104.1944	Schwarz criterion	3.130663
Log likelihood	-217.3910	Hannan-Quinn criter.	2.784678
F-statistic	57.82744	Durbin-Watson stat	1.607818
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari tabel di atas diperoleh koefisien determinasi atau *Adjusted R Square* adalah 0.907474 artinya 90,74% variabel pengangguran variasinya dapat dijelaskan oleh seluruh variabel inflasi dan upah

minimum regional, sedangkan sisanya sebesar 9,26% dijelaskan oleh variabel diluar variabel yang digunakan dalam penelitian.

4. Uji Persyaratan Analisis

a. Uji Normalitas

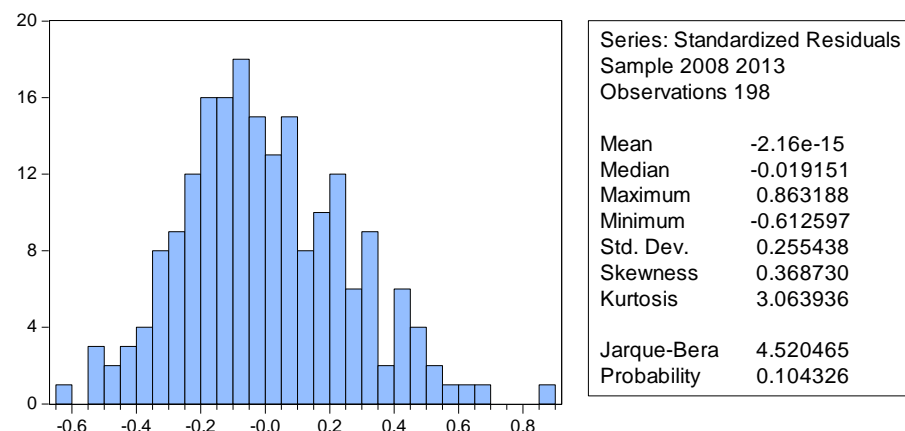
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Model estimasi yang baik memiliki data berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam model regresi, pengujian uji normalitas dilakukan terhadap data residual. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dalam penelitian ini menggunakan uji *Jarque-Berra*. Dimana hipotesis pada uji *Jarque-Berra* adalah sebagai berikut:

- H_0 : Residual berdistribusi normal
- H_1 : Residual tidak berdistribusi normal

Apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari $\alpha=5\%$, maka menerima H_0 yang artinya residual data berdistribusi normal.

Gambar IV.3

Uji Normalitas



Grafik distribusi normal ini dapat dilihat dari bentuk grafik yang disistribusikan secara simetris. Berdasarkan tabel di atas, hasil pengolahan data yang dilakukan dapat dilihat bahwa residual data berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi normalitas. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas statistik uji *Jarque-Berra* untuk nilai residual yaitu 0,104326 sehingga H_0 diterima. Artinya bahwa data residual berdistribusi normal.

C. Pembahasan

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada periode waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 terhadap 33 Provinsi di Indonesia, yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara tingkat inflasi dan upah minimum regional terhadap pengangguran terbuka, penelitian ini menghasilkan persamaan regresi data panel yang dapat dilihat persamaannya sebagai berikut:

$$\text{TPT} = 61.80260 + 0.027495 X_1 - 4.047774 \text{Ln}X_2 + \mu$$

Nilai konstanta sebesar 61.80260 menunjukkan bahwa jika tingkat inflasi dan upah minimum regional adalah 0, maka rata-rata tingkat pengangguran akan mengalami peningkatan sebesar 61.86 %. Peneliti dalam hal ini menggunakan model-model estimasi, dimana berdasarkan hasil penelitian model terbaik yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah model *Fixed Effects*.

1. Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia

Berdasarkan hasil uji t (parsial variabel Inflasi memiliki probabilitas sebesar 0.1303 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% ($0.1303 > 0.05$) serta nilai t hitung $< t$ tabel ($1.520784 < 1,97220$) yang artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran secara parsial. Dalam hal ini, pengaruh dari variabel inflasi adalah berpengaruh positif terhadap variabel pengangguran karena nilai koefisien dari variabel inflasi adalah bertanda positif, yaitu sebesar 0.027495. Nilai konstanta sebesar 0.027495 menunjukkan bahwa jika upah minimum regional adalah 0, maka rata-rata tingkat pengangguran akan mengalami peningkatan sebesar 2,75% pada konstanta 61.80260. Dengan demikian, tingkat inflasi tidak mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia dan tidak mengikuti hubungan yang digambarkan dalam kurva Philips.

Dalam kurva Philips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja.

Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) maka pengangguran akan berkurang.

Dengan menggunakan pendekatan kurva Philips maka hubungan antara pengangguran dengan tingkat inflasi untuk kasus Indonesia kurang tepat. Hal ini didasarkan pada hasil data antara tingkat inflasi dan pengangguran di Indonesia tahun 2008 sampai tahun 2013 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan. Di Indonesia adanya kenaikan harga-harga atau inflasi pada umumnya disebabkan karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM), bukan karena kenaikan permintaan. Dengan alasan inilah, maka tidaklah tepat bila perubahan tingkat pengangguran di Indonesia dihubungkan dengan inflasi.

Akan lebih tepat bila tingkat pengangguran dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Sebab, pertumbuhan ekonomi merupakan akibat dari adanya peningkatan kapasitas produksi yang merupakan turunan dari peningkatan investasi. Jadi jelas bahwa, pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan peningkatan penggunaan tenaga kerja, begitupula dengan investasi. Dengan meningkatnya investasi pasti permintaan tenaga kerja akan bertambah, sehingga dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan adanya peningkatan investasi berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran, dengan asumsi investasi tidak bersifat padat modal. Hasil tersebut selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Shun Hajji dan Nugroho SBM bahwa hasil penelitian ini

menunjukkan pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bernilai positif dan tidak signifikan.⁷²

2. Pengaruh Upah Minimum Regional Terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia

Pada variabel upah minimum regional memiliki probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,0000 < 0,05$) serta nilai t hitung $>$ t tabel ($12.51678 > 1,97220$) yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa upah minimum regional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran secara parsial. Dalam hal ini, pengaruh dari variabel upah minimum regional adalah berpengaruh negatif terhadap variabel pengangguran karena nilai koefisien dari variabel upah minimum regional adalah bertanda negatif yaitu sebesar -4.047774. Nilai konstanta sebesar 4.047774 menunjukkan jika tingkat inflasi adalah 0, maka rata-rata tingkat pengangguran akan mengalami peningkatan sebesar 4.04% pada konstanta 61.80260.

Hubungan antara tingkat upah yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dikemukakan oleh Bruce E Kaufman dan Julie L Hotchkiss. Tenaga kerja yang menetapkan upah tertentu sebagai upah minimum maka jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya di bawah tingkat upah tersebut, seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut dan menyebabkan

⁷² Muhammad Shun Hajji dan Nugroho SBM, Analisis PDRB, Inflasi, UMR, dan Angka Melek Huruf Terhadap TPT di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990-2011, Universitas Diponegoro Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013, p. 1-10

pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah maka akan berakibat pada tingginya tingkat pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut.⁷³

Hubungan antara upah minimum regional dengan tingkat pengangguran pada penelitian ini adalah negatif, dimana ketika upah naik menyebabkan pengangguran berkurang, begitu pula sebaliknya. Maka dapat disimpulkan bahwasannya terdapat perbedaan dengan pengajuan hipotesis yang peneliti ajukan. Dimana peneliti menulis hubungan antara upah minimum regional dan tingkat pengangguran terbuka adalah positif.

Alasan yang menyebabkan hubungan antara upah minimum regional dengan pengangguran negatif karena masyarakat di Indonesia beranggapan bahwa upah minimum yang diterima itu adalah upah terendah yang akan diterima oleh pencari kerja, hal ini akan mempengaruhi seseorang untuk menganggur dalam waktu tertentu untuk mencari pekerjaan terbaik dengan asumsi akan mendapatkan upah tertinggi. Dan jika tenaga kerja menetapkan upah tertentu sebagai upah minimum yang diterima, maka jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut maka seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut.

Berarti dengan kata lain meningkatnya upah maka dorongan untuk mencari pekerjaan/bekerja oleh penduduk semakin banyak sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Hasil ini selaras dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Novlin Sirait dan A. Ain Marhaeni

⁷³Kaufman dan Hotckiss, op.cit. p.345

bahwa hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh upah minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bernilai negatif dan signifikan.⁷⁴

3. Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Upah Minimum Regional Terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia

Berdasarkan hasil uji F (simultan) dapat diketahui nilai dari probabilitas (F-statistik) sebesar 0.000000 dimana nilai probabilitas ini berada dibawah nilai signifikansi sebesar 5% ($0.000000 < 0,05$) serta $F_{hitung} > F_{tabel}$ yakni $57.82744 > 3.04$. Dapat disimpulkan bahwa hasil uji F (simultan) menolak H_0 , artinya bahwa variabel tingkat inflasi dan upah minimum memiliki pengaruh secara simultan terhadap pengangguran di Indonesia pada periode 2008-2013.

Berdasarkan hasil koefisien determinasi atau *Adjusted R Square* adalah 0.907474 artinya 90.74% variabel pengangguran variasinya dapat dijelaskan oleh seluruh variabel inflasi dan upah minimum regional, sedangkan sisanya sebesar 9,26% dijelaskan oleh variabel diluar variabel yang digunakan dalam penelitian.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang diungkapkan oleh Profesor Pigou menyatakan bahwa setiap kenaikan biaya hidup, berapa pun kecilnya berkaitan dengan upah uang akan mengakibatkan mundurnya dari

⁷⁴ Novlin Sirait dan A. Ain Marhaeni , Analisis Beberapa Faktor yang Berpengaruh Terhadap Jumlah Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, E-Jurnal EP Unud, 2 [2], ISSN: 2303-0178, Tahun 2013, p. 108-118

pasar tenaga kerja sejumlah pekerja sebanyak lebih besar daripada semua orang pengangguran yang ada.

Maksud dari asumsi Profesor Pigou adalah kenaikan akan biaya hidup ditimbulkan karena kenaikan inflasi. Dengan kenaikan inflasi tersebut mendorong para pekerja menuntut kenaikan upah atau gaji. Akibatnya pemerintah membuat kebijakan untuk menaikkan upah minimum, selanjutnya berdampak pada kenaikan upah. Dengan kenaikan upah tersebut, keuntungan perusahaan merosot dan ada yang menderita rugi. Maka sebagai akibat tuntutan kenaikan upah dan gaji serta kerugian yang ditimbulkannya, para pengusaha mengurangi pemakaian jumlah tenaga kerja dan pengangguran meningkat kembali.

Berdasarkan uji asumsi klasik yaitu normalitas, heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa tingkat inflasi dan upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran dengan menggunakan uji *Jarque-Berra* memiliki distribusi normal dengan probabilitas $0,104326 > 0.05$.

D. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak sepenuhnya sampai pada tingkat kebenaran mutlak. Hal ini disebabkan karena masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, diantaranya adalah :

1. Kategori pengangguran selama ini sangat bias. Pengangguran terbuka yang selama ini dijadikan acuan sebagai tingkat pengangguran di

Indonesia belum bisa menggambarkan secara penuh keadaan tingkat pengangguran

2. Permasalahan pengangguran yang tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan upah minimum saja, namun juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non ekonomi lainnya.
3. Keterbatasan ilmu, waktu, biaya dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti, sehingga mempengaruhi ketepatan peneliti dalam mengelola dan menginterpretasikan data yang diperoleh.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apakah terdapat pengaruh antara tingkat inflasi dan upah minimum regional dengan tingkat pengangguran terbuka. Penelitian guna mendapatkan data jumlah pengangguran, tingkat inflasi, dan upah minimum regional dilakukan pada Badan Pusat Statistik yang berkantor pusat di Jalan Sutomo No.8 Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh tingkat inflasi dan upah minimum regional terhadap pengangguran terbuka di Indonesia, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Tidak terdapat pengaruh antara tingkat inflasi dengan pengangguran di Indonesia serta arah hubungannya menunjukkan positif, yaitu jika tingkat inflasi tinggi maka tingkat pengangguran akan tinggi, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dengan kurva Philips dimana terjadi trade off antara inflasi dengan pengangguran.
2. Upah minimum regional memiliki hubungan yang negatif terhadap pengangguran di Indonesia tahun 2008 hingga 2013. Masyarakat di Indonesia beranggapan bahwa upah minimum yang diterima itu adalah upah

terendah yang akan diterima oleh pencari kerja, hal ini akan mempengaruhi seseorang untuk menganggur dalam waktu tertentu untuk mencari pekerjaan terbaik dengan asumsi akan mendapatkan upah tertinggi. Dan jika tenaga kerja menetapkan upah tertentu sebagai upah minimum yang diterima, maka jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut maka seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut.

3. Tingkat inflasi dan upah minimum regional secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.
4. Berdasarkan uji koefisien determinasi dapat disimpulkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh tingkat inflasi dan upah minimum regional terhadap pengangguran sebesar 90.74%. Artinya masih ada faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pengangguran sebesar 9,26%.

B. Implikasi

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat inflasi tidak menunjukkan pengaruhnya yang berarti terhadap pengangguran. Dalam suatu waktu dimana pemerintah ingin mengusahakan pengangguran yang lebih rendah atau menurun maka dijalankannya kebijakan fiskal dan moneter. Pengeluaran agregat bertambah dan mendorong perusahaan untuk menambah produksi dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Lebih banyak tenaga kerja yang digunakan dan pengangguran turun, tetapi inflasi meningkat. Namun meskipun begitu tetap masih terdapat pengangguran. Pengangguran yang terjadi disaat periode tertentu perekonomian mengalami perkembangan

yang pesat, dimana adanya para pekerja yang ingin mencari pekerjaan yang lebih baik.

Kemudian kenaikan inflasi yang terjadi mendorong para pekerja menuntut kenaikan upah dan gaji. Keuntungan perusahaan merosot dan ada yang menderita kerugian. Maka sebagai akibat tuntutan kenaikan upah dan gaji serta kerugian yang ditimbulkannya, para pengusaha mengurangi jumlah tenaga kerja dan pengangguran meningkat.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran antara lain :

1. Masalah pengangguran memang sudah menjadi masalah klasik yang terjadi di Indonesia. Dirasa masalah ini masih sulit untuk dituntaskan. Untuk mengurangi pengangguran mungkin dapat dilakukan dengan cara menjaga kestabilan tingkat inflasi dan perhatian khusus dalam penyusunan upah.
2. Inflasi yang sudah berkembang cepat perlu ditanggulangi secara cepat namun hal ini akan dibarengi dengan timbulnya angka pengangguran yang tinggi, dan alternatif lain yang dapat dilakukan yaitu inflasi ditanggulangi dengan perlahan dan dibarengi dengan tingkat pengangguran yang rendah. tindakan yang diambil dapat dengan mengurangi jumlah uang beredar, dan dapat pula dengan insentif perpajakan dan kebijakan penghematan, atau dengan campuran dari semua kebijakan itu. Apabila inflasi dapat

dikendalikan berarti itu sebuah kesuksesan dalam perekonomian, tetapi hal ini harus diimbangi dengan penurunan suku bunga, sehingga nantinya akan meningkatkan investasi, dan juga memacu meningkatnya ekspor. Peningkatan investasi juga bisa menambah kesempatan kerja yang ada sehingga pengangguran dapat berkurang.

3. Upah minimum memiliki keterkaitan yang kuat dengan jumlah pengangguran, bahwa seharusnya dalam penentuan upah harus di musyawarahkan antara pengusaha dan pegawai, upah yang baik adalah di mana pekerja menerima upah yang lebih jika perusahaan mendapat keuntungan, dengan pembayaran upah yang lebih besar bisa membuat pekerja meningkat kesejahteraan pekerja, dengan meningkatnya kesejahteraan pekerja, maka produktivitas pun akan meningkat, hal ini dapat meningkatkan produksi dan menguntungkan perusahaan. Akan tetapi, jika perusahaan mengalami kerugian, perusahaan cukup membayar upah pegawai tidak di bawah upah minimum yang ditetapkan.
4. Dari segi tenaga kerja sebaiknya dapat meningkatkan produktivitasnya. Karena dengan tuntutan kenaikan upah dan gaji tanpa adanya perbaikan produktivitas akan menyebabkan pengangguran naik. Budaya persaingan normatif harus ditumbuhkan sebagai persyaratan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Serta dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan di semua kalangan masyarakat. Dengan berpendidikan tinggi dan terlatih serta memiliki kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan akan mengurangi jumlah pengangguran yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Imamul dan Giana Hadi W. **Membuka Cakrawala Ekonomi**. Jakarta : PT. Grafindo Media Pratama. 2005.
- Arifin, Immanuel. **Membuka Cakrawala Ekonomi Untuk Kelas X SMA dan MA**. Bandung : PT. Setia Purna Inves. 2007.
- Badan Pusat Statistik. **Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia**. Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2008.
- Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)
- Boediono. **Ekonomi Moneter Edisi Tiga**. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta. 2005.
- Duwi Priyatno. **Buku Saku SPSS Analisis Statistik Data**. Jakarta: MediaKom. 2011.
- Dewi Rachmat Kusuma. **Kebijakan Upah Minimum Indonesia**. (www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed.../wcms_210427.pdf)
- Ghozali, Imam. **Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17**. Semarang: Universitas Diponegoro. 2007
- H. Makaliwe. Willem **Teori Umum Mengenai Kesempatan Kerja, Bunga, dan Uang**. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 1992.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Pengangguran>
- Kaufman., Bruce E., dan Julie L Hotchkiss., **The Economic Labor Markets**. USA: Georgia State University. 1999.
- Mulia Nasution, SE.,. **Teori Ekonomi Makro Pendekatan Pada Perekonomian Indonesia**. Jakarta : Djambatan. 1997.
- Maikel Jefriando. **Ekonomi RI Tumbuh 5,7% di 2013, Tapi Pengangguran Belum Bisa Diatasi**. (<http://finance.detik.com/read/2014/02/05/191226/2488489/4/ekonomi-ri-tumbuh-57-di-2013-tapi-pengangguran-belum-bisa-diatasi>)
- Muhammad Shun Hajji, **Analisis PDRB, Inflasi, dan Upah Minimum Provinsi, dan Angka Melek Huruf terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990-2011**, Universitas Diponegoro : Jurnal ISSN. Vol 2 No. 3 Tahun 2013, p. 1-10
- Ni Putu Sucitrawati dan Sudarsana Arka, **Pengaruh Inflasi, Investasi, dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran di Bali**, Universitas Udayana : Jurnal IESP, Vol. 2 No. 2, Tahun 2013, p.51-62
- Nanga, Muana. **Makro Ekonomi Teori, Masalah, dan Kebijakan Edisi Kedua**. Jakarta : PT. Raja grafindo Persada. 2005.
- Nachrowi Djalal Nachrowi. **Penggunaan Teknik Ekonometrika**. Jakarta: Raja Grafindo persada. 2008.
- Nopirin. **Ekonomi Moneter Edisi Pertama**. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta. 2009.
- Organisasi.org Komunitas dan Perpustakaan Online Indonesia, **Pengertian Pengangguran dan Jenis/macam Pengangguran : Friksional, Strukturan, Musiman, dan Siklikal, Desember 2007**

(<http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-pengangguran-dan-jenis-macam-pengangguran-friksional-struktural-musiman-siklikal.html>)

- Raharja, Prathama dan Mandala Manurun. **Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar**. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004.
- Rudiger D, Stanle F, dan Richard S. **Makro Ekonomi Edisi 8**, Jakarta : PT. Media Global Edukasi. 2004.
- REP. **Tahun 2013, Pengangguran di Indonesia Melonjak**. (<http://ekonomi.kompasiana.com/wirusaha/2013/11/07/tahun-2013-pengangguran-di-indonesia-melonjak-605967.html>)
- Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, J. Mulyadi. **Makro Ekonomi**. Jakarta : Erlangga. 2000.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. **Makro Ekonomi Edisi Tujuh Belas**. Jakarta: PT. Media Global Edukasi. 2004.
- Sarwoko. **Dasar-dasar Ekonometrika**. Yogyakarta: ANDI. 2005.
- Sukirno, Sadono. **Makroekonom Teori Pengantar edisi Ketiga**. Jakarta : Rajawali Pers. 2012
- Subchan. “Dampak Krisis Moneter Terhadap Masalah Pengangguran Di Indonesia dan Kebijakan Alternatif Mengatasinya”. **Jurnal Ekonomi Manajem dan Akuntansi**, Vol. 5. 1999.
- William H. Greene. **Econometric Analisis**. New York : New York University. 2002.

<http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/viewpdf.php?id=145>

<http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id/viewpdf.php?id=190>

Lampiran I

**DATA TINGKAT PENGANGGURAN, TINGKAT INFLASI DAN UPAH MINIMUM
REGIONAL TAHUN 2008-2013**

Provinsi	Tahun	Pengangguran	Inflasi	UMR
_Aceh	2008	9.56	10.27	1000000
	2009	8.71	3.5	1200000
	2010	8.37	4.64	1300000
	2011	7.43	3.32	1350000
	2012	9.1	0.06	1400000
	2013	10.3	6.39	1550000
_Sumut	2008	9.1	10.63	822205
	2009	8.45	1.59	905000
	2010	7.43	7.65	965000
	2011	6.37	3.54	1035500
	2012	6.2	3.79	1200000
	2013	6.53	10.09	1375000
_Sumbar	2008	8.04	12.68	800000
	2009	7.97	2.05	880000
	2010	6.95	7.84	940000
	2011	6.45	5.37	1055000
	2012	6.52	4.16	1150000
	2013	6.99	10.87	1350000
_Riau	2008	8.2	9.02	800000
	2009	8.56	1.94	901600
	2010	8.72	7	1016000
	2011	5.32	5.09	1120000
	2012	4.3	3.35	1238000
	2013	5.5	8.83	1400000
_Jambi	2008	5.14	11.57	724000
	2009	5.54	1.85	800000
	2010	5.39	10.52	900000
	2011	4.02	2.76	1028000
	2012	3.22	4.22	1142500
	2013	4.84	8.74	1300000
_Sumsel	2008	8.08	11.15	743000
	2009	7.61	2.88	824730
	2010	6.65	6.02	927825
	2011	5.77	3.78	1048440
	2012	5.7	2.72	1195220
	2013	5	7.04	1630000
_Bengkulu	2008	4.9	13.44	690000

	2009	5.08	4.18	735000
	2010	4.59	9.08	780000
	2011	2.37	3.96	815000
	2012	3.61	4.61	930000
	2013	4.74	9.94	1200000
_Lampung	2008	7.15	14.82	617000
	2009	6.62	4.18	691000
	2010	5.57	9.95	767500
	2011	5.78	4.24	855000
	2012	5.18	4.3	975000
	2013	5.85	7.56	1150000
_Belitung	2008	5.99	18.4	813000
	2009	6.14	1.88	850000
	2010	5.63	9.36	910000
	2011	3.61	5	1024000
	2012	3.49	6.57	1110000
	2013	3.7	8.71	1265000
_Kepri	2008	8.01	11.9	833000
	2009	8.11	1.43	892000
	2010	6.9	6.17	925000
	2011	7.8	3.32	975000
	2012	5.37	3.92	1015000
	2013	6.25	10.09	1365087
_Jakarta	2008	12.16	11.11	972605
	2009	12.15	2.34	1069865
	2010	11.05	6.21	1118009
	2011	10.8	3.97	1290000
	2012	9.87	4.52	1529150
	2013	9.02	8	2200000
_Jabar	2008	12.08	10.23	568193
	2009	10.96	2.11	628191
	2010	10.33	4.53	671500
	2011	9.83	2.75	732000
	2012	9.08	4.02	780000
	2013	9.22	7.97	850000
_Jateng	2008	7.35	10.34	547000
	2009	7.33	5.83	575000
	2010	6.21	7.11	660000
	2011	5.93	2.87	675000
	2012	5.63	4.85	765000
	2013	6.02	8.19	830000
_Yogyakarta	2008	5.38	9.88	586000
	2009	6	3.6	700000
	2010	5.69	7.38	745694
	2011	3.97	3.88	808000
	2012	3.97	4.31	892660

	2013	3.34	7.32	947114
_Jatim	2008	6.42	8.73	500000
	2009	5.08	3.39	570000
	2010	4.25	7.33	630000
	2011	4.16	4.72	705000
	2012	4.12	4.39	745000
	2013	4.33	7.52	866250
_Banten	2008	15.18	11.47	837000
	2009	14.97	2.88	917500
	2010	13.68	6.1	955300
	2011	13.06	3.45	1000000
	2012	10.13	4.37	1042000
	2013	9.9	9.65	1170000
_Bali	2008	3.31	9.25	682650
	2009	3.13	4.37	760000
	2010	3.06	8.1	829316
	2011	2.32	3.75	890000
	2012	2.04	4.71	967500
	2013	1.79	7.35	1181000
_NTB	2008	6.13	13.01	730000
	2009	6.25	3.14	832500
	2010	5.29	11.07	890775
	2011	5.33	6.38	950000
	2012	5.26	4.1	1000000
	2013	5.38	9.27	1100000
_NTT	2008	3.73	10.9	650000
	2009	3.97	6.49	725000
	2010	3.34	9.97	800000
	2011	2.69	4.32	850000
	2012	2.89	5.1	925000
	2013	3.16	8.84	1010000
_Kalbar	2008	5.41	11.19	645000
	2009	5.44	4.91	705000
	2010	4.62	8.52	741000
	2011	3.88	4.91	802500
	2012	3.48	6.62	900000
	2013	4.03	9.48	1060000
_Kalteng	2008	4.59	11.65	765868
	2009	4.62	2.85	873089
	2010	4.14	9.49	986590
	2011	2.55	5.28	1134580
	2012	3.17	6.73	1327459
	2013	3.09	6.45	1553127
_Kalsel	2008	6.18	11.62	825000
	2009	6.36	3.86	930000
	2010	5.25	9.09	1024500

	2011	5.23	3.98	1126000
	2012	5.25	5.96	1225000
	2013	3.79	6.98	1337500
_Kaltim	2008	11.11	13.06	889654
	2009	10.83	4.3	955000
	2010	10.1	7.28	1002000
	2011	9.84	6.35	1084000
	2012	8.9	5.6	1177000
	2013	8.04	9.65	1752073
_Sulut	2008	10.65	9.71	845000
	2009	10.56	2.31	929500
	2010	9.61	6.28	1000000
	2011	8.62	0.67	1050000
	2012	7.79	6.04	1250000
	2013	6.68	8.12	1550000
_Sulteng	2008	5.45	10.4	670000
	2009	5.43	5.73	720000
	2010	4.61	6.4	777500
	2011	4.01	4.47	827500
	2012	3.93	5.87	885000
	2013	4.27	7.57	995000
_Sulsel	2008	9.04	11.79	740520
	2009	8.9	3.24	905000
	2010	8.37	6.82	1000000
	2011	6.56	2.87	1100000
	2012	5.87	4.57	1200000
	2013	5.1	6.24	1440000
_Sultengga	2008	5.73	15.28	700000
	2009	4.74	4.6	770000
	2010	4.61	3.87	860000
	2011	3.06	5.09	930000
	2012	4.04	5.25	1032300
	2013	4.46	5.92	1125207
_Gorontalo	2008	5.65	9.2	600000
	2009	5.89	4.35	675000
	2010	5.16	7.43	710000
	2011	4.26	4.08	762500
	2012	4.36	5.31	837500
	2013	4.12	5.84	1175000
_Sulbar	2008	4.57	11.66	760500
	2009	4.51	1.78	909400
	2010	3.25	5.12	944200
	2011	2.82	4.91	1006000
	2012	2.14	3.28	1127000
	2013	2.33	5.91	1165000
_Maluku	2008	10.67	9.34	700000

	2009	10.57	6.48	775000
	2010	9.97	8.78	840000
	2011	7.38	2.85	900000
	2012	7.51	6.73	975000
	2013	9.75	8.81	1275000
_Malukut	2008	6.48	11.25	700000
	2009	6.76	3.88	770000
	2010	6.03	5.32	847000
	2011	5.55	4.52	889350
	2012	4.76	3.29	960498
	2013	3.86	9.78	1200622
_Papbar	2008	7.65	20.51	1105500
	2009	7.56	7.52	1180000
	2010	7.68	4.68	1210000
	2011	8.94	3.64	1410000
	2012	5.49	4.88	1450000
	2013	4.62	4.63	1720000
_Papua	2008	4.39	12.55	1105500
	2009	4.08	1.92	1216100
	2010	3.55	4.48	1316500
	2011	3.94	3.4	1403000
	2012	3.63	4.52	1585000
	2013	3.23	8.27	1710000

Lampiran 2

**DATA TINGKAT PENGANGGURAN, TINGKAT INFLASI DAN UPAH MINIMUM
REGIONAL TAHUN 2008-2013 (Ln)**

Provinsi	Tahun	Pengangguran	Inflasi	UMR (Ln)
_Aceh	2008	9.56	10.27	13.81551
	2009	8.71	3.5	13.99783
	2010	8.37	4.64	14.07787
	2011	7.43	3.32	14.11562
	2012	9.1	0.06	14.15198
	2013	10.3	6.39	14.25377
_Sumut	2008	9.1	10.63	13.61975
	2009	8.45	1.59	13.71569
	2010	7.43	7.65	13.77988
	2011	6.37	3.54	13.85039
	2012	6.2	3.79	13.99783
	2013	6.53	10.09	14.13396
_Sumbar	2008	8.04	12.68	13.59237
	2009	7.97	2.05	13.68768
	2010	6.95	7.84	13.75364
	2011	6.45	5.37	13.86905
	2012	6.52	4.16	13.95527
	2013	6.99	10.87	14.11562
_Riau	2008	8.2	9.02	13.59237
	2009	8.56	1.94	13.71193
	2010	8.72	7	13.83138
	2011	5.32	5.09	13.92884
	2012	4.3	3.35	14.02901
	2013	5.5	8.83	14.15198
_Jambi	2008	5.14	11.57	13.49255
	2009	5.54	1.85	13.59237
	2010	5.39	10.52	13.71015
	2011	4.02	2.76	13.84313
	2012	3.22	4.22	13.94873
	2013	4.84	8.74	14.07787
_Sumsel	2008	8.08	11.15	13.51845
	2009	7.61	2.88	13.62281
	2010	6.65	6.02	13.7406
	2011	5.77	3.78	13.86281
	2012	5.7	2.72	13.99384
	2013	5	7.04	14.30409
_Bengkulu	2008	4.9	13.44	13.44445

	2009	5.08	4.18	13.50763
	2010	4.59	9.08	13.56705
	2011	2.37	3.96	13.61094
	2012	3.61	4.61	13.74294
	2013	4.74	9.94	13.99783
_Lampung	2008	7.15	14.82	13.33262
	2009	6.62	4.18	13.4459
	2010	5.57	9.95	13.55089
	2011	5.78	4.24	13.65886
	2012	5.18	4.3	13.79019
	2013	5.85	7.56	13.95527
_Belitung	2008	5.99	18.4	13.60849
	2009	6.14	1.88	13.65299
	2010	5.63	9.36	13.7212
	2011	3.61	5	13.83923
	2012	3.49	6.57	13.91987
	2013	3.7	8.71	14.05058
_Kepri	2008	8.01	11.9	13.63279
	2009	8.11	1.43	13.70122
	2010	6.9	6.17	13.73755
	2011	7.8	3.32	13.79019
	2012	5.37	3.92	13.8304
	2013	6.25	10.09	14.12673
_Jakarta	2008	12.16	11.11	13.78773
	2009	12.15	2.34	13.88304
	2010	11.05	6.21	13.92706
	2011	10.8	3.97	14.07015
	2012	9.87	4.52	14.24022
	2013	9.02	8	14.60397
_Jabar	2008	12.08	10.23	13.25022
	2009	10.96	2.11	13.3506
	2010	10.33	4.53	13.41727
	2011	9.83	2.75	13.50354
	2012	9.08	4.02	13.56705
	2013	9.22	7.97	13.65299
_Jateng	2008	7.35	10.34	13.2122
	2009	7.33	5.83	13.26213
	2010	6.21	7.11	13.4
	2011	5.93	2.87	13.42247
	2012	5.63	4.85	13.54763
	2013	6.02	8.19	13.62918
_Yogyakarta	2008	5.38	9.88	13.28108
	2009	6	3.6	13.45884
	2010	5.69	7.38	13.52207
	2011	3.97	3.88	13.60232
	2012	3.97	4.31	13.70196

	2013	3.34	7.32	13.76117
_Jatim	2008	6.42	8.73	13.12236
	2009	5.08	3.39	13.25339
	2010	4.25	7.33	13.35348
	2011	4.16	4.72	13.46595
	2012	4.12	4.39	13.52114
	2013	4.33	7.52	13.67193
_Banten	2008	15.18	11.47	13.63758
	2009	14.97	2.88	13.72941
	2010	13.68	6.1	13.76978
	2011	13.06	3.45	13.81551
	2012	10.13	4.37	13.85665
	2013	9.9	9.65	13.97251
_Bali	2008	3.31	9.25	13.43374
	2009	3.13	4.37	13.54107
	2010	3.06	8.1	13.62836
	2011	2.32	3.75	13.69898
	2012	2.04	4.71	13.78247
	2013	1.79	7.35	13.98187
_NTB	2008	6.13	13.01	13.5008
	2009	6.25	3.14	13.63219
	2010	5.29	11.07	13.69985
	2011	5.33	6.38	13.76422
	2012	5.26	4.1	13.81551
	2013	5.38	9.27	13.91082
_NTT	2008	3.73	10.9	13.38473
	2009	3.97	6.49	13.49393
	2010	3.34	9.97	13.59237
	2011	2.69	4.32	13.65299
	2012	2.89	5.1	13.73755
	2013	3.16	8.84	13.82546
_Kalbar	2008	5.41	11.19	13.37701
	2009	5.44	4.91	13.46595
	2010	4.62	8.52	13.51576
	2011	3.88	4.91	13.59549
	2012	3.48	6.62	13.71015
	2013	4.03	9.48	13.87378
_Kalteng	2008	4.59	11.65	13.54877
	2009	4.62	2.85	13.67979
	2010	4.14	9.49	13.80201
	2011	2.55	5.28	13.94177
	2012	3.17	6.73	14.09878
	2013	3.09	6.45	14.25578
_Kalsel	2008	6.18	11.62	13.62314
	2009	6.36	3.86	13.74294
	2010	5.25	9.09	13.83972

	2011	5.23	3.98	13.93418
	2012	5.25	5.96	14.01845
	2013	3.79	6.98	14.10631
_Kaltim	2008	11.11	13.06	13.69859
	2009	10.83	4.3	13.76947
	2010	10.1	7.28	13.81751
	2011	9.84	6.35	13.89617
	2012	8.9	5.6	13.97848
	2013	8.04	9.65	14.37631
_Sulut	2008	10.65	9.71	13.64709
	2009	10.56	2.31	13.7424
	2010	9.61	6.28	13.81551
	2011	8.62	0.67	13.8643
	2012	7.79	6.04	14.03865
	2013	6.68	8.12	14.25377
_Sulteng	2008	5.45	10.4	13.41503
	2009	5.43	5.73	13.48701
	2010	4.61	6.4	13.56384
	2011	4.01	4.47	13.62616
	2012	3.93	5.87	13.69334
	2013	4.27	7.57	13.8105
_Sulsel	2008	9.04	11.79	13.51511
	2009	8.9	3.24	13.71569
	2010	8.37	6.82	13.81551
	2011	6.56	2.87	13.91082
	2012	5.87	4.57	13.99783
	2013	5.1	6.24	14.18015
_Sultengga	2008	5.73	15.28	13.45884
	2009	4.74	4.6	13.55415
	2010	4.61	3.87	13.66469
	2011	3.06	5.09	13.74294
	2012	4.04	5.25	13.8473
	2013	4.46	5.92	13.93348
_Gorontalo	2008	5.65	9.2	13.30468
	2009	5.89	4.35	13.42247
	2010	5.16	7.43	13.47302
	2011	4.26	4.08	13.54436
	2012	4.36	5.31	13.63818
	2013	4.12	5.84	13.97678
_Sulbar	2008	4.57	11.66	13.54173
	2009	4.51	1.78	13.72054
	2010	3.25	5.12	13.75809
	2011	2.82	4.91	13.82149
	2012	2.14	3.28	13.93507
	2013	2.33	5.91	13.96823
_Maluku	2008	10.67	9.34	13.45884

	2009	10.57	6.48	13.56062
	2010	9.97	8.78	13.64116
	2011	7.38	2.85	13.71015
	2012	7.51	6.73	13.79019
	2013	9.75	8.81	14.05846
_Malukut	2008	6.48	11.25	13.45884
	2009	6.76	3.88	13.55415
	2010	6.03	5.32	13.64946
	2011	5.55	4.52	13.69825
	2012	4.76	3.29	13.77521
	2013	3.86	9.78	13.99835
_Papbar	2008	7.65	20.51	13.91581
	2009	7.56	7.52	13.98102
	2010	7.68	4.68	14.00613
	2011	8.94	3.64	14.1591
	2012	5.49	4.88	14.18707
	2013	4.62	4.63	14.35783
_Papua	2008	4.39	12.55	13.91581
	2009	4.08	1.92	14.01116
	2010	3.55	4.48	14.09049
	2011	3.94	3.4	14.15412
	2012	3.63	4.52	14.27609
	2013	3.23	8.27	14.352

Lampiran 3

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Pool: DEWI
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	61.363516	(32,163)	0.0000
Cross-section Chi-square	508.571875	32	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
 Dependent Variable: Y?
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/22/14 Time: 07:07
 Sample: 2008 2013
 Included observations: 6
 Cross-sections included: 33
 Total pool (balanced) observations: 198

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.814833	10.20087	0.766095	0.4445
X1?	0.023866	0.057208	0.417177	0.6770
X2?	-0.122948	0.736390	-0.166960	0.8676
R-squared	0.001174	Mean dependent var		6.279242
Adjusted R-squared	-0.009070	S.D. dependent var		2.628432
S.E. of regression	2.640325	Akaike info criterion		4.794716
Sum squared resid	1359.406	Schwarz criterion		4.844539
Log likelihood	-471.6769	Hannan-Quinn criter.		4.814883
F-statistic	0.114642	Durbin-Watson stat		0.121814
Prob(F-statistic)	0.891745			

Lampiran 4

Uji Hausmant

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Pool: DEWI
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.122256	2	0.0014

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1?	0.027495	0.028215	0.000001	0.3763
X2?	-4.047774	-3.893947	0.002147	0.0009

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y?

Method: Panel Least Squares

Date: 07/22/14 Time: 07:08

Sample: 2008 2013

Included observations: 6

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 198

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	61.80260	4.476384	13.80637	0.0000
X1?	0.027495	0.018080	1.520784	0.1303
X2?	-4.047774	0.323388	-12.51678	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.923443	Mean dependent var	6.279242
Adjusted R-squared	0.907474	S.D. dependent var	2.628432
S.E. of regression	0.799518	Akaike info criterion	2.549404
Sum squared resid	104.1944	Schwarz criterion	3.130663
Log likelihood	-217.3910	Hannan-Quinn criter.	2.784678
F-statistic	57.82744	Durbin-Watson stat	1.607818
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 5

Persamaan Regresi

Dependent Variable: Y?

Method: Pooled Least Squares

Date: 07/22/14 Time: 07:13

Sample: 2008 2013

Included observations: 6

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 198

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	61.80260	4.476384	13.80637	0.0000
X1?	0.027495	0.018080	1.520784	0.1303
X2?	-4.047774	0.323388	-12.51678	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH--C	3.927110			
_SUMUT--C	1.433178			
_SUMBAR--C	1.130235			
_RIAU--C	0.962461			
_JAMBI--C	-1.524606			
_SUMSEL--C	0.534760			
_BENGKULU--C	-2.562332			
_LAMPUNG--C	-0.844092			
_BELITUNG--C	-1.417231			
_KEPRI--C	0.973980			
_JAKARTA--C	5.887779			
_JABAR--C	2.773216			
_JATENG--C	-1.280692			
_YOGYAKARTA--C	-2.378417			
_JATIM--C	-3.009022			
_BANTEN--C	6.690398			
_BALI--C	-4.001813			
_NTB--C	-0.873429			
_NTT--C	-3.606550			
_KALBAR--C	-2.527043			
_KALTENG--C	-2.089049			
_KALSEL--C	-0.476584			
_KALTIM--C	4.145000			
_SULUT--C	3.268821			
_SULTENG--C	-2.324298			
_SULSEL--C	1.426612			
_SULTENGGA--C	-2.090505			
_GORONTALO--C	-2.174395			
_SULBAR--C	-2.859978			
_MALUKU--C	2.776333			
_MALUKUT--C	-0.993442			
_PAPBAR--C	2.055567			
_PAPUA--C	-0.951972			

Effects Specification

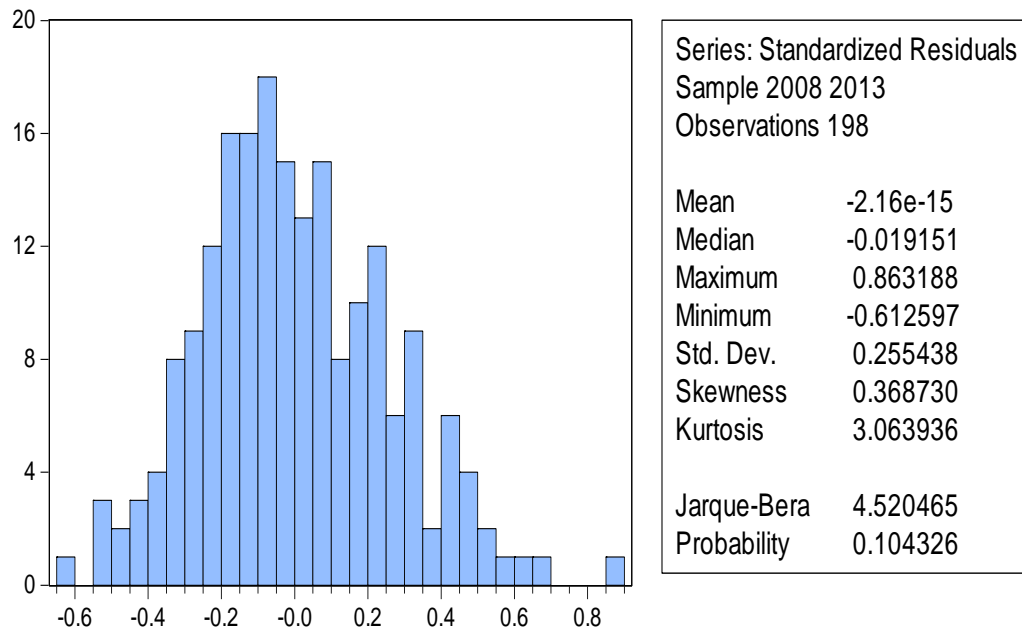
Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.923443	Mean dependent var	6.279242
Adjusted R-squared	0.907474	S.D. dependent var	2.628432
S.E. of regression	0.799518	Akaike info criterion	2.549404
Sum squared resid	104.1944	Schwarz criterion	3.130663
Log likelihood	-217.3910	Hannan-Quinn criter.	2.784678

F-statistic	57.82744	Durbin-Watson stat	1.607818
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 6

UJI NORMALITAS



TABEL T

Titik Persentase Distribusi t (df = 161 –200)

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
161	0.67602	1.28683	1.65437	1.97481	2.34973	2.60671	3.14162
162	0.67601	1.28680	1.65431	1.97472	2.34959	2.60652	3.14130
163	0.67600	1.28677	1.65426	1.97462	2.34944	2.60633	3.14098
164	0.67599	1.28673	1.65420	1.97453	2.34930	2.60614	3.14067
165	0.67598	1.28670	1.65414	1.97445	2.34916	2.60595	3.14036
166	0.67597	1.28667	1.65408	1.97436	2.34902	2.60577	3.14005
167	0.67596	1.28664	1.65403	1.97427	2.34888	2.60559	3.13975
168	0.67595	1.28661	1.65397	1.97419	2.34875	2.60541	3.13945
169	0.67594	1.28658	1.65392	1.97410	2.34862	2.60523	3.13915
170	0.67594	1.28655	1.65387	1.97402	2.34848	2.60506	3.13886
171	0.67593	1.28652	1.65381	1.97393	2.34835	2.60489	3.13857
172	0.67592	1.28649	1.65376	1.97385	2.34822	2.60471	3.13829
173	0.67591	1.28646	1.65371	1.97377	2.34810	2.60455	3.13801
174	0.67590	1.28644	1.65366	1.97369	2.34797	2.60438	3.13773
175	0.67589	1.28641	1.65361	1.97361	2.34784	2.60421	3.13745
176	0.67589	1.28638	1.65356	1.97353	2.34772	2.60405	3.13718
177	0.67588	1.28635	1.65351	1.97346	2.34760	2.60389	3.13691
178	0.67587	1.28633	1.65346	1.97338	2.34748	2.60373	3.13665
179	0.67586	1.28630	1.65341	1.97331	2.34736	2.60357	3.13638
180	0.67586	1.28627	1.65336	1.97323	2.34724	2.60342	3.13612
181	0.67585	1.28625	1.65332	1.97316	2.34713	2.60326	3.13587
182	0.67584	1.28622	1.65327	1.97308	2.34701	2.60311	3.13561
183	0.67583	1.28619	1.65322	1.97301	2.34690	2.60296	3.13536
184	0.67583	1.28617	1.65318	1.97294	2.34678	2.60281	3.13511
185	0.67582	1.28614	1.65313	1.97287	2.34667	2.60267	3.13487
186	0.67581	1.28612	1.65309	1.97280	2.34656	2.60252	3.13463
187	0.67580	1.28610	1.65304	1.97273	2.34645	2.60238	3.13438
188	0.67580	1.28607	1.65300	1.97266	2.34635	2.60223	3.13415
189	0.67579	1.28605	1.65296	1.97260	2.34624	2.60209	3.13391
190	0.67578	1.28602	1.65291	1.97253	2.34613	2.60195	3.13368
191	0.67578	1.28600	1.65287	1.97246	2.34603	2.60181	3.13345
192	0.67577	1.28598	1.65283	1.97240	2.34593	2.60168	3.13322
193	0.67576	1.28595	1.65279	1.97233	2.34582	2.60154	3.13299
194	0.67576	1.28593	1.65275	1.97227	2.34572	2.60141	3.13277
195	0.67575	1.28591	1.65271	1.97220	2.34562	2.60128	3.13255
196	0.67574	1.28589	1.65267	1.97214	2.34552	2.60115	3.13233
197	0.67574	1.28586	1.65263	1.97208	2.34543	2.60102	3.13212
198	0.67573	1.28584	1.65259	1.97202	2.34533	2.60089	3.13190
199	0.67572	1.28582	1.65255	1.97196	2.34523	2.60076	3.13169
200	0.67572	1.28580	1.65251	1.97190	2.34514	2.60063	3.13148

TABEL F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05															
df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
181	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
182	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
183	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
184	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
185	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.75	1.72
186	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.75	1.72
187	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
188	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
189	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
190	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
191	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
192	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
193	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
194	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
195	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
196	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
197	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
198	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
199	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
200	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
201	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
202	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
203	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
204	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
205	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
206	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
207	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.71
208	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
209	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
210	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
211	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
212	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
213	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
214	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
215	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
216	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
217	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
218	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
219	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
220	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
221	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
222	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
223	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
224	3.88	3.04	2.64	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
225	3.88	3.04	2.64	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DEWI MENTARI. Lahir di Jakarta, 13 Juli 1992 adalah anak kedua dari dua bersaudara. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. H. Bakri RT/RW 009/04 No. 30 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Menempuh pendidikan formal di SDN Cipinang Melayu 05 Pagi tahun 1998-2004, SMP Negeri 117 Jakarta tahun 2004-2007, SMK Negeri 10 Jakarta tahun 2007-2010, dan mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta melalui jalur Ujian Penmaba tahun 2010. Kegiatan yang telah diikuti selama kuliah antara lain menjadi anggota Danus (Dana Usaha) di HMJ E&A, menjadi anggota HRD di BEMFE, MPA UNJ, pengalaman mengajar sebagai guru ekonomi (PPL) di SMA Negeri 53 Jakarta, pengalaman bekerja (PKL) di Asuransi Staco Mandiri. Adapun pengalaman lainnya adalah, pada saat Penulis menempuh pendidikan tingkat SMP, penulis menjadi Ketua Osis Periode 2005-2006. Serta aktif dalam bidang olahraga Bola Basket dari tahun 2004-2010. Penulis juga memiliki pengalaman bekerja di beberapa instansi pemerintah dan perusahaan swasta.